

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SURABAYA 2019





<https://surabaya.kota.bps.go.id>

**INDIKATOR  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KOTA SURABAYA  
2019**

---

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2019**

Katalog BPS : 4102004.3578  
No Publikasi : 35780.1935  
Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman : VI + 116

Naskah :  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :  
BPS Kota Surabaya

## KATA PENGANTAR

Pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dievaluasi terhadap sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2019” ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang digunakan bersumber dari BPS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan. Data yang berasal dari BPS, utamanya bersumber dari hasil Susenas, Sakernas, Survei Statistik Politik dan Keamanan dan hasil Sensus Penduduk.

Hasil pengolahan data dari berbagai sumber tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis indikator kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta indikator kemiskinan dan indikator sosial lainnya.

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat dan semoga kehadiran publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

Surabaya, Oktober 2019  
BPS Kota Surabaya  
Kepala



Suparno, SE, MM



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
1. Kependudukan.....	1
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan rasio Jenis kelamin .....	2
1.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk .....	4
1.3 Angka Beban Ketergantungan .....	6
1.4 Penggunaan Alat/Cara KB.....	8
2. Kesehatan .....	11
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk .....	12
2.2 Jaminan Kesehatan Penduduk .....	15
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan .....	17
3. Pendidikan .....	21
3.1 Angka Buta Huruf .....	22
3.2 Rata-rata Lama Sekolah .....	24
3.3 Tingkat Pendidikan .....	25
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah .....	26
3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan .....	31
4. Ketenagakerjaan .....	35
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	36
4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	38
4.3 Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan .....	40

4.4 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	43
4.5 Kelompok Umur .....	44
4.6 Upah/Gaji/Pendapatan Bersih .....	45
5. Taraf dan Pola Konsumsi .....	47
5.1 Pengeluaran Rumah Tinggal .....	47
5.2 Konsumsi Energi dan Protein .....	52
6. Perumahan dan Lingkungan .....	55
6.1 Kualitas Rumah Tangga .....	56
6.2 Fasilitas Rumah Tinggal .....	58
6.3 Status Kepemilikan Rumah Tangga .....	60
7. Kemiskinan .....	63
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Surabaya.....	64
7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keperahan Kemiskinan .....	66
7.3 Karakteristik Pendidikan Anggota Rumah Tangga .....	68
7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan Anggota Rumah Tangga .....	71
7.5 Karakteristik Perumahan Rumah Tangga .....	72
8. Sosial Lainnya .....	77
8.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan .....	77
8.2 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan .....	79
8.3 Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi .....	81
8.4 Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha dan Penerima Pelayanan Kesehatan Gratis .....	83
8.5 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan .....	86
Lampiran .....	89





# 1. KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

*Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta distribusi penduduk yang tidak merata menjadi masalah serius yang harus dihadapi.*

## 1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi sekarang ini dan terus menjadi perhatian pemerintah jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur adalah Kota Surabaya. Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2019 berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2020 tercatat sebanyak 2,90 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 10,64 ribu jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018 yang mencapai 2,89 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan delapan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Surabaya saat ini mengalami peningkatan sekitar 4,49 persen dari jumlah penduduk pada waktu pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yang sebesar 2,77 juta jiwa. Dengan kata lain, selama kurun waktu delapan tahun terakhir jumlah penduduk Kota Surabaya telah mengalami pertambahan penduduk sebesar 124,58 ribu jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2014-2019

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	2,83	0,43	97,54
2015	2,85	0,52	97,56
2016	2,86	0,49	97,63
2017	2,87	0,43	97,64
2018	2,89	0,38	97,64
2019	2,90	0,37	97,66

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020

Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kota Surabaya pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,37 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur sebesar 0,43 persen dan menunjukkan *trend* menurun pada tahun-tahun

Gambar 1.1  
Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Surabaya, Tahun 2014-2019



Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Surabaya 2010-2020

selanjutnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya telah menunjukkan adanya keberhasilan.

Dilihat berdasarkan kecamatan, pada periode 2018-2019 laju pertumbuhan penduduk di 12 kecamatan berada di atas laju pertumbuhan penduduk Kota Surabaya. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi dicapai oleh Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Benowo dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,01 persen, diikuti Kecamatan Wiyung dan Kenjeran (1,52 persen). Sementara itu, 19 kecamatan mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah Kota Surabaya. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah dicapai oleh Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tegal Sari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Cantian, masing-masing laju pertumbuhan penduduknya sebesar -0,58 persen.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 97,66. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 97 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kota Surabaya lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin berdasarkan kecamatan, dari 31 kecamatan di Kota Surabaya, terdapat 10 kecamatan yang rasio jenis kelamin di atas 100, sisanya sebanyak 21 kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100. Rasio jenis kelamin terkecil terdapat di Kecamatan Mulyorejo (90,40) dan diikuti oleh Kecamatan Gubeng (90,97), Kecamatan Gayungan (91,24), Kecamatan Lakarsantri (94,05). Sementara itu, kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi pada tahun 2019 adalah Kecamatan Asem Rowo (104,23), Kecamatan Karang Pilang (103,07), Kecamatan Tenggilis Mejoyo (102,57), Kecamatan Kenjeran (102,02), Kecamatan Semampir (101,95).

## 1.2. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

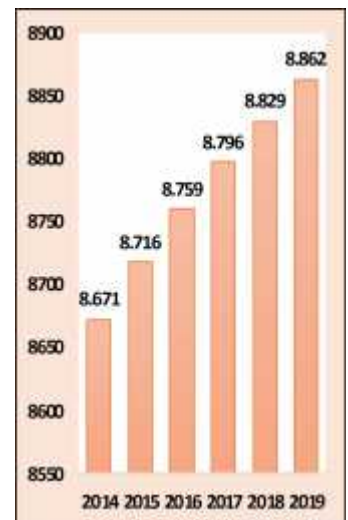
Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Kota Surabaya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk terlihat jelas antara penduduk di desa dan kota. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Kepadatan penduduk di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk walaupun semakin tahun pertumbuhannya semakin melandai. Pada tahun 2014 kepadatan penduduk Kota Surabaya sekitar 8.671 jiwa per km<sup>2</sup>, tahun 2015 meningkat menjadi sekitar 8.716 jiwa per km<sup>2</sup>, selanjutnya pada tahun 2016 sekitar 8.759 per jiwa km<sup>2</sup>, dan tahun 2017 sekitar 8.796 jiwa per km<sup>2</sup> serta tahun 2018 sekitar 8.829 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan pada tahun 2019 kepadatan penduduk Jawa Timur sekitar 8.862 jiwa per km<sup>2</sup>.

Bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019, kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kota Surabaya yang mencapai sekitar 8.862 jiwa per km<sup>2</sup> diikuti Kota Mojokerto dan Kota Malang dengan masing-masing kepadatan penduduk sekitar 7.833 jiwa per km<sup>2</sup> dan 5.993 jiwa

**Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk Kota Surabaya, Tahun 2014 - 2019**



Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Surabaya 2010-2020

per km<sup>2</sup>. Kemudian disusul Kota Pasuruan sekitar 5.679 jiwa per km<sup>2</sup> dan Kota Madiun sekitar 5.218 per km<sup>2</sup>.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk, 5 Kabupaten Terbesar di Provinsi Jawa Timur, 2019

<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Kepadatan Penduduk (per 1.000 km<sup>2</sup>)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Kota Surabaya	2.896.195	326,81	9
Kota Mojokerto	129.014	16,47	8
Kota Malang	870.682	145,28	6
Kota Pasuruan	200.422	35,29	6
Kota Madiun	177.007	33,92	5

Sumber : *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020*

Tingginya rasio penduduk yang tinggal di Jawa Timur didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jawa Timur. Jumlah penduduk terbesar mendiami Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Malang. Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur dengan luas wilayah kurang dari satu persen dari luas total wilayah daratan Jawa Timur menyebabkan kepadatan penduduk di kota Surabaya sangat tinggi.

Bila dilihat dari ketimpangan distribusi penduduk Kota Surabaya, ketimpangan terjadi di Kecamatan Simokerto dengan kepadatan penduduk sekitar 29.485 jiwa per km<sup>2</sup>, kedua adalah Kecamatan Sawahan sekitar 25.593 jiwa per km<sup>2</sup>. Selanjutnya disusul Kecamatan Kenjeran sekitar 24.473 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan Bubutan sekitar 23.728 jiwa per km<sup>2</sup>., Kecamatan Tambaksari sekitar 23.315 jiwa per km<sup>2</sup>. Adapun kecamatan lainnya yang kepadatannya di atas 10.000 jiwa per km<sup>2</sup> yaitu Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Semampir, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Genteng, Kecamatan Suko Manunggal.

### 1.3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2014-2019 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 angka beban tanggungan Kota Surabaya sebesar 35,96 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 36 penduduk usia tidak produktif. Angka beban ketergantungan Kota Surabaya pada periode 2014-2019 menunjukkan *trend* stabil, yaitu 36, artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 36 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang mereka tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi

tidak dapat dimanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

**Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Kota Surabaya, Tahun 2014-2019**

<b>Tahun</b>	<b>0-14 Tahun</b>	<b>15-64 Tahun</b>	<b>65 Tahun +</b>	<b>Angka Beban Ketergantungan (jiwa)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
2014	22,47	73,40	4,56	36,82
2015	22,25	73,60	4,67	36,58
2016	22,00	73,69	4,79	36,35
2017	21,75	73,76	4,92	36,17
2018	21,52	73,78	5,07	36,04
2019	21,22	73,55	5,23	35,96

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Namun proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun), usia tua (65+), dan angka beban ketergantungan menunjukkan *trend* yang stabil seperti yang ditunjukkan oleh tabel 1.3. Pada Tabel 1.3 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kota Surabaya pada tahun 2019 masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2020 mencapai 73,55 persen. Penduduk usia produktif juga menunjukkan *trend* meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kota Surabaya menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut 65 tahun ke atas pada periode 2014-2019 juga menunjukkan *trend* yang relatif meningkat, pada tahun 2019 komposisi kelompok umur ini sebesar 5,23 persen dari seluruh penduduk Kota Surabaya.

#### 1.4 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017-2018, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB berada pada kisaran 50 persen yaitu masing masing sebesar 49,66 persen pada tahun 2017 dan 50,21 persen pada tahun 2018. Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil yang paling banyak diminati. Pada tahun 2017 penggunaan suntikan mencapai 45,54 persen dan turun menjadi 44,69 persen pada tahun 2018. Demikian halnya dengan pengguna pil, penggunaan pil juga mengalami penurunan dari 23,1 persen pada tahun 2017 menjadi 22,43 persen pada tahun 2018.



**Tabel 1.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2017 dan 2018**

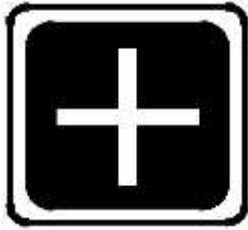
Alat/Cara Kontrasepsi	2017	2018
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	12,33	7,03
MOP/Vasektomi	0,88	0,84
AKDR/IUD/Spiral	10,11	10,12
Suntikan	45,54	44,69
Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit	2,22	5,27
Pil	23,1	22,43
Kondom/Karet	2,03	7,84
Intravag/Tissue/Kondom Wanita	0,29	0
Cara Tradisional	3,5	1,79
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	49,66	50,21

Sumber : Hasil Susenas 2017-2018

Selain alat kontrasepsi suntikan dan pil, beberapa alat kontrasepsi lain yang masih sering digunakan adalah MOW/Tubektomi, AKDR/IUD/Spiral, Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit dan cara Tradisional. Pada tahun 2017 penggunaan MOW/Tubektomi sebesar 12,33 persen dan turun cukup signifikan menjadi sebesar 7,03 persen pada tahun 2018. Penggunaan AKDR/IUD/Spiral mengalami sedikit peningkatan dari 10,11 persen pada tahun 2017 menjadi 10,12 pada tahun 2018. Penggunaan Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit mengalami peningkatan dari 2,22 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,27 pada tahun 2018. Penggunaan Kondom/karet mengalami peningkatan dari 2,03 pada 2017 menjadi 7,84 pada 2018. Penurunan beberapa alat kontrasepsi di atas kemungkinan peserta KB beralih alat kontrasepsi yang digunakan.

Jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah MOP/vasektomi dengan persentase penggunaan sebesar 0,84 persen, sedangkan alat kontrasepsi yang sama sekali tidak digunakan adalah intravag/tissue/kondom wanita. Hal ini diduga karena sosialisasi informasi masih kurang optimal sehingga banyak yang masih takut memilih alat kontrasepsi ini.





## 2. KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

## 2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

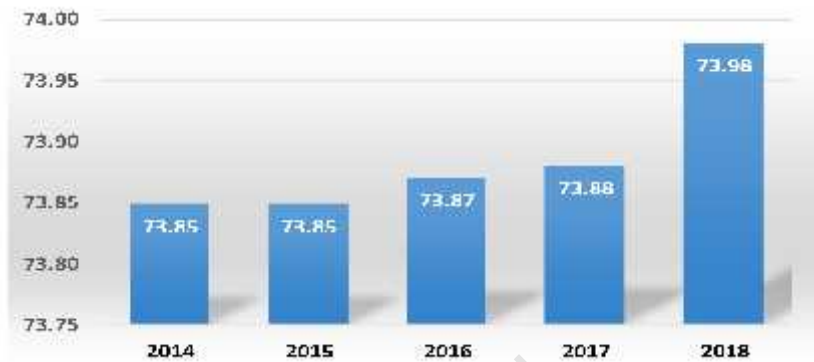
Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur  $x$  adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $x$ , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup menggunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite.

**Gambar 2.1**

**Umur Harapan Hidup Penduduk Kota Surabaya, Tahun 2014-2018**



Sumber : BPS Kota Surabaya

Angka Harapan hidup Kota Surabaya tahun 2018 cukup tinggi, yaitu 73,98. Dari hasil penghitungan proyeksi yang dilakukan oleh BPS RI, rata-rata AHH di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir (2014 – 2018) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 73,85 (2014) menjadi 73,98 (2018).

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dan lain-lain. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2018 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kota Surabaya mencapai 12,60 persen, mengalami penurunan yang signifikan sebesar 31,93 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 44,53 persen. Angka Kesakitan penduduk laki-laki tahun 2018 lebih tinggi dari penduduk perempuan, masing-masing sekitar 13,37 persen dan 11,85

persen. Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah.

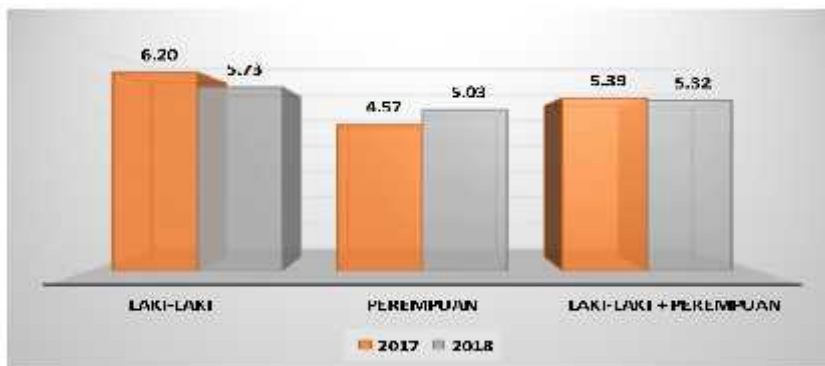
Hasil Susenas tahun 2017 dan 2018 rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 5 hari. Pada tahun 2017 dan 2018 rata-rata lama sakit penduduk perempuan sedikit lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki. Rata-rata lama sakit penduduk laki-laki pada tahun 2017 sekitar 6,20 hari dan turun menjadi 5,73 hari pada tahun 2018. Lamanya sakit pada penduduk perempuan pada periode yang sama naik dari 4,57 hari menjadi 5,03 hari selama tahun 2017-2018. Semakin lamanya kesakitan (jumlah rata-rata hari sakitnya banyak), maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

**Tabel 2.1 Angka Kesakitan dan Rata –rata lama Sakit Tahun 2017 – 2018**

Penduduk	Angka Kesakitan (persen)		Rata - Rata Lama Sakit (hari)	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	46,88	13,37	6,20	5,73
Perempuan	42,39	11,85	4,57	5,03
Laki-Laki + Perempuan	44,53	12,6	5,39	5,32

Sumber : Hasil Susenas 2017-2018

**Gambar 2.2 Rata-rata Lama Sakit (Hari), Tahun 2017-2018**



Sumber : Hasil Susenas 2017-2018

## 2.2 Jaminan Kesehatan Penduduk

Kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia sehingga kesehatan merupakan kewajiban pemerintah kepada warga negaranya terutama terhadap warga negara yang kurang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu karena pengaruh ketidakmampuan secara ekonomi. Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) yang menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

**Tabel 2.2 Persentase Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki Jaminan Kesehatan Berdasarkan Kelompok Kuintil Pengeluaran Tahun 2018**

Kelompok Kuintil Pengeluaran	Jaminan Kesehatan (persen)
(1)	(2)
1	51,41
2	55,02
3	64,04
4	65,43
5	69,49

Sumber : Hasil Susenas 2018

Secara keseluruhan, lebih dari setengah penduduk Kota Surabaya di setiap kuintil pengeluaran sudah memiliki jaminan kesehatan. Jika dilihat dari kelompok kuintil pengeluarannya, kelompok dengan pengeluaran terendah (Kuintil 1) memiliki persentase terendah dalam kepemilikan jaminan kesehatan yaitu 51,41 persen. Kemudian di Kuintil 2 yang memiliki jaminan kesehatan sebesar 55,02 persen. Kuintil 3 dan Kuintil 4 masing-masing memiliki 64,04 dan 65,43 persen penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Kuintil 5 merupakan kelompok yang mempunyai paling banyak penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, yaitu 69,49 persen.

**Tabel 2.3 Proporsi Penduduk di Kota Surabaya Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Tahun 2018**

Jenis Jaminan Kesehatan	Laki-Laki (persen)	Perempuan (persen)	Laki-Laki dan Perempuan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerima Bantuan iuran	17,49	17,50	17,50
Non Penerima Bantuan iuran	30,56	30,33	30,44
Jaminan Kesehatan Daerah	4,15	4,18	4,16
Asuransi Swasta	3,26	3,45	3,36
Perusahaan/Kantor	8,62	7,96	8,29
Tidak punya	38,69	39,14	38,92

Sumber : Hasil Susenas 2018

Dari seluruh penduduk Kota Surabaya, sebanyak 38,92 persen penduduk belum memiliki jaminan kesehatan. Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) hadir dalam pelayanan kesehatan karena perintah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan mengatur dengan rinci tujuan, prinsip, para pelaku, dan tata kelola JKN dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan program jaminan sosial, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penetapan hal-hal tersebut melalui proses penetapan kebijakan publik.

Hal ini berbeda dengan penyelenggaraan program jaminan/asuransi kesehatan privat/komersial. Asuransi kesehatan komersial berlangsung berdasarkan kesepakatan jual beli antara perusahaan asuransi



dengan pembeli produk asuransi. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur hal-hal berkaitan dengan perizinan usaha perasuransian dan tata cara perjanjian jual-beli. Manfaat, besar iuran, dan tata cara pengelolaan diatur oleh masing-masing perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dan peserta menegosiasikan hal-hal tersebut dan melaksanakannya sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang tercantum dalam polis asuransi.

Berdasarkan keikutsertaannya dalam jaminan kesehatan, penduduk Kota Surabaya terbagi dalam lima kelompok. Penduduk penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 17,5 persen penduduk. Penduduk non penerima bantuan iuran JKN sebesar 30,44 persen. Kelompok yang memiliki Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar 4,16 persen. Penduduk yang memiliki asuransi swasta sebesar 3,36 persen. Serta penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dari perusahaan atau kantor sebesar 8,29 persen.

Berdasarkan proporsinya, penduduk laki-laki lebih banyak memiliki jaminan kesehatan daripada penduduk perempuan. Jaminan kesehatan terbesar yang dimiliki adalah JKN non penerima bantuan iuran, yang menandakan kesadaran penduduk Kota Surabaya akan pentingnya memiliki jaminan kesehatan cukup baik.

### **2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan**

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5

tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

**Tabel 2.4 Persentase Perempuan Pernah Kawin Menurut Penolong Persalinan, Tahun 2017 – 2018**

<b>Penolong Persalinan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>Tenaga Kesehatan</b>	100,00	100,00
- Dokter	51,53	45,94
- Bidan	48,47	51,73
- Lainnya	0,00	2,33
<b>Bukan Tenaga Kesehatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Dukun Tradisional	0,00	0,00
- Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Hasil Susenas 2017-2018

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana pada tahun 2017 persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 100,00 persen, dengan kata lain semua proses persalinan di Kota Surabaya ditolong oleh tenaga kesehatan, demikian hal nya pada tahun 2018. Peran dokter dan bidan memegang peranan penting dalam pencapaian ini. Pada tahun 2017 penolong persalinan yang dilakukan oleh dokter mendominasi sebesar 51,53 dari total persalinan, sedang pada tahun 2018 penolong persalinan didominasi oleh bidan sebesar 51,73 persen. Penolong persalinan oleh dukun tradisional terjadi terutama dari 1,31 persen pada tahun 2015 menjadi 0,00 persen sejak tahun 2016 hingga 2018.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Dampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku

penduduk itu sendiri. Tinggi persentase penduduk, baik laki-laki maupun perempuan yang memanfaatkan berobat ke praktek dokter/klinik, dikarenakan lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanannya jauh lebih baik. Sebagai dampaknya, akan terlihat berbagai keluhan dan masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat dan lebih baik.

**Tabel 2.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, Tahun 2017 – 2018**

Tempat Berobat	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki dan Perempuan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah Sakit	30,44	30,26	26,26	25,42	28,31	27,71
Praktek Dokter atau klinik	42,51	44,15	48,25	41,79	45,44	42,91
Puskesmas	28,76	27,89	28,44	33,28	28,60	30,72
UKBM	0,41	1,04	0,78	2,35	0,60	1,73
Pengobatan Tradisional	1,12	0,30	1,04	0,45	1,08	0,38
Dukun bersalin & lainnya	1,51	0,59	-	0,80	0,74	0,70

Sumber : Hasil Susenas 2017-2018

Peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tersebut ditandai dengan banyaknya penduduk yang berobat ke tenaga kesehatan. Sebagian besar masyarakat Kota Surabaya memilih berobat jalan ke Praktek Dokter atau klinik, Pada tahun 2018 penduduk laki-laki yang berobat jalan ke praktek dokter atau klinik sebesar 44,15 persen, sedangkan penduduk perempuan sebesar 41,79 persen. Puskesmas dan Rumah Sakit menempati posisi kedua dan ketiga yang menjadi tujuan berobat jalan. Hal ini karena kedua fasilitas pelayanan kesehatan tersebut yang mudah dijangkau dan yang tersedia baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada tahun 2017, pasien yang berobat jalan ke puskesmas sebesar 28,60 persen meningkat menjadi sebesar 30,72 persen pada tahun 2018. Tempat rujukan berobat rumah sakit pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 28,31 persen menjadi sebesar 27,71 persen. Tempat berobat jalan UKBM mengalami peningkatan dari 0,60 persen pada 2017 menjadi sebesar 1,73 persen pada tahun 2018. Sedangkan pengobatan tradisional dan dukun bersalin & lainnya mengalami penurunan, untuk pe-

ngobatan tradisional dari 1,08 persen pada tahun 2017 menjadi 0,38 persen pada tahun 2018, sedangkan untuk dukun bersalin dan lainnya dari 0,74 persen pada 2017 menjadi 0,70 persen pada 2018.

Secara menyeluruh kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih mengalami peningkatan yang sangat nyata dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/tidak terlatih/tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah bahkan negara.

<https://surabayakota.bps.go.id>



## 3. PENDIDIKAN

Di era globalisasi modern saat ini, perkembangan di segala bidang keilmuan semakin pesat. Dari berbagai perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian para ilmuwan adalah mengenai konsep pembangunan. Paradigma baru mengenai konsep pembangunan ini dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan era sebelum tahun 1970-an yang menitikberatkan pembangunan hanya pada pertumbuhan ekonomi saja. Namun, pada kenyataannya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dipandang dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek sosial lainnya, salah satunya adalah aspek pendidikan.

Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal. Dengan pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara di mata dunia internasional.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

Memasuki era tahun 1990-an, pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan melalui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang ditunjang dengan program kejar paket. Sebagai tindak lanjut dari keseriusan pemerintah di bidang pendidikan, maka diterbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bahwa anggaran pendidikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total anggaran belanja.

Pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan di Kota Surabaya menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada indikator capaian di bidang pendidikan seperti angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi sekolah. Sedangkan indikator tantangan di bidang pendidikan akan difokuskan pada kualitas pelayanan pendidikan, serta angka putus sekolah dan angka mengulang.

### **3.1 Angka Buta Huruf**

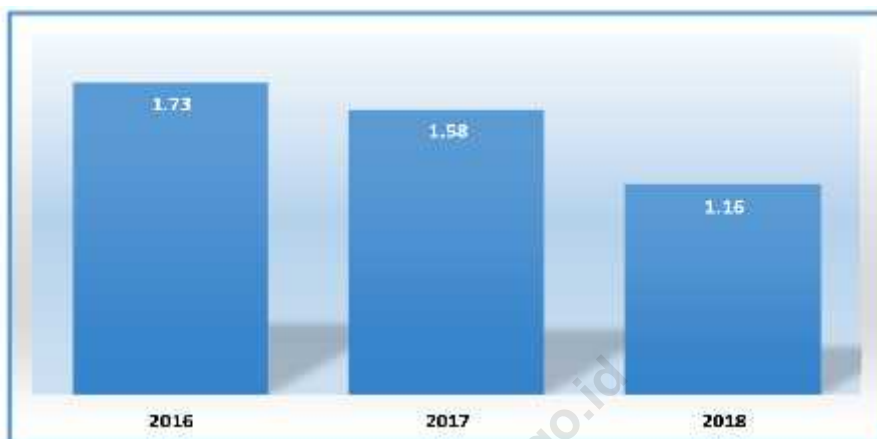
Secara harfiah, angka buta huruf merupakan suatu ukuran persentase penduduk usia sepuluh tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis yakni diartikan dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana atau dapat membaca dan menulis huruf Braille.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Surabaya dikatakan belum terbebas dari buta huruf. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka buta huruf di Surabaya tahun 2018 mencapai 1,16 persen. Dari penduduk usia di atas 15 tahun, sekitar 1,16 persen belum bisa membaca dan menulis. Angka buta huruf ini turun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1,58 persen.

Angka buta huruf penduduk Kota Surabaya paling banyak pada penduduk perempuan kelompok usia di atas 45 tahun, yaitu 4,63 persen, penduduk laki-laki yang buta huruf pada kelompok umur ini sebesar 1,81 persen. Sedangkan pada kelompok usia 15-44 tahun angka buta hurufnya relatif kecil, yaitu penduduk perempuan sebesar 0,11 persen dan penduduk laki-laki sebesar 0,38 persen.

Dilihat dari jumlah penduduk miskin, tahun 2018 penduduk miskin Kota Surabaya yang buta huruf usia 15 - 24 tahun 0,00 persen, sedangkan untuk usia 15-55 tahun sebesar 2,22 persen. Berarti dari penduduk miskin di Kota Surabaya usia 15-55 tahun sekitar 2,22 persen belum bisa membaca dan menulis.

**Gambar 3.1. Angka Buta Huruf Kota Surabaya, 2018 (Persen)**



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018

Lebih lanjut pembahasan secara gender, angka buta huruf penduduk perempuan di Kota Surabaya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Angka buta huruf penduduk perempuan tahun 2018 sebesar 1,52 persen, sedangkan angka buta huruf penduduk laki-laki sebesar 0,78 persen.

**Gambar 3.2. Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kota Surabaya, 2017-2018**



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017-2018

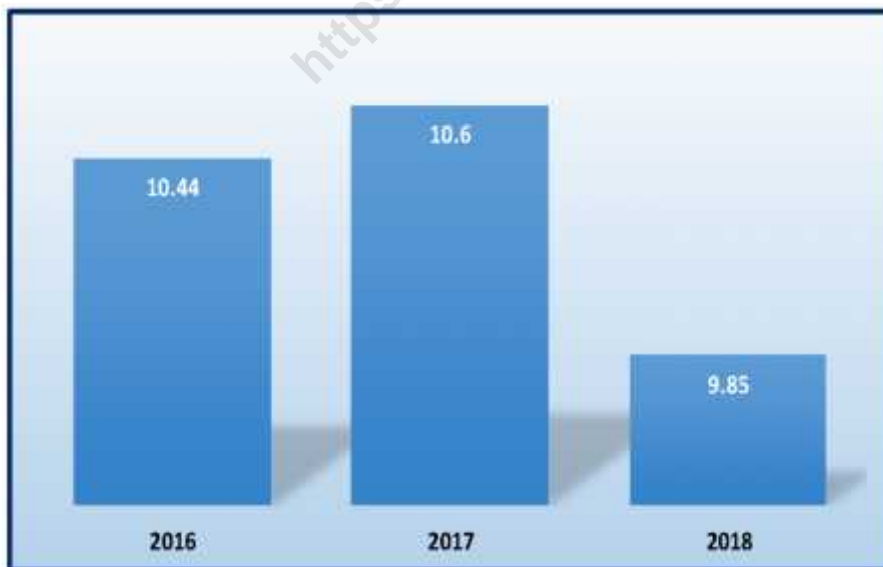
Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa angka buta huruf penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya fasilitas pendidikan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor budaya dan lainnya.

### 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah Kota Surabaya tahun 2018 mencapai 9,85 tahun, artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Surabaya yang berusia 15 tahun ke atas mengenyam bangku pendidikan sekolah selama 9,85 tahun atau setara dengan kelas IX tingkat SMP. Capaian ini sudah memenuhi target pemerintah dengan program wajib belajar 9 tahunnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, rata-rata lama sekolah Kota Surabaya sedikit mengalami penurunan dari 10,6 tahun pada 2017 menjadi 9,85 tahun pada 2018.

Secara gender, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih lama dibandingkan dengan penduduk perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan mencapai 9,45 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki mencapai 10,27 tahun.

**Tabel 3.3. Rata-rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2016-2018 (Tahun)**



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018



### 3.3 Tingkat Pendidikan

Secara umum, tingkat pendidikan di Kota Surabaya tidak begitu tinggi. Persentase penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 16,55 persen, tamat sekolah dasar (SD) atau sederajatnya sebesar 17,81 persen dan tamat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 19,62 persen. Dengan demikian, sebanyak 53,98 persen penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas hanya tamatan SMP ke bawah.

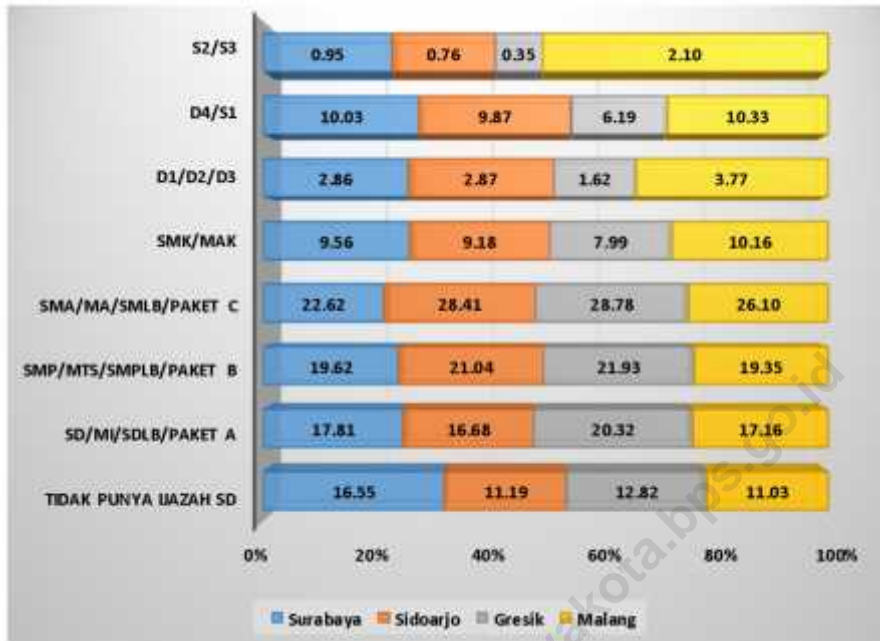
Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah terlihat belum memenuhi target. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat sekolah menengah atas (SMA) ke atas 46,02 persen yang terdiri dari tamat SMA atau sederajatnya sebesar 32,18 persen, sedangkan tamat diploma (D1/D2/D3), dan tamat sarjana ke atas, yang terbagi dalam D4/S1 dan S2/S3 masing-masing sebesar 2,86 persen, 10,03 persen dan 0,95 persen.

**Gambar 3.4. Persentase Penduduk Kota Surabaya Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018**



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018

**Gambar 3.5. Perbandingan Persentase Penduduk Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Malang Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018**



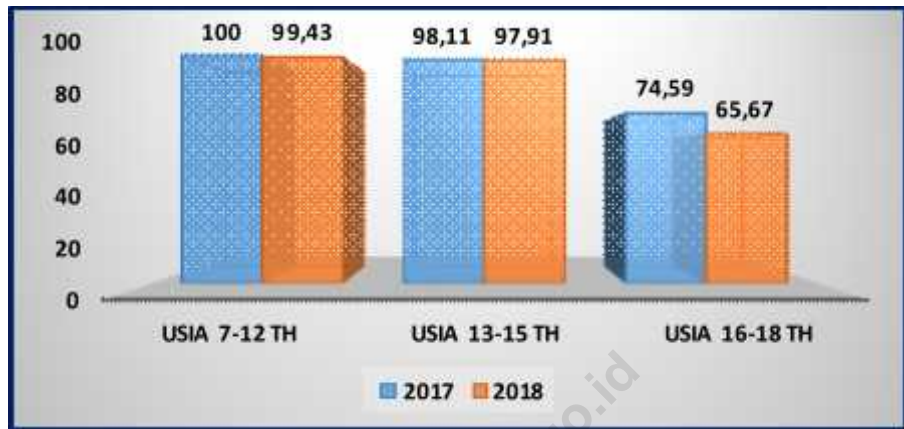
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018

### 3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui capaian di bidang pendidikan, salah satunya dengan melihat tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Indikator yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi sekolah diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM).

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS pada suatu kelompok usia tertentu di wilayah tertentu menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar bagi penduduk di wilayah tersebut untuk dapat mengenyam pendidikan menurut jenjang tertentu. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai saat ini mendorong peningkatan partisipasi sekolah di berbagai kelompok usia sekolah.

**Gambar 3.6 Angka Partisipasi Sekolah Kota Surabaya Menurut Kelompok Usia Tahun 2017-2018**



Sumber: Susenas, 2018

Secara umum, APS Kota Surabaya per masing-masing kelompok usia sekolah ditunjukkan pada gambar 3.6. APS kelompok usia 7-12 tahun Kota Surabaya tahun 2018 sebesar 99,43 yang berarti bahwa 99,43 persen dari seluruh penduduk Kota Surabaya usia 7-12 tahun mengenyam pendidikan di sekolah (tanpa) memandang tingkatan sekolahnya. APS kelompok usia 13-15 tahun Kota Surabaya tahun 2018 sebesar 97,91 persen, lebih rendah dari APS kelompok usia 7-12 tahun. Interpretasinya sama dengan sebelumnya, bahwa penduduk Kota Surabaya usia 13-15 tahun 97,91 persen memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. Sementara itu, APS kelompok usia 16-18 tahun Kota Surabaya tahun 2018 sebesar 65,67 persen. Angka ini lebih kecil lagi dibandingkan APS kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 34 persen penduduk Kota Surabaya usia 16-18 tahun tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan perguruan tinggi.

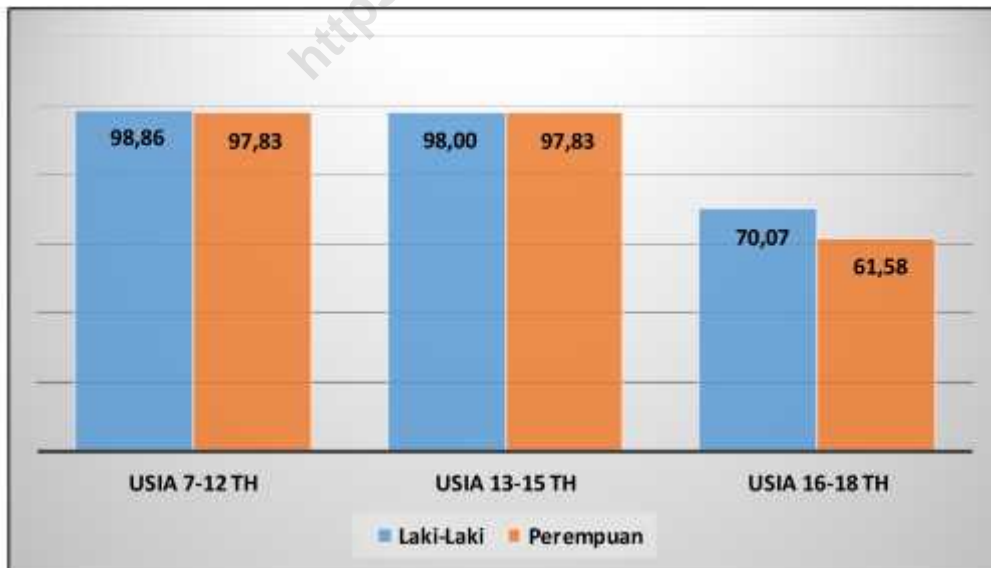
APS usia 7-12 tahun untuk tahun 2017 sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 100,00 persen. APS usia 13-15 tahun pada tahun 2018 turun dari 98,11 persen pada tahun 2017 menjadi 97,91 persen. Secara umum APS usia 7-12 tahun lebih besar dari pada APS usia 13-15 tahun. Demikian pula APS usia 13-15 tahun lebih tinggi dari pada APS usia 16-18 tahun. APS usia 16-18 tahun mengalami penurunan dari 74,59 persen pada tahun 2017 menjadi 65,67 persen.

Secara umum APS laki-laki lebih tinggi daripada APS perempuan.

Pada kelompok umur 7-12 tahun, APS laki-laki lebih tinggi dari pada APS perempuan, masing-masing sebesar 98,86 persen dan 97,83 persen. Demikian halnya pada kelompok umur 13-15 tahun, APS laki-laki sedikit lebih tinggi dari pada APS perempuan, masing-masing sebesar 98,00 persen dan 97,83 persen. Pada kelompok usia 16-18 tahun nilai APS laki-laki dan perempuan tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Pada kelompok umur 16-18 tahun APS laki-laki turun dari 76,56 persen pada tahun 2017 menjadi 70,07 persen. Demikian juga dengan APS perempuan, mengalami penurunan dari 72,84 persen menjadi 61,58 persen pada tahun 2018.

APS anak usia dini 0-6 tahun sebesar 36,36 persen, sedangkan untuk APS anak usia dini 3-4 tahun sebesar 47,12 persen. Angka partisipasi sekolah pendidikan anak usia dini pada kelompok usia 3-4 tahun lebih banyak dari pada kelompok usia 0-6 tahun, hal ini dapat dipahami karena pada penduduk kelompok usia 0-6 tahun terdapat penduduk usia 0-2 tahun yang pada umumnya belum bersekolah. Sementara penduduk kelompok usia 3-4 tahun saat ini telah banyak yang mengikuti pendidikan pra sekolah sebelum mereka masuk ke jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat).

**Gambar 3.7 Angka Partisipasi Sekolah Kota Surabaya Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018**

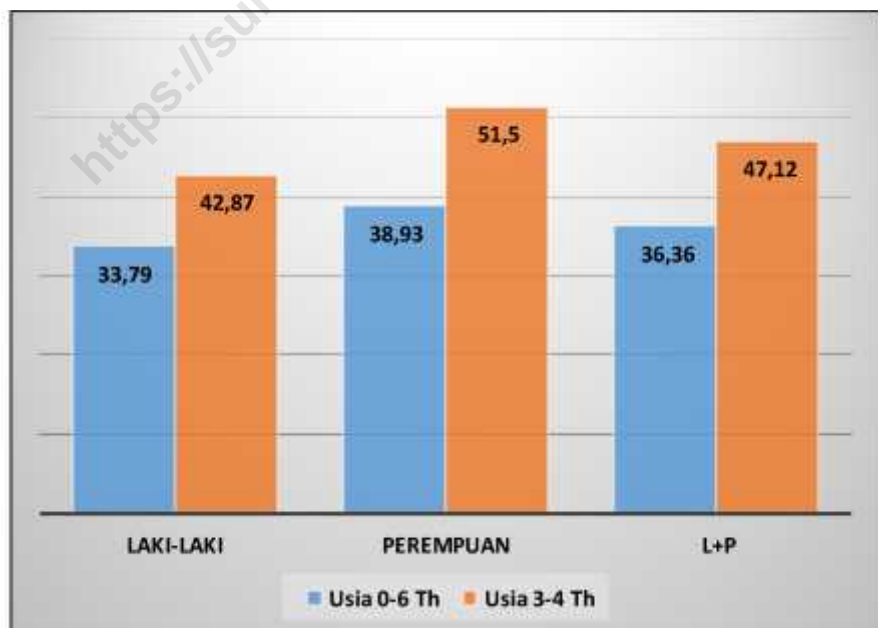


Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018

Pada kelompok usia dini (usia 0-6 tahun) APS laki-laki juga lebih rendah dari pada perempuan. Pada kelompok usia 0-6 tahun, APS laki-laki sebesar 33,79 persen sedangkan APS perempuan sebesar 38,93 persen. Hal sama juga terjadi pada kelompok usia 3-4 tahun, APS laki-laki sebesar 42,87 persen dan APS perempuan sebesar 51,50 persen. Tingginya APS laki-laki dari pada perempuan hampir di semua jenjang kelompok umur, kecuali usia dini, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya fasilitas pendidikan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor budaya dan lainnya.

APS kelompok umur 16-18 tahun, baik pada tahun 2017 maupun 2018 lebih rendah dari pada APS kelompok umur 13-15 tahun. APS kelompok umur 13-15 tahun pada tahun 2018 sebesar 97,91 persen, angka ini turun 0,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 98,11 persen. Begitu pula APS kelompok umur 16-18 tahun, APS kelompok umur ini mengalami penurunan 8,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya. APS kelompok umur 16-18 tahun dari 74,59 persen pada tahun 2017 menjadi 65,67 persen pada tahun 2018.

**Gambar 3.8 Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surabaya Tahun 2018**

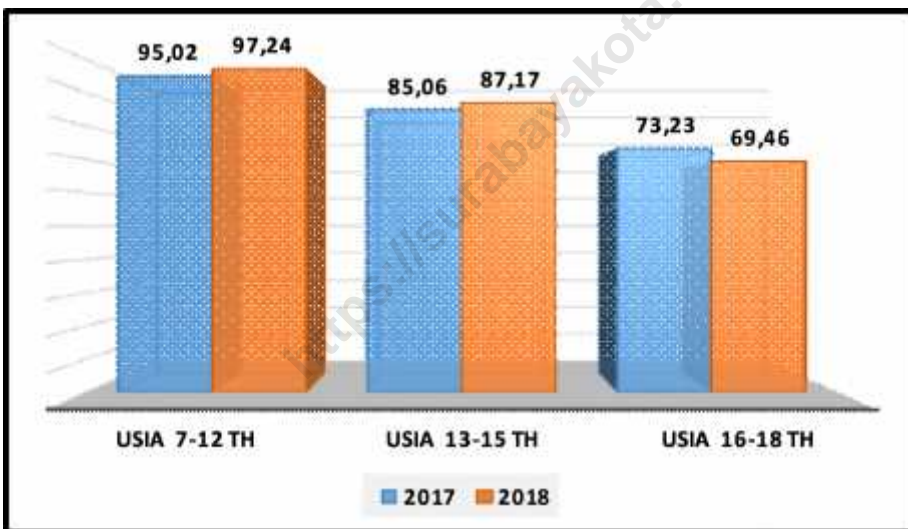


Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa APS dapat digunakan untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu dalam pendidikan formal. Namun, APS tidak dapat mengukur ketepatan jenjang pendidikan yang sedang dijalani kelompok usia tertentu tersebut. Untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang mengenyam pendidikan formal sesuai dengan kelompok usianya tersebut digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Secara ringkas, APM dijabarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$APM = \frac{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu yang sedang sekolah pada jenjang yang sesuai}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sesuai}} \times 100$$

**Gambar 3.9 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kelompok Usia Sekolah di Kota Surabaya, 2017-2018**



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018

Mengikuti pendidikan dengan jenjang dan usia yang sesuai merupakan salah satu langkah persiapan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dalam kondisi normal, ketika anak dengan usia yang cukup siap bersekolah di jenjang yang sesuai, maka si anak akan lebih mudah menerima transfer ilmu karena lebih matang dalam memahami konsep dasar ilmu pengetahuan. Sehingga hasil yang dicapai akan lebih memuaskan.

APM digunakan sebagai indikator untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Secara umum APM menurut kelompok usia di Kota Surabaya ditunjukkan pada gambar 3.9. Penduduk usia 7-12 tahun yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Dasar di Kota Surabaya tahun 2018 sebesar 97,24 persen atau naik sebesar 2,22 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Sementara itu, penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2018 sebanyak 87,17 persen yakni naik sebesar 2,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. APM kelompok usia 16-18 tahun di Kota Surabaya tahun 2018 sebesar 69,46 persen, terendah dibandingkan APM kelompok usia 7-12 tahun dan kelompok usia 13-15 tahun. APM kelompok usia 16-18 tahun sebesar 69,46 persen dapat diartikan penduduk Kota Surabaya tahun 2018 usia 16-18 tahun yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 69,46 persen.

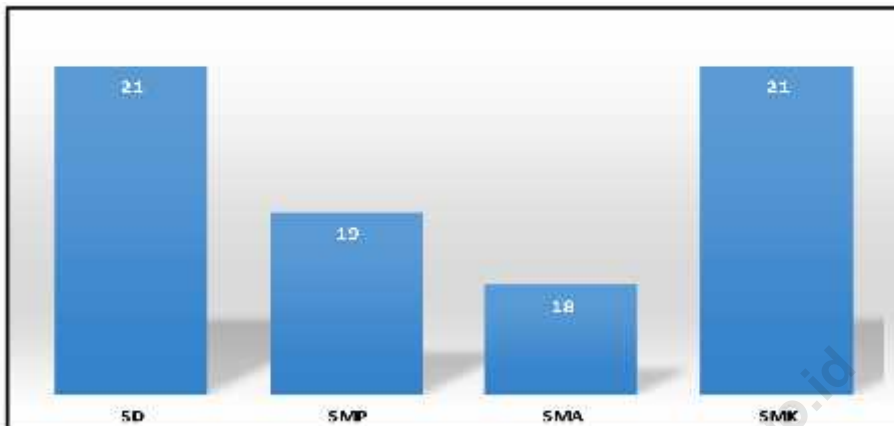
### **3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan**

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengukuran kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid/guru, rasio guru/sekolah dan rasio murid/kelas. Rasio tersebut untuk melihat seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/kelas/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan di atas.

Rasio murid/guru diartikan sebagai banyaknya murid yang dibimbing oleh satu guru. Semakin kecil rasio murid/guru maka semakin sedikit murid yang dibimbing oleh guru, dengan demikian diharapkan transfer ilmu dari guru pada anak didiknya semakin baik dan kualitas pelayanan pendidikan semakin bagus.

**Gambar 3.10 Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Surabaya, Tahun 2018**



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya

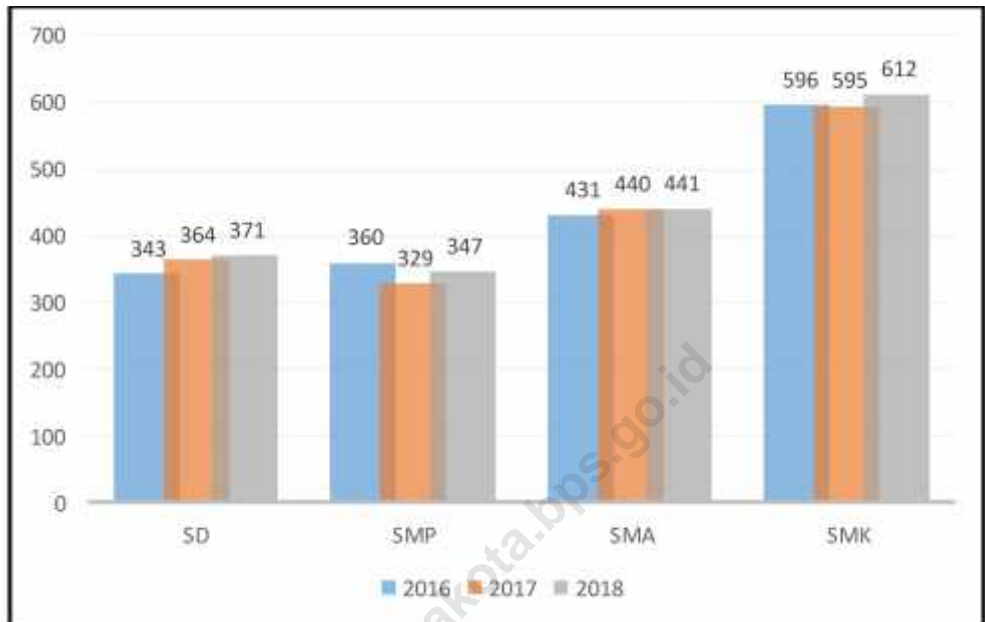
Rasio murid/guru di Kota Surabaya pada tahun 2018 relatif hampir sama pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid/guru pada jenjang SMA paling sedikit diantara yang lain, yaitu seorang guru SMA membimbing sekitar 18 murid. Sedangkan pada jenjang SMK, rasio murid/guru sebesar 21. Pada jenjang SD, setiap satu guru membimbing 21 orang siswa dan satu guru SMP membimbing 19 siswa.

Selain rasio murid/guru, indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan adalah rasio murid/sekolah. Rasio murid/sekolah menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung peserta didik. Rasio murid-sekolah menurut jenjang pendidikan di Kota Surabaya semakin menurun. Hal ini disebabkan semakin banyaknya penambahan unit sekolah terutama sekolah swasta di Kota Surabaya selama periode 3 tahun terakhir.

Pada Grafik 3.11 tampak bahwa rasio murid/sekolah pada tahun 2018 paling sedikit pada jenjang SMP dan paling banyak pada jenjang SMK. Pada jenjang SD dan SMP, rata-rata setiap tahunnya satu sekolah menampung sekitar 300 siswa. Pada jenjang SMA rata-rata setiap tahunnya menampung hampir 400 siswa. Sedangkan pada jenjang SMK rata-rata menampung siswa di atas 550 siswa setiap tahunnya.



**Gambar 3.11 Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Surabaya, Tahun 2016-2018**



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tidak hanya didorong oleh penambahan jumlah guru dan unit sekolah (faktor input) saja, namun yang perlu menjadi perhatian adalah keseluruhan sistem pendidikan. Sebuah sistem mengandung rangkaian kegiatan mulai dari input, proses, output serta faktor internal dan eksternal, dimana masing-masing komponen/kegiatan tersebut mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan utama sistem tersebut.

<https://surabayakota.bps.go.id>



## 4. KETENAGAKERJAAN

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat menjadi sasaran pembangunan ideal suatu daerah.

Faktor penyebab bertambahnya tingkat pengangguran di Jawa Timur disebabkan oleh adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja.

Disinilah letak isu pentingnya faktor ketenagakerjaan yang berperan dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian unggulan Jawa Timur. Ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan strategi dan langkah tepat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Karena itu pentingnya data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambil kebijakan yang tepat sasaran.

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai beberapa indikator tenaga kerja yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) kondisi Februari dan Agustus tahun 2015 dan 2017. Indikator ketenagakerjaan untuk tahun 2016 tidak dapat ditampilkan, karena pada tahun 2016 angka indikator ketenagakerjaan hanya sampai level provinsi. Indikator yang ditampilkan dalam publikasi ini antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja,

#### 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah serta besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 1,52 juta orang, naik sebanyak 24.204 orang dibanding tahun 2017. Jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini menunjukkan trend positif, hal ini sejalan dengan TPAK Kota Surabaya yang menunjukkan tren positif.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angkatan kerja Kota Surabaya sedikit mengalami penurunan pada tahun 2014, turun sekitar 17.841 orang dibanding tahun sebelumnya.

**Gambar 4.1 Jumlah Angkatan Kerja, 2013-2018 (Jutaan)**



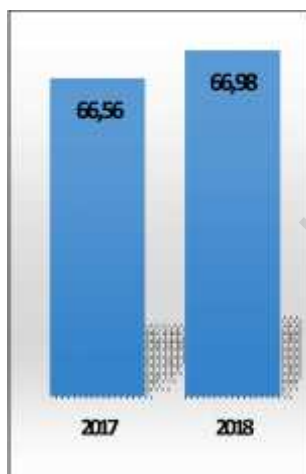
Sumber : BPS Kota Surabaya

**Tabel 4.1 Penduduk Kota Surabaya Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2013-2018**

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2013	2014	2015	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja (AK)	orang	1.483.343	1.465.502	1.468.094	1.495.837	1.520.041
Bekerja	orang	1.404.445	1.380.157	1.365.180	1.406.358	1.426.945
Pengangguran	orang	78.898	85.345	102.914	89.479	93.096
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,32	5,82	7,01	5,98	6,12

Sumber : BPS Kota Surabaya

**Gambar 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),**



Sumber : BPS Kota Surabaya

TPAK Kota Surabaya 2018 sebesar 66,98, naik 0,42 persen dibandingkan TPAC tahun 2017. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 66,98 persen penduduk Kota Surabaya yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 33,02 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

Pada bulan Agustus 2018 tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya bertambah sebesar 3 ribu orang dibanding Agustus 2017, dari 5,98 persen menjadi 6,12 persen. Tetapi jika dibanding Agustus 2013 sebesar 5,32 persen, jumlahnya lebih besar sebanyak sekitar 14 ribu orang.

Banyak hal yang bisa diindikasikan sebagai pemicu antara lain penyebab bertambahnya tingkat pengangguran di Kota Surabaya dapat disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kota Surabaya yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja di Kota Surabaya.

Peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan juga mempengaruhi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikan dan menunda peran aktifnya di pasar kerja. Apalagi fenomena tersebut dibarengi dengan semakin didorongnya program wajib belajar dan biaya pendidikan gratis yang ikut menjadi faktor penunda bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk terjun ke pasar kerja.

Di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2017 terdapat enam kabupaten yang memiliki TPAK dibawah TPAK Kota Surabaya, yaitu Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Madiun. Diantara keenam kabupaten/kota tersebut, TPAK terendah adalah Kota Madiun, yaitu 64,41. Sebanyak 24 kabupaten/kota memiliki TPAK lebih tinggi dari pada TPAK Kota Surabaya. Diantara kedua puluh empat kabupaten/kota tersebut yang memiliki TPAK paling tinggi adalah Kabupaten Pacitan dengan TPAK sebesar 79,41.

#### 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka Kota Surabaya tahun 2018 sebesar 6,12. Nilai ini naik 0,14 persen bila dibandingkan TPT 2017 (5,98). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penurunan TPT cukup signifikan pada tahun 2012, yaitu dari 7,81 pada tahun 2011 menjadi 5,27. Setelah itu TPT menunjukkan trend naik tiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2013, TPT Kota Surabaya tahun 2018 naik sebesar 0,8 persen.

Pada tahun 2017 bila dilihat berdasarkan gender, penduduk laki-laki yang menganggur lebih banyak dari pada penduduk perempuan. TPT penduduk laki-laki terlihat lebih tinggi bila dibandingkan perempuan yaitu sebesar 6,61 persen, sementara TPT perempuan tercatat 5,43 persen. Dalam kurun waktu lima tahun, gap terbesar pengangguran laki-laki dan perempuan terjadi di tahun 2017, dengan gap sebesar 2,06 persen.

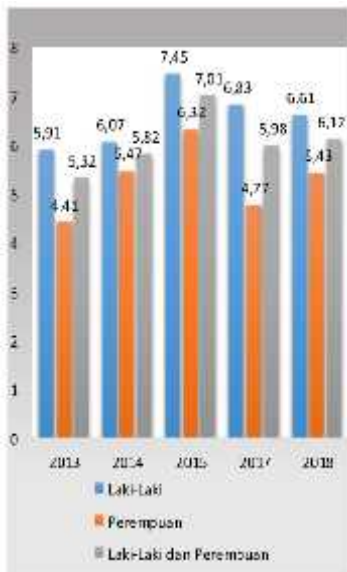
TPT laki-laki lebih tinggi dari pada TPT perempuan menunjukkan bahwa jumlah pengangguran dan angkatan kerja laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Tingginya pengangguran pada laki-laki ini

**Gambar 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2013-2018**



Sumber : BPS Kota Surabaya

**Gambar 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) , Tahun 2013-2018**



Sumber : BPS Kota Surabaya

menunjukkan bahwa cukup banyak angkatan kerja laki-laki yang tidak terserap lapangan kerja.

Dilihat perbandingannya TPT Kota Surabaya dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur, hanya Kota Malang yang nilai TPT nya diatas Kota Surabaya, dengan nilai TPT sebesar 6,79. Sebanyak 36 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur nilai TPT-nya dibawah TPT Kota Surabaya. TPT terendah di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Pacitan sebesar 1,43.

Penurunan TPT berarti jumlah penduduk yang menganggur relatif berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan TPT terbesar terdapat di Kabupaten Ngawi sebesar 1,93 persen, dari 5,76 persen di tahun 2017 menjadi sebesar 3,83 persen di tahun 2018. Penurunan TPT terbesar selanjutnya yaitu Kabupaten Malang dan Kota Mojokerto masing-masing sebesar 1,36 persen dan 1,16 persen.

Kabupaten/kota yang memiliki angka TPT dibawah Kota Surabaya sebanyak 36 kabupaten/kota. Sebanyak 6 kabupaten/kota saja yang mempunyai angka TPAK dibawah Kota Surabaya. Sebanyak lima kabupaten/kota yang TPT nya di atas Kota Surabaya, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Madiun.

**Gambar 4.5 Tingkat Pengangguran (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018**



Sumber : BPS Kota Surabaya

### 4.3. Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan

Mendapatkan pekerjaan yang layak tentunya diharapkan oleh setiap orang. Salah satu usaha untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dengan pendidikan tinggi yang ditamatkan. Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha, sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas ketrampilan yang dimiliki. Namun seiring dengan kondisi tersebut muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap pada lapangan usaha tersebut, salah satunya disebabkan karena sebagian besar lulusan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

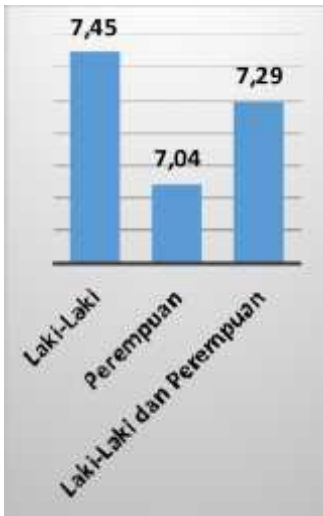
Kenaikan TPT Kota Surabaya pada penduduk yang tidak /belum tamat SD yang naik sebesar 2,05 persen dari 2,36 persen pada tahun 2017 menjadi 7,41 persen pada 2018. Hal ini dapat diartikan bahwa lapangan usaha untuk mereka yang tidak bersekolah semakin sedikit. TPT penduduk tamat SLTA mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 0,23 persen, dari 7,28 pada tahun 2017 menjadi 7,51 persen pada tahun 2018.

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, TPT penduduk dengan pendidikan tamat SLTP dan tamat perguruan tinggi mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 1,68 persen dan 0,27 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Dengan kata lain, besarnya TPT penduduk dengan pendidikan tamat SLTP dan tamat perguruan tinggi masing-masing sebesar 2,61 persen dan 6,83 persen. Secara keseluruhan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, TPT untuk jenjang pendidikan minimal SMA mengalami peningkatan 0,07 persen di tahun 2018 dibanding tahun 2017.

TPT cukup tinggi terjadi pada penduduk yang berpendidikan SMA. Kejuruan baik di perkotaan maupun perdesaan, yaitu sebesar 7,43 persen. Perlu dikaji lebih lanjut agar diperoleh solusi permasalahan tingginya TPT di Kota Surabaya yang didorong oleh tingginya angka TPT



**Gambar 4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Pendidikan Minimal SMA, 2018**



Sumber : BPS Kota Surabaya

TPT Penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan SMU Kejuruan paling tinggi dibanding dengan TPT lulusan pendidikan lainnya baik di Perkotaan maupun Perdesaan

penduduk dengan jenjang pendidikan tamatan SMU Kejuruan. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas lulusan SMA kejuruan sehingga mempunyai daya saing kerja.

TPT penduduk dengan pendidikan Diploma/Akademi yang mengalami penurunan signifikan sebesar 5,14 persen dari 10,54 persen menjadi 5,40 persen. Ini menunjukkan bahwa cukup banyak pengu-rangan lulusan diploma/akademi yang terserap di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

TPT untuk penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan Uni-versitas lebih tinggi dari pada TPT penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan diploma. TPT lulusan pendidikan universitas mengalami sedikit peningkatan di tahun 2018. Tahun 2018 TPT lulusan universitas mengalami kenaikan sebesar 0,68 persen dari 6,46 persen di tahun 2017 menjadi 7,14 persen di tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa ter-jadi peningkatan jumlah lulusan universitas yang belum terserap di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

Lulusan pendidikan universitas laki-laki (5,90 persen) sedikit lebih banyak yang terserap di lapangan pekerjaan dari pada lulusan universitas perempuan (8,95 persen). Hal yang berbeda juga terjadi pada penduduk tamatan SMA, lulusan SMA laki-laki yang belum terserap tenaga kerja lebih banyak 6,21 persen dari pada lulusan SMA perempuan. Nilai TPT lulusan SMA laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 9,95 persen dan 3,74 persen. Namun tidak demikian hal nya dengan lulusan SMA Kejuruan yang terserap lapangan kerja. Lulusan SMA Kejuruan laki-laki yang terserap lapangan kerja lebih ban-yak dari pada lulusan SMA perempuan. Nilai TPT lulusan SMA Kejuru-an laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 6,67 persen dan 8,87 persen.

TPT penduduk Kota Surabaya yang pendidikannya minimal SMA pada tahun 2018 sebesar 7,29 persen. Sebesar 7,45 persen dari angkatan kerja laki-laki Kota Surabaya belum/tidak terserap lapangan kerja. Sedangkan perempuan sebesar 7,04 persen dari angkatan kerja

perempuan yang belum terserap angkatan kerja. Diharapkan pemerintah daerah lebih berperan dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Selain peran pemerintah daerah, peran dunia pendidikan serta swasta diharapkan juga dapat memberikan stimulus agar mendorong penduduk lebih mudah berwirausaha.

**Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2018**

Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Tamat SD	14,84	1,10	7,41
SD	2,67	4,79	3,62
SLTP	2,94	2,16	2,61
SLTA	8,43	5,89	7,51
Perguruan Tinggi	5,06	9,15	6,83
Total	6,61	5,43	6,12
SMA +	7,45	7,04	7,29

Sumber : Sakernas BPS Kota Surabaya

**Gambar 4.7 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha,**



Sumber : BPS Kota Surabaya

#### 4.4. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (Pertanian, kehutanan dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta konstruksi) dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Berdasarkan hasil Sakernas 2018, secara umum persentase penduduk yang bekerja pada sektor industri mengalami penurunan dibanding tahun 2017 dari 22,70 persen menjadi 21,50 persen. Penurunan juga terjadi di sektor pertanian sebesar 0,45 persen di tahun 2017 menjadi 0,33 persen di tahun 2018. Disisi lain, sektor jasa mengalami peningkatan. Penduduk yang bekerja di sektor ini naik sebesar 1,32 persen dibandingkan dengan tahun 2017, naik dari 76,85 persen di tahun 2017 menjadi 78,17 persen di tahun 2018. Secara keseluruhan, sektor jasa tetap menjadi lapangan usaha terbesar yang menyerap penduduk bekerja di tahun 2018 sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sektor jasa merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini menunjukkan tidak/belum terjadinya pergeseran komposisi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan di Kota Surabaya. Secara umum jumlah penduduk laki-laki yang bekerja jauh lebih banyak dari pada perempuan di semua sektor, kecuali sektor pertanian. Terutama di sektor industri, jumlah penduduk laki-laki yang bekerja di sektor

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2018**

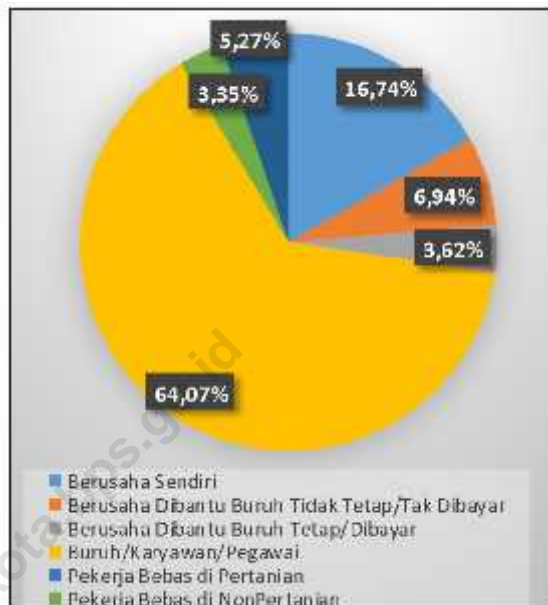
Kelompok Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Pertanian</b>	2.635	2.026	4.661
<b>Industri</b>	216.385	90.469	306.854
<b>Jasa</b>	617.844	497.586	1.115.430
	<b>836.864</b>	<b>590.081</b>	<b>1.426.945</b>

Sumber : Sakernas, BPS Kota Surabaya

ini sekitar 2,4 kali lipat jumlah penduduk perempuan yang bekerja di sektor ini.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan adalah sebesar 64,07 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,24 persen, dari 65,31 persen di tahun 2017 menjadi 64,07 persen di tahun 2018. Demikian halnya pada status usaha berusaha sendiri di tahun 2018. Jumlah pekerja berusaha sendiri mengalami penurunan sebesar 1,48 persen dari 18,22 persen di tahun 2017 menjadi 16,74 persen di tahun 2018. Namun status berusaha dibantu buruh tetap mengalami peningkatan dari 2,40 persen menjadi 3,62 persen. Demikian halnya status berusaha dibantu buruh tidak tetap, naik sebesar 1,16 persen, dari 5,78 persen tahun 2017 menjadi 6,94 tahun 2018.

**Gambar 4.8 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Usaha, 2018**



Sumber : BPS Kota Surabaya

#### 4.5. Kelompok Umur

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, dan sebagainya.

**Gambar 4.9 Persentase Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur, 2018**



Sumber : BPS Kota Surabaya, Sakernas

lompok umur Kota Surabaya tahun 2018. Dari grafik tersebut tampak bahwa angkatan kerja Kota Surabaya didominasi kelompok umur 25-29 tahun sebesar 15,28 persen. Selanjutnya kelompok umur 30-34 tahun dan 35-39 tahun masing-masing sebesar 13,17 persen dan 13,00 persen. Paling sedikit pada kelompok umur 15-19 tahun, yaitu sebesar 2,17 persen. Hal ini karena pada usia tersebut mayoritas angkatan kerja masih sekolah. Sedangkan jumlah angkatan kerja kelompok umur 60+ sebesar 6,78 persen. Nilai ini lebih banyak 4,61 persen dari pada jumlah angkatan kerja pada kelompok umur 15-19 tahun.

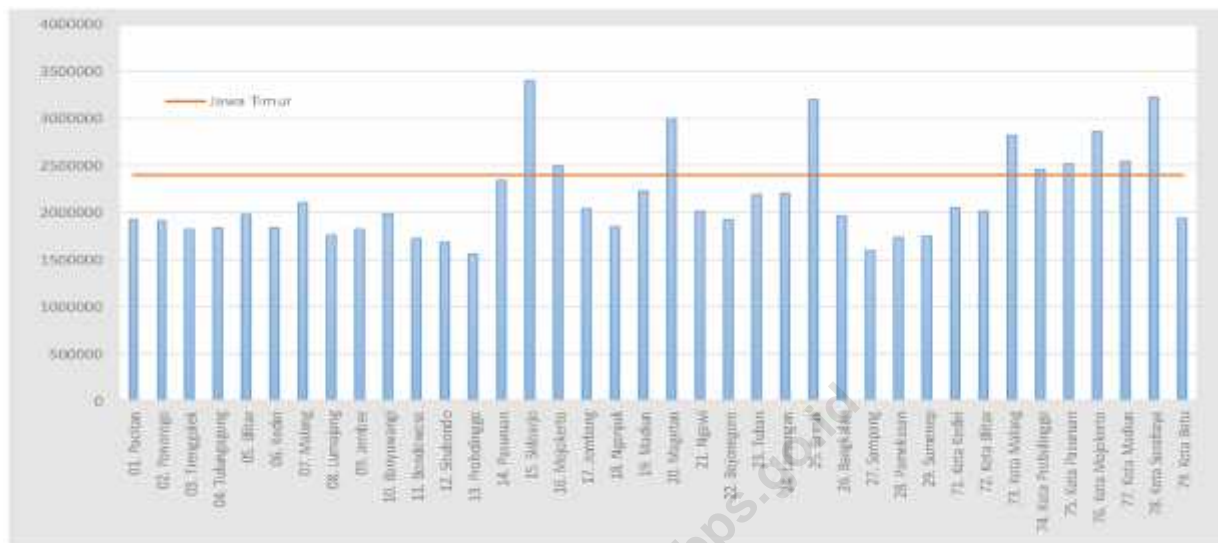
Pada angkatan kerja menurut kelompok umur, secara umum jumlah laki-laki lebih banyak dari pada jumlah perempuan. Namun pada kelompok umur 15-19 tahun jumlah perempuan lebih banyak 1,23 persen dari pada laki-laki, yaitu 2,89 persen dan jumlah laki-laki sebesar 1,66 persen. Demikian halnya pada kelompok umur 45-49 tahun, jumlah perempuan lebih banyak 1,47 persen, yaitu 12,26 persen dan jumlah laki-laki 10,79 persen. Selisih terkecil antara jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan pada kelompok umur 25-29 tahun, yaitu sebesar 0,35 persen.

#### **4.6. Upah/ Gaji/ Pendapatan Bersih**

Balas jasa yang diberikan pada pekerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan selama proses memproduksi barang atau jasa pada suatu perusahaan disebut dengan upah/gaji. Melalui ukuran upah/gaji yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya bisa dijadikan tolok ukur kehidupan dikatakan layak atau tidak.

Dilihat dari rata-rata upah/gaji bersih sebulan menurut kabupaten/kota secara umum, sebanyak 10 kabupaten/kota memiliki upah diatas upah Provinsi Jawa Timur. Diantara 10 kabupaten/kota tersebut yang paling tinggi adalah upah Kabupaten Sidoarjo, kemudian Kota Surabaya, Kabupaten Gresik. Sedangkan upah terkecil di Kabupaten Probolinggo.

**Gambar 4.10 Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Buruh/Karyawan Selama Sebulan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

**Gambar 4.11 Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Buruh/Karyawan Selama Sebulan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2015, 2017, dan 2018**



Sumber : BPS Kota Surabaya

Bila dilihat dari rata-rata upah/gaji bersih selama sebulan berdasarkan jenis kelamin terjadi kenaikan dalam kurun waktu 2015, 2017, dan 2018. Untuk pekerja perempuan rata-rata upah meningkat sebesar 4,05 persen dari Rp. 2,61 juta per bulan menjadi sebesar Rp. 2,71 juta di tahun 2018. Begitu pula untuk pekerja laki-laki juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2017 rata-rata upah/gaji bersih yang diterima selama sebulan sebesar Rp. 3,13 juta di tahun 2017 menjadi Rp. 3,55 juta atau meningkat sebesar 13,38 persen. Sedangkan secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 10,07 persen, dari Rp. 2,93 juta pada tahun 2017 menjadi Rp. 3,22 juta di tahun 2018.



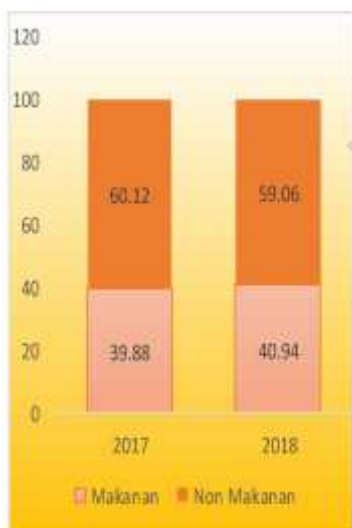
## 5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi masyarakat menunjukkan suatu hasrat masyarakat untuk mengkonsumsi barang maupun jasa. Hasrat untuk mengkonsumsi dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan mereka yang dialokasikan untuk konsumsi. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya, semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pola konsumsi menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.

### 5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan kedalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Struktur konsumsi masyarakat Kota Surabaya mulai mengalami perkembangan, sebagian besar pengeluaran konsumsinya tidak lagi untuk konsumsi makanan tetapi untuk konsumsi bukan makanan. Pergeseran pola konsumsi ini dipengaruhi oleh perubahan pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.

**Gambar 5.1**  
**Persentase Pengeluaran**  
**Perkapita Sebulan**  
**Menurut Jenis Pengeluaran,**



Sumber : BPS Kota Surabaya

**Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, Tahun 2017-2018**

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Makanan</b>	<b>758,750</b>	<b>776,985</b>	<b>39,88</b>	<b>40,94</b>
<b>Bukan Makanan</b>	<b>1.143.770</b>	<b>1.120.876</b>	<b>60,12</b>	<b>59,06</b>
- Perumahan	594,373	585,624	31,24	30,86
- Barang dan Jasa	322,181	326,454	16,93	17,20
- Pakaian	48,445	43,490	2,55	2,29
- Barang Tahan Lama	85,192	68,558	4,48	3,61
- Lainnya	93,578	96,752	4,92	5,10
<b>Jumlah</b>	<b>1.902.520</b>	<b>1.897.861</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kota Surabaya, Data Susenas 2017—2018 diolah

Gambaran konsumsi masyarakat dapat dilihat pada tabel 5.1, selama 2017-2018 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk sedikit menurun dari Rp 1.902.520- menjadi Rp 1.897.861-. Dimana pada tahun 2017 sekitar Rp. 758.750,- atau 39,88 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan, sedangkan Rp. 1.143.770,- atau 60,12 persen dikeluarkan untuk konsumsi bukan makanan. Pada Tahun 2018 sekitar Rp. 776.985,- atau 40,94 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan dan Rp. 1.120.876,- atau 59,06 persen untuk konsumsi bukan makanan. Dilihat dari persentase tersebut pengeluaran untuk bukan makanan sedikit mengalami penurunan dan sebaliknya pengeluaran makanan sedikit meningkat. Secara keseluruhan pengeluaran non makanan tetap memegang porsi terbesar. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi penghasilan rumah tangga maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan. Peningkatan pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada barang dan jasa, dan lainnya. Dibandingkan tahun 2017, masing-masing mengalami peningkatan sebesar 0,96 persen, dan 0,45 persen.



Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka biasanya pengeluaran makanan semakin sedikit dan pengeluaran non makanan semakin besar. Persentase pengeluaran makanan yang lebih rendah dan persentase pengeluaran non makanan yang lebih tinggi dari pada Kota Surabaya adalah Kota Malang. Persentase pengeluaran makanan dan non makanan Kota Malang, masing-masing sebesar 36,87 persen dan 63,13 persen.

Kuintil pengeluaran dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau tingkat pemerataan pendapatan/pengeluaran penduduk, yaitu dengan mengurutkan rata-rata pengeluaran per kapita dari yang terkecil hingga yang terbesar. Rumah tangga dikelompokkan menjadi 5 kelompok (kuintil), semakin tinggi kuintil pengeluaran maka semakin sejahtera, contohnya kuintil 1 (Q1) adalah 20 % rumah tangga yang mempunyai pengeluaran perkapita terendah (kelompok miskin), sebaliknya kuintil 5 (Q5) adalah 20% rumah tangga dengan pengeluaran perkapita tertinggi (kelompok kaya).

**Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kuintil Pengeluaran (Rupiah), 2018**

<b>Kuintil</b>	<b>Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan</b>
1	722.473
2	1.062.977
3	1.491.356
4	2.066.843
5	4.144.676
Rata-Rata Keseluruhan	1.897.861

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Data Susenas 2018 diolah

Rata-rata pengeluaran perkapita kuintil 1 (Q1) Kota Surabaya sebesar Rp. 722.473 , kuintil 2 (Q2) sebesar Rp. 1.062.977 , kuintil 3 (Q3) sebesar Rp. 1.491.356 , kuintil 4 (Q4) sebesar Rp. 2.066.843 , dan kuintil 5 (Q5) sebesar Rp. 4.144.676. Sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita secara keseluruhan dalam lima kelompok (kuintil) tersebut adalah Rp. 1.897.861. Margin antar kuintil dari kuintil 1 hingga kuintil 4 berkisar 40,00 persen, namun margin kuintil 4 dengan kuintil 5 sekitar 100,00 persen. Margin pengeluaran perkapita kelompok penduduk miskin dan kaya (kuintil 1 dan kuintil 5) sekitar Rp. 3.422.203.

Pada tahun 2018 rata-rata pengeluaran kelompok padi-padian penduduk Kota Surabaya adalah yang terbesar dibandingkan kelompok lainnya, yaitu Rp 58.751,00. Selanjutnya kelompok telur dan susu sebesar Rp 53.190,00. Lalu kelompok daging sebesar Rp 44.093,00. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Surabaya paling kecil pada kelompok umbi-umbian sebesar Rp 4.929,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang mengalami peningkatan terbesar adalah kelompok ikan dengan peningkatan sebesar Rp. 5.814,00. Sedangkan yang mengalami penurunan terbesar adalah kelompok sayur-sayuran dengan penurunan sebesar RP. 6.250,00.

**Tabel 5.3 Rata-rata Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan di Kota Surabaya (Rupiah), Tahun 2017 -2018**

Jenis Pengeluaran Makanan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Padi-Padian	55,157	58,751
Umbi-Umbian	6,003	4,929
Ikan	49,825	55,639
Daging	49,865	44,093
Telur dan Susu	53,360	53,190
Sayur-Sayuran	49,089	42,839
Kacang-Kacangan	16,014	15,306
Buah-Buahan	33,876	36,108
Minyak dan Lemak	15,344	14,384
Bahan Minuman	18,808	16,949
Bumbu-Bumbuan	10,013	11,884

Sumber : BPS Kota Surabaya, Data Susenas 2017-2018 diolah

Masyarakat perkotaan dan perdesaan tidak hanya berbeda dalam hal besarnya pengeluaran, tetapi juga berbeda dalam hal pola konsumsi. Hal ini dikarenakan perbedaan pada besar kecilnya pendapatan yang diperoleh oleh berbagai lapisan masyarakat. Perbedaan ini bisa menimbulkan kesenjangan yang berakibat pada ketimpangan tingkat kemakmuran antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Ketimpangan tingkat kemakmuran antar lapisan masyarakat ini dapat diukur dengan pendekatan pendapatan maupun dengan pendekatan pengeluaran. Data pendapatan yang sulit diperoleh karena sulitnya mendapatkan pengakuan dari responden, menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Untuk melihat pembagian penduduk berdasarkan distribusi pengeluarannya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan pengeluaran rumah tangga menjadi 5 kuintil (lima kelompok sama besar). Kuintil menjadi acuan kelompok rumah tangga di Indonesia yang diukur berdasarkan pengeluaran perkapita. Oleh BPS, kelompok pengeluaran rumah tangga total dengan nilai 100 persen dibagi dalam lima kuintil, dengan kata lain kuintil 1 merupakan 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran terendah, terus meningkat hingga kuintil 5 yang merupakan 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran perkapita tertinggi.

**Tabel 5.4 Distribusi Pembagian Rumah Tangga dan Rata-Rata ART Per Rumah Tangga Berdasarkan Kuintil Pengeluaran Perkapita per Bulan di Kota Surabaya Tahun 2018**

<b>Kuintil</b>	<b>Persentase Rumah Tangga</b>	<b>Rata-Rata ART per Rumah Tangga</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	14,99	4,80
2	17,60	4,00
3	20,02	3,60
4	22,61	3,20
5	24,78	2,90

Sumber : BPS Kota Surabaya, Data Susenas 2018 diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data dari BPS, persentase rumah tangga berpendapatan terendah (Kuintil 1) adalah sebesar 14,99 persen. Kemudian rumah tangga di Kuintil 2, 3 dan 4 berturut-turut masing-masing sebesar 17,60 persen, 20,02 persen, dan 22,61 persen. Sedangkan jumlah rumah tangga berpendapatan tertinggi (Kuintil 5) terdapat sebanyak 24,78 rumah tangga.

Sementara rata-rata anggota rumah tangga pada kelompok pendapatan terendah (Kuintil 1) adalah 4,8 atau terdapat 4 sampai 5 orang anggota rumah tangga. Pada Kuintil 2 rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang. Rata-rata ART pada Kuintil 3 dan Kuintil 4 masing-masing sebanyak 3,6 dan 3,2 atau terdapat 3 sampai 4 orang ART. Sedangkan pada Kuintil 5 rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 2,9 atau terdapat 2 sampai 3 orang anggota rumah tangga.

## **5.2. Konsumsi Energi dan Protein**

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi energi dan protein. Jumlah konsumsi energi dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kilo kalori dan 57 gram protein per hari.

Selama periode 2017-2018 penduduk Kota Surabaya mengalami penurunan konsumsi energi/kalori per hari sebesar 49,24 kkal. Pada tahun 2017 penduduk Kota Surabaya hanya mampu mengkonsumsi energi/kalori rata-rata per hari hanya sebesar 2.069,23 kkal dan tahun 2018 menjadi 2.019,99 kkal, lebih rendah dari tahun 2017. Ini berarti

konsumsi energi per hari penduduk Kota Surabaya di tahun 2018 masih belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan yaitu sebesar 2.150 kkal. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita per hari penduduk Kota Surabaya sudah relatif bagus, yaitu dari 62,70 gram pada tahun 2017 dan naik 2,11 gram menjadi 64,81 gram pada tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan konsumsi protein Kota Surabaya sudah memenuhi kecukupan protein yang disyaratkan yaitu 57 gram.

**Tabel 5.5 Rata-rata Konsumsi Energi (kkal) dan Protein (gram) per Kapita Sehari, 2017- 2018**

<b>Tahun</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Energi (kkal)	2.069,23	2.019,99
Protein (gram)	62,70	64,81

Sumber : BPS Kota Surabaya, Data Susenas 2017-2018 diolah





## 6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah adanya rumah tinggal. Selain merupakan kebutuhan yang mendasar, rumah tinggal juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah sebagai tempat tinggal juga mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang karena selain sebagai tempat tinggal atau hunian juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi, karena dengan kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Status sosial seseorang juga dapat ditunjukkan melalui kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Selain itu, juga memenuhi fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

## 6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Salah satu kebutuhan dasar manusia setelah Pangan dan Sandang adalah Papan. Papan merupakan kata lain dari rumah ataupun tempat tinggal. Rumah secara fisik dapat melindungi penghuninya dari panasnya terik matahari maupun hujan dan juga sebagai tempat untuk beristirahat.

Secara umum rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas lantai yang mencukupi/sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Selain itu kualitas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik tentunya kondisi ekonominya juga lebih baik dibandingkan mereka yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah. Semakin baik strata ekonomi rumah tangga memiliki kecenderungan, semakin baik pula kondisi fisik rumah tinggal rumah tangga. Namun demikian, faktor pengetahuan dan lingkungan juga turut memberi pengaruh akan kondisi ini. Saat ini rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup, lambang tingkatan sosial dan investasi.

**Tabel 6.1. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2017 dan 2018**

<b>Indikator Kualitas Perumahan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Lantai bukan tanah (%)	99,80	98,87
Atap beton, genteng, sirap dan asbes (%)	99,66	99,58
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	99,61	99,40
Rata-rata luas lantai per kapita (m <sup>2</sup> )	24,73	24,52

Sumber: BPS Kota Surabaya



Kondisi fisik rumah/bangunan tempat tinggal merupakan hal yang berkorelasi dengan kualitas hidup para penghuninya. Karena kualitas fisik bangunan tempat tinggal dapat langsung mempengaruhi derajat kesehatan mereka yang berada di dalamnya.

Luas lantai rumah/bangunan tempat tinggal umumnya berkaitan dengan status ekonomi rumah tangga serta dipengaruhi juga dimana permukiman tersebut berada. Berdasarkan data Susenas 2018, persentase rumah tangga di Kota Surabaya yang berlantaikan bukan tanah menunjukkan sedikit penurunan. Pada tahun 2018, rumah yang berlantaikan bukan tanah sedikit turun menjadi sebesar 98,87 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar 99,80 persen.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kualitas rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Pada tahun 2017 sekitar 99,66 persen rumah tempat tinggal beratap beton, genteng, sirap dan asbes di Kota Surabaya. Namun pada tahun 2018 sedikit turun 0,08 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 99,58 persen.

Pada tahun 2018 kualitas perumahan di Kota Surabaya jika dilihat dari indikator dinding terluas tembok dan kayu sedikit turun menjadi sebesar 99,40 persen dibanding tahun 2017 yang sebesar 99,61 persen, atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 0,21 persen.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Sedangkan Kategori rumah sehat (menurut Kemenkes, 2005), adalah rumah yang memiliki luas lantai minimum 8 m<sup>2</sup> perkapita, mempunyai kualitas bangunan yang baik, berada dalam lingkungan yang bersih dan bebas dari polusi, serta memiliki penataan ventilasi yang cukup untuk keluar masuknya udara dan sinar matahari.

Berdasarkan hasil Susenas 2018, rata-rata luas lantai per kapita di Kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 24,53 m<sup>2</sup>. Sedangkan pada tahun 2017, rata-rata luas lantai per kapita sebesar sebesar 24,73 m<sup>2</sup> atau mengalami penurunan sebesar 0,20 m<sup>2</sup>.

**Gambar 6.1 Rata-rata Luas Lantai per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2018 jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota terdapat 33 kabupaten/kota yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita yang lebih tinggi dari Kota Surabaya. Kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita tertinggi adalah Kota Madiun (44,3 m<sup>2</sup>), Kabupaten Magetan (43,26 m<sup>2</sup>), dan Kabupaten Bojonegoro (41,55 m<sup>2</sup>). Sisanya sebanyak 4 kabupaten/kota di bawah persentase Kota Surabaya, dimana Kabupaten Bangkalan memiliki persentase rata-rata luas lantai per kapita terendah yaitu sebesar 22,87 m<sup>2</sup>.

## 6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal seperti ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari adalah air, sehingga ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan dikonsumsi dan sanitasi merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2017, semua rumah tangga di Kota Surabaya yang menggunakan air minum bersih, dengan kata lain telah mencapai 100,00 persen. Demikian halnya dengan tahun 2018. Sementara jumlah

rumah tangga yang mengkonsumsi air kemasan, air isi ulang dan ledeng pada tahun 2018, sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2017, yakni dari 99,94 persen pada tahun 2017 menjadi 99,68 pada tahun 2018 atau dengan kata lain mengalami penurunan sebesar 0,26 persen.

**Tabel 6.2. Persentase rumahtangga menurut beberapa fasilitas perumahan, 2017 dan 2018**

<b>Indikator Fasilitas Perumahan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Air kemasan, air isi ulang & ledeng	99,58	99,68
Air minum bersih	100,00	100,00
Jamban sendiri	73,32	73,34
Jamban sendiri dengan tangki septik	95,72	91,00
Sumber penerangan listrik	100,00	99,84

Sumber: BPS Kota Surabaya

Fasilitas perumahan yang cukup penting peranannya dalam usaha sanitasi adalah penyediaan sarana jamban, karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh penghuni rumah/bangunan tempat tinggal rumah tangga. Biasanya dibuat menjadi satu didalam kamar mandi. Fasilitas ini merupakan salah satu yang memiliki kontribusi pada upaya peningkatan kesehatan di masyarakat, terutama pada akses yang baik.. Jika dilihat dari segi kesehatan lingkungan dan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia dapat mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2018, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tengki septik sudah mencapai 91,00 persen atau mengalami penurunan 7,57 persen dibandingkan tahun 2017 (98,57 persen).

**Gambar 6.2 Sumber Penerangan di Kota Surabaya, 2018**



Sumber: BPS Kota Surabaya

Sumber penerangan merupakan fasilitas perumahan yang penting. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Pada tahun 2018 sebanyak 99,84 persen rumah tangga di Kota Surabaya telah menikmati fasilitas penerangan listrik, dengan rincian sebesar 99,74 persen sumber penerangan berasal dari listrik PLN, dan 0,11 persen sumber penerangan berasal dari non PLN.

### **6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal**

Tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri akan lebih tenang dibandingkan mereka yang menempati rumah sewa apalagi yang bebas sewa karena telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Rumah tangga di Kota Surabaya berdasarkan hasil Susenas 2018 yang menempati rumah milik sendiri sebesar 59,05 persen dan sisanya sebesar 40,95 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga

yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari kontrak/sewa sebesar 31,93 persen, bebas sewa sebesar 7,99 persen, rumah dinas dan lainnya masing-masing sebesar 0,1 persen dan 0,93 persen. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar 2,24 persen. Kebijakan pemerintah pusat sebenarnya mendukung masyarakat memiliki rumah sendiri, seperti salah satunya kebijakan tentang penyediaan rumah sederhana untuk masyarakat menengah ke bawah ataupun juga dari sisi pendanaan seperti pengurangan suku bunga pinjaman, pemberian kredit ringan dan sebagainya. Meskipun demikian, jumlah yang memiliki rumah sendiri mengalami penurunan, hal ini dikarenakan sangat mahal nya harga tanah dan rumah di Kota Surabaya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kepemilikan rumah dengan status bebas sewa turun 3,11 persen, yaitu menjadi 7,99 persen di tahun 2018 dari 11,1 di tahun 2017. Demikian halnya dengan rumah dinas, terjadi penurunan kepemilikan rumah dengan status rumah dinas dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 1,67 persen pada 2017 menjadi 0,1 persen pada 2018 atau mengalami penurunan sebesar 1,57 persen. Di sisi lain, rumah dengan status kepemilikan lainnya mengalami peningkatan sebesar 0,58 persen dibanding tahun sebelumnya, menjadi 0,93 persen pada tahun 2018 dari sebelumnya sebesar 0,35 persen.

**Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal Tahun 2017 dan 2018**

<b>Indikator Fasilitas Perumahan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Milik Sendiri	56,81	59,05
Kontrak/sewa	30,06	31,93
Bebas Sewa	11,10	7,99
Rumah Dinas	1,67	0,10
Lainnya	0,35	0,93

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

<https://surabayakota.bps.go.id>



## 7. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mahatma Gandhi menyebut mereka sebagai *the last, the least, the lowest, and the loss*. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap negara. Di Indonesia, tiap era kepemimpinan memiliki program khusus untuk pengentasan kemiskinan. Pada masa orde baru pernah digalakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di desa-desa yang relatif belum maju. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, masa kepemimpinan Jokowi-JK juga menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pemerintah sebagaimana tertuang dalam sembilan agenda prioritas, nawa cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Jawa Timur

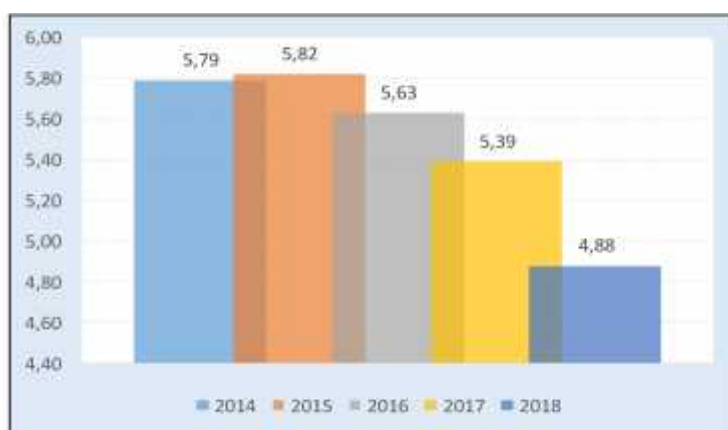
**Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Surabaya Tahun 2014-2018**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
(1)	(2)	(3)
2014	164,40	5,79
2015	165,72	5,82
2016	161,01	5,63
2017	154,71	5,39
2018	140,81	4,88

Sumber: BPS Kota Surabaya

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif (TNP2K, 2014). Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam misinya, Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik, telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur. Pemerintah terus meningkatkan dan menyempurnakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, terutama program Jalinkesra. Serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin melalui kemudahan akses modal.

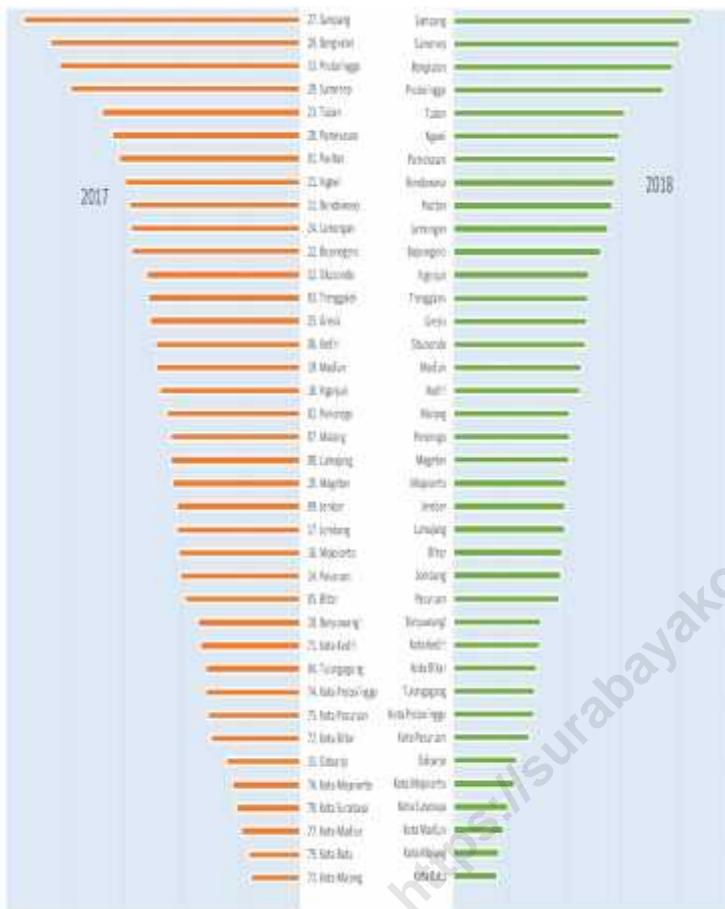
**Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2014-2018 (Persen)**



Sumber: BPS Kota Surabaya



**Gambar 7.2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2018**



Sumber: BPS Kota Surabaya

Selama tahun 2014-2018, persentase penduduk miskin di Kota Surabaya cenderung menurun seiring banyaknya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Pada 2014 penduduk miskin Kota Surabaya sebesar 5,79 persen, lalu naik menjadi 5,82 persen pada 2015, kemudian sedikit turun menjadi 5,63 pada 2016. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,24 persen menjadi 5,39 persen. Kemudian pada tahun 2018 turun lagi sebesar 0,51 persen menjadi 4,88 persen.

Selama periode 2017 dan 2018 peringkat kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan persentase penduduk miskinnya tidak mengalami perubahan yang berarti, terdapat beberapa kabupaten yang peringkatnya bergeser, namun tidak ada yang bergesernya cukup signifikan. Beberapa kabupaten/kota

saling bertukar tempat, misalnya Kabupaten Malang dan Kabupaten Ponorogo, Kota Batu dan Kota Malang. Kabupaten Mojokerto pada tahun 2017 di peringkat 15 menjadi peringkat 5 pada tahun 2018 dengan persentase jumlah penduduk miskin dari 10,34 persen menjadi 5,5 persen pada 2018. Kabupaten Pasuruan berada pada peringkat 7 di tahun 2018, dari peringkat 14 pada tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pasuruan tahun 2017 sebesar 10,19 persen turun menjadi 6,77 persen pada 2018. Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 berada pada peringkat 27 (12,11 persen), sedangkan pada tahun sebelumnya berada pada peringkat 22 (11,98 persen).

Kabupaten di wilayah Madura memiliki persentase penduduk miskin lebih besar dibanding daerah lain. Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang mencapai 21,21 persen, ini merupakan yang terbesar di Jawa Timur, diikuti Kabupaten Sumenep 20,16 persen; Kabupaten Bangkalan 19,59 persen; Kabupaten Probolinggo 18,71 persen; Kabupaten Tuban 15,31 persen; Kabupaten Ngawi 14,83 persen dan Kabupaten Pamekasan 14,47 persen.

## **7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan**

Garis Kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan terpisah antara daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Surabaya mengalami peningkatan antar waktu selama 2014-2018.

Garis kemiskinan Kota Surabaya pada 2014 sebesar Rp. 393.151. Besarnya garis kemiskinan Kota Surabaya pada tahun berikutnya naik 6,56 persen atau sekitar Rp. 25.779, menjadi Rp. 418.930 pada tahun 2015. Kemudian dari tahun 2015 ke 2016, garis kemiskinan Kota Surabaya mengalami peningkatan sekitar 4,62 persen, yaitu sebesar Rp. 19.353, menjadi Rp. 438.283.

Garis kemiskinan Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar Rp. 474.365, lebih besar Rp. 36.082 dari garis kemiskinan tahun sebelumnya atau sekitar 8,23 persen. Pada tahun 2018, garis kemiskinan Kota Surabaya Rp. 530.178, mengalami peningkatan 11,77 persen, lebih besar Rp. 55.813 dari garis kemiskinan tahun 2017.

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai  $P_1$ , dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin ( $P_2$ ).

**Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ), dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Kota Surabaya Tahun 2014-2018**

Tahun	Garis Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ )	Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ )
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	393.151	0,78	0,16
2015	418.930	0,78	0,15
2016	438.283	0,92	0,25
2017	474.365	1,10	0,33
2018	530.178	0,81	0,20

Sumber: BPS Kota Surabaya

Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) Kota Surabaya mencapai 0,78 pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) Kota Surabaya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu tetap pada angka 0,78. Pada tahun 2016, Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) Kota Surabaya naik 0,14 poin menjadi sebesar 0,92. Pada tahun 2017 Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) Kota Surabaya kembali mengalami kenaikan sebesar 0,18 poin dari tahun sebelumnya, menjadi 1,10. Pada tahun 2018, Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) Kota Surabaya mengalami penurunan 0,29 poin dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 0,81. Secara umum  $P_1$  mengalami kenaikan. Kenaikan  $P_1$  ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Dengan kata lain penduduk Kota Surabaya mengalami kemiskinan yang semakin dalam.

Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) Kota Surabaya memiliki pola yang serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) antar waktu. Pada tahun 2014 nilai Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) Kota Surabaya sebesar 0,16. Pada tahun 2015 nilai Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) Kota Surabaya menjadi 0,15 atau turun 0,01 poin dari tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 naik kembali sebesar 0,10 poin, nilai Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) Kota Surabaya 0,25. Pada tahun 2017 Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) Kota Surabaya kembali naik 0,08 poin dari tahun sebelumnya, menjadi 0,33. Pada tahun 2018, Indeks keparahan

kemiskinan ( $P_2$ ) Kota Surabaya turun 0,13 poin dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 0,20. Nilai  $P_2$  yang cenderung meningkat ini menandakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin lebar.

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi pendidikan dan ketenagakerjaan dari anggota rumah tangga, serta kondisi perumahan rumah tangga. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

### **7.3 Karakteristik Pendidikan Anggota Rumah Tangga**

Pembahasan mengenai kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Kemiskinan lekat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga jika kesempatan menikmati pendidikan dimiliki oleh anggota rumah tangga miskin, maka kemungkinan untuk keluar dari kemiskinan di masa yang akan datang akan semakin besar.

Karakteristik pendidikan penduduk miskin di Kota Surabaya semakin membaik setiap tahun seiring gencarnya program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, khususnya penduduk miskin. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana. Peningkatan AMH penduduk miskin di Kota Surabaya selama tiga tahun terakhir tampak baik pada kelompok umur 15-24 tahun maupun kelompok umur 15-55 tahun. Pada tahun 2016, seluruh penduduk pada kelompok umur 15-24 tahun dapat membaca dan menulis atau AMH kelompok umur ini sebesar 100,00 persen. Pada tahun 2017 nilai AMH kelompok umur 15-24 tahun juga 100,00 persen, demikian juga dengan tahun 2018. Sementara itu, untuk AMH penduduk miskin usia 15-55 tahun sebagian besar sudah mencapai angka 90 persen ke atas.

**Tabel 7.3 Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2016-2018**

Karakteristik Pendidikan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. Angka Melek Huruf</b>			
a. 15 - 24 Tahun	100,00	100,00	100,00
b. 15 - 55 Tahun	98,93	98,32	97,78
<b>2. Angka Partisipasi Sekolah</b>			
a. 7 - 12 Tahun	100,00	100,00	95,67
b. 13 - 15 Tahun	100,00	100,00	81,61
<b>3. Pendidikan yang Ditamatkan (15 +)</b>			
a. Tidak Tamat SD	15,41	21,66	28,17
b. Tamat SD dan SLTP	58,98	63,59	53,84
c. Tamat SLTA ke atas	25,61	14,75	17,98

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Pada kelompok APS penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun ini dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di antara penduduk miskin berusia sekolah.

Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2016 terdapat sekitar 58,98 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Surabaya yang tamat SD dan SLTP, kemudian meningkat menjadi 63,59 persen pada tahun 2017 dan turun menjadi sebesar 53,84 persen pada 2018. Sedangkan untuk penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tamat SLTA ke atas pada tahun 2016 mencapai 25,61 persen, kemudian turun menjadi 14,75 persen pada tahun 2017, pada tahun 2018 naik 3,23 persen menjadi 17,98 persen. Sementara itu, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD menunjukkan tren positif persentasenya pada periode 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD Kota Surabaya sebesar 15,41 persen. Kemudian naik 6,25 persen menjadi 21,66 persen. Nilai penduduk miskin usia 15 tahun ke atas

yang tidak tamat SD Kota Surabaya naik kembali sebesar 6,51 persen menjadi 28,17 persen pada tahun 2018.

Angka Melek Huruf umur 15-55 tahun selama periode 2016-2018 perkembangannya sedikit menurun. Pada 2016 nilai AMH kelompok umur 15-55 tahun sebesar 98,93 persen. Lalu pada tahun 2017 sedikit menurun menjadi 98,32 persen. Kemudian pada tahun 2018 kembali turun 0,54 poin menjadi 97,78 persen.

Selama tiga tahun terakhir Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai APS penduduk miskin usia 7-12 tahun di Kota Surabaya pada periode 2016 sampai 2018 cukup stabil. Pada tahun 2016, APS penduduk miskin usia 7-12 tahun di Kota Surabaya sebesar 100,00 persen atau seluruhnya. Nilai APS penduduk miskin usia 7-12 tahun di Kota Surabaya pada tahun 2017 juga 100,00 persen, namun tahun 2018 nilai APS turun menjadi sebesar 95,67 persen. Sementara itu, APS penduduk miskin usia 13-15 tahun memiliki tren positif. Pada tahun 2016 angkanya mencapai 100,00 persen. Nilai APS penduduk miskin usia 3-15 tahun di Kota Surabaya pada tahun 2017 juga 100,00 persen. Sedang pada tahun 2018 nilainya turun cukup signifikan menjadi sebesar 81,61 persen.

**Gambar 7.3 Persentase Penduduk Miskin Usia 15+ Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2016-2018**



Sumber: BPS Kota Surabaya

#### **7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan Anggota Rumah Tangga**

Beberapa ahli menyatakan bahwa pengangguran merupakan awal dari kemiskinan, meskipun untuk membuktikannya secara empiris tidaklah mudah. Pengangguran menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan sehingga kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pada akhirnya menjauhkannya dari akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.

Persentase penduduk miskin Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tidak banyak mengalami perubahan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja sebesar 45,27 persen, kemudian turun pada tahun 2017 menjadi 42,81 persen, dan meningkat 3,71 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 46,52 persen.

Penduduk miskin identik dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga berpengaruh pada pemilihan jenis pekerjaan. Sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor informal, dengan kecenderungan yang fluktuatif selama 2015-2017. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 22,21 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Surabaya yang bekerja di sektor informal. Kemudian naik menjadi 23,94 persen pada tahun 2017, dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi sebesar 20,20 persen. Penurunan persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal ini diikuti dengan semakin banyaknya penduduk miskin yang bekerja di sektor formal. Selama tahun 2016-2018 masing-masing sebesar 32,51 persen; 33,25 persen; dan 33,29 persen.

Jika dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian cenderung lebih kecil dibanding penduduk miskin yang bekerja bukan di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan di Kota Surabaya sedikit lahan pertaniannya. Pada tahun 2016 sebanyak 0,62 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, dan jumlahnya relatif meningkat pada tahun berikutnya sehingga menjadi 5,34 persen pada tahun

**Tabel 7.4 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas di Kota Surabaya Menurut Status Bekerja dan Lapangan Pekerjaan, 2016-2018**

Karakteristik Ketenagakerjaan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. Status Bekerja</b>			
Tidak Bekerja	45,27	42,81	46,52
Bekerja di Sektor Informal	22,21	23,94	20,20
Bekerja di Sektor Formal	32,51	33,25	33,29
<b>2. Lapangan Pekerjaan</b>			
Tidak Bekerja	45,27	42,81	46,52
Bekerja di Sektor Pertanian	0,62	5,34	0
Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	54,11	51,85	53,48

Sumber: BPS Kota Surabaya

2017. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian turun 5,34 persen dibanding tahun sebelumnya, menjadi sebesar 0,00 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja bukan di sektor pertanian pada tahun 2016 sebesar 54,11 persen, kemudian sedikit turun menjadi 51,85 persen pada tahun 2017 dan pada 2018 naik sebesar 1,63 persen menjadi sebesar 53,48 persen. Sisanya, sebesar 46,52 persen penduduk miskin disumbang oleh penduduk yang tidak bekerja.

## 7.5 Karakteristik Perumahan Rumah Tangga

Karakteristik perumahan merupakan karakteristik rumah tangga miskin yang tidak kalah penting untuk dibahas. BPS menggunakan delapan variabel perumahan untuk mendefinisikan rumah tangga miskin, yaitu luas lantai perkapita, jenis lantai, ketersediaan air bersih, jenis jamban, kepemilikan asset, pendapatan, pengeluaran, dan konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam).



**Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Beberapa Karakteristik Perumahan  
Di Kota Surabaya Tahun 2016-2018**

Karakteristik Perumahan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Penggunaan Air Bersih</b>	96,28	100,00	95,87
<b>Penggunaan Jamban Sendiri/Bersama</b>	88,35	92,35	92,64

Sumber: BPS Kota Surabaya

Adanya keterbatasan untuk leluasa melakukan kegiatan di dalam rumah yang sempit menandakan kualitas hidup yang lebih rendah dibanding mereka yang lebih leluasa beraktivitas di dalam rumah (TNP2K, 2010).

Rumah tangga miskin cenderung memiliki luas lantai perkapita lebih kecil. Bila dilihat menurut kabupaten/kota maka rumah tangga yang menempati rumah/bangunan dengan luas lantai 8 meter persegi perkapita memperlihatkan persentase terendah berada di Kota Surabaya, yakni sebesar 72,12 persen. Hal ini sejalan dengan permasalahan keterbatasan lahan yang ada di Kota Surabaya, sehingga harga per satuan meter persegi, relatif lebih mahal dibandingkan wilayah lain di Jawa Timur. Dalam Laporan Eksekutif Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 disebutkan bahwa rata-rata luas lantai perkapita penduduk di Kota Surabaya sebesar 24,52 m<sup>2</sup>. Sementara itu, pada tahun 2017 sekitar 24,40 persen rumah tangga di Kota Surabaya menempati rumah dengan luas lantai perkapita kurang dari 8 m<sup>2</sup>, pada tahun 2018 persentasenya meningkat menjadi sebesar 27,88 persen.

Penggunaan air bersih berkaitan dengan kualitas hidup seseorang. Air bersih sangat dibutuhkan untuk kebutuhan minum dan sanitasi. Air minum yang tidak terjamin kebersihannya berbahaya bagi kesehatan karena dapat menimbulkan penyakit. Ketika kepala rumah tangga atau

ada anggota rumah tangga yang sakit, pengeluaran untuk berobat akan semakin menambah beban rumah tangga tersebut yang pada akhirnya semakin mendorong ke tingkat kemiskinan yang semakin dalam (TNP2K, 2010). Air bersih yang dicakup di sini adalah air kemasan bermerk, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, dan sumur/mata air terlindung.

Secara relatif, penggunaan air bersih pada rumah tangga tidak miskin lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga miskin, dengan kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya baik untuk rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin. Pada tahun 2016 sekitar 96,28 persen rumah tangga miskin Kota Surabaya menggunakan air bersih, pada tahun 2017 jumlah rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih naik 3,72 persen menjadi sebesar 100,00 persen. Pada tahun 2018 rumah tangga miskin Kota Surabaya menggunakan air bersih turun 4,13 persen menjadi sebesar 95,87 persen..

Karakteristik perumahan yang tidak kalah penting untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin adalah penggunaan jamban sendiri/bersama. Ketersediaan tempat buang air besar (jamban) di rumah tangga merupakan salah satu syarat hidup sehat. Sebagaimana

**Gambar 7.4 Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Menggunakan Air Layak di Kota Surabaya Tahun 2017-2018**



Sumber: BPS Kota Surabaya

penggunaan air bersih, penggunaan jamban sendiri/bersama pada rumah tangga miskin di Kota Surabaya relatif lebih kecil dibandingkan rumah tangga tidak miskin.

Selama periode 2016 sampai dengan 2018 persentase rumah tangga miskin Kota Surabaya yang menggunakan jamban sendiri/bersama semakin meningkat. Pada tahun 2016 terdapat 88,35 persen rumah tangga miskin di Kota Surabaya yang menggunakan jamban sendiri/bersama. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri sebesar 4,00 poin persen menjadi 92,35 persen, dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 92,64 persen. Sedangkan pada tahun 2016 rumah tangga miskin Kota Surabaya yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban sebesar 11,65 persen. Kemudian pada tahun 2017 persentase rumah tangga miskin Kota Surabaya yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban turun 4,00 persen menjadi sebesar 7,65 persen. Lalu persentase rumah tangga miskin Kota Surabaya yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban kembali turun pada tahun 2018 menjadi 7,36 persen.

**Gambar 7.5 Persentase Rumah Tangga Miskin di Jawa Timur Menurut Jenis Jamban, 2016-2018**



Sumber: BPS Kota Surabaya

<https://surabayakota.bps.go.id>



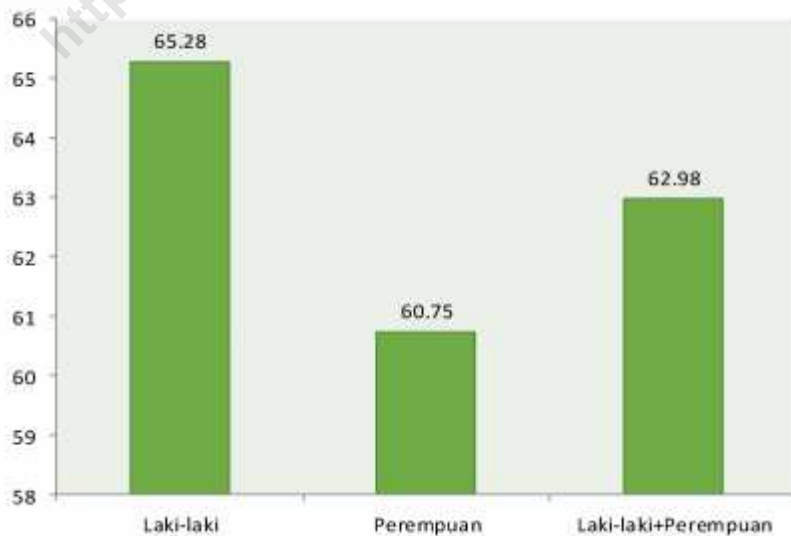
## 8. SOSIAL LAINNYA

### 8.1. Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan

Manusia dan teknologi di zaman modern ini memang tidak bisa terpisahkan, sehingga kebutuhan manusia akan teknologi membuat teknologi-teknologi baru bermunculan. Teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat, sehingga bisa mempengaruhi kehidupan sosial. Seperti contohnya fasilitas internet yang bisa dibilang hal wajib saat ini membuatnya mendapat tempat sebagai pusat informasi dan menjadi wadah trend pergaulan masyarakat kota besar di zaman modern ini, bukan lagi buku, koran, dll. Hal tersebut dikarenakan manusia lebih senang dengan sesuatu yang praktis dan cepat.

Internet adalah sebuah jaringan komputer publik di seluruh dunia. Internet menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk World Wide Web dan membawa email, berita, hiburan dan file data.

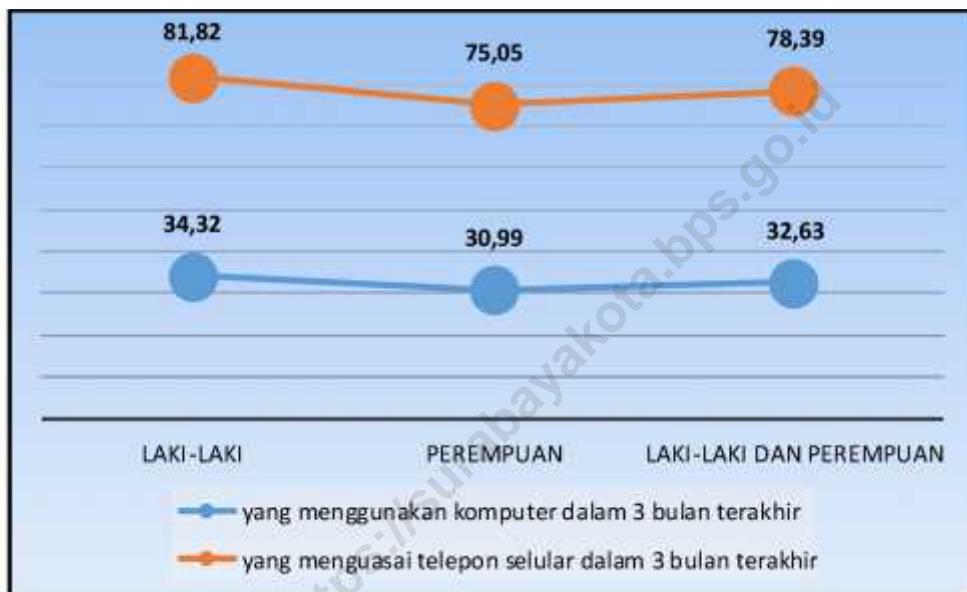
**Gambar 8.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Kota Surabaya yang Mengakses Internet, 2018**



Sumber: BPS Kota Surabaya

Berdasarkan hasil Susenas 2017 terlihat bahwa penduduk Kota Surabaya yang berumur 5 tahun keatas yang mengakses internet cukup besar, yakni di atas 50 persen. Penduduk laki-laki Kota Surabaya berumur 5 tahun keatas yang mengakses internet sebesar 57,81 persen. Sedangkan penduduk perempuan berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet sebesar 51,31 persen. Dengan kata lain, penduduk laki-laki yang mengakses internet lebih banyak dibanding perempuan, yakni lebih besar 6,5 persen.

**Gambar 8.2 Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke Atas Kota Surabaya yang Menggunakan Komputer dan Menguasai Telepon Selular dalam 3 Bulan Terakhir Tahun 2018**



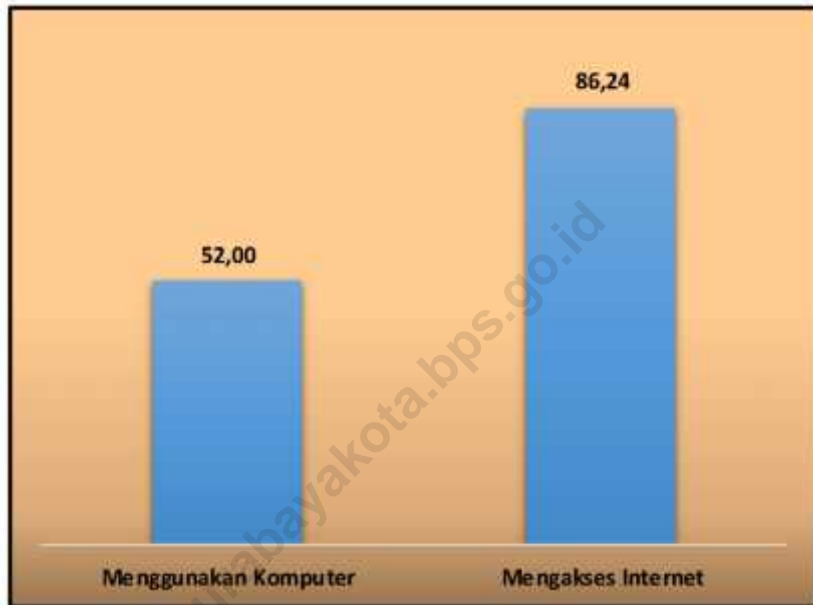
Sumber: BPS Kota Surabaya

Di era globalisasi saat ini, siapa saja dapat mengakses internet kapan pun dan dimana pun asalkan mereka dapat menguasai perangkat yang dapat mengakses internet. Dalam tiga bulan terakhir, sebanyak 78,39 persen penduduk Kota Surabaya yang berumur 5 tahun ke atas menggunakan telepon selular, terdiri dari 81,82 persen penduduk laki-laki dan 75,05 persen penduduk perempuan. Sedangkan penduduk 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer sebanyak 32,63 persen, terdiri dari 34,32 persen penduduk laki-laki dan 30,99 persen penduduk perempuan.

Pada satu sisi, perkembangan teknologi telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kehidupan peradaban manusia, pekerjaan yang sebelumnya menuntut kekuatan dan kemampuan fisik, kini sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Teknologi adalah ciptaan manusia, yang mana tujuan utama diciptakannya demi memudahkan atau meringankan aktivitas manusia. Jika manusia salah dalam me-

manfaat teknologi, maka akan berdampak negatif dalam hasilnya, dan sebaliknya, jika manusia dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik maka akan menghasilkan sesuatu yang berguna pula.

**Gambar 8.3 Persentase Anggota Rumah Tangga di Kota Surabaya yang Menggunakan Komputer dan yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Tahun 2018**



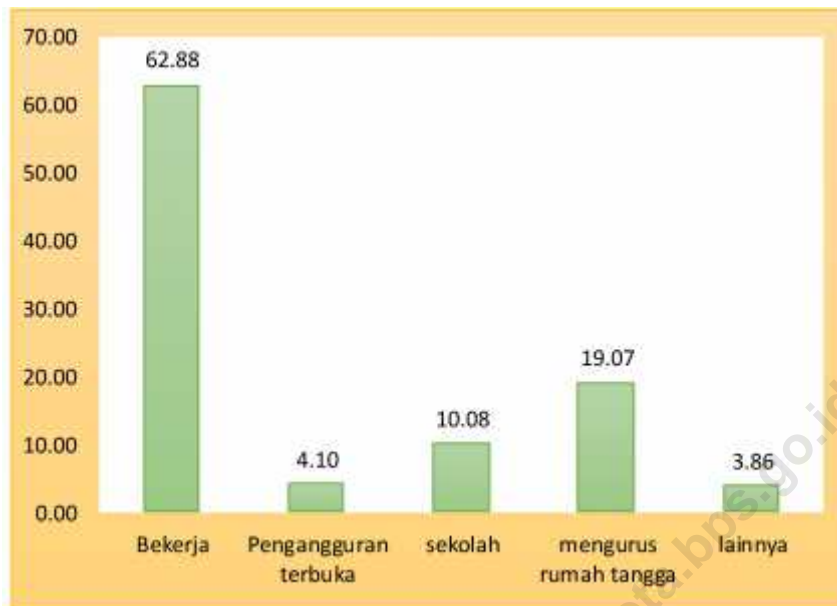
Sumber: BPS Kota Surabaya

Dari Gambar 8.3 dapat kita ketahui bahwa sebagian besar anggota rumah tangga di Kota Surabaya telah mengakses internet selama 3 bulan terakhir, yakni 86,24 persen. Sementara anggota rumah tangga yang menggunakan komputer di Kota Surabaya selama 3 bulan terakhir ada sebanyak 52 persen. Hal ini dikarenakan sudah banyak penduduk Kota Surabaya yang memiliki smartphone, sehingga dapat mengakses internet tanpa menggunakan komputer.

## **8.2. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan**

Menurut kegiatannya, penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu penduduk yang bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya.

**Gambar 8.4 Persentase Penduduk Kota Surabaya Menurut Kegiatan 2018**



Sumber: BPS Kota Surabaya

Penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas yang kegiatan seminggu terakhir bekerja tercatat sebanyak 62,88 persen. Bekerja yang dimaksud disini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, baik sebagai pengusaha, pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga) yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Terbanyak kedua aktivitas yang dilakukan penduduk adalah mengurus rumah tangga atau sebesar 19,07 persen. Sebagian besar yang mengurus rumah tangga adalah ibu rumah tangga dan penduduk lansia (lanjut usia).

Distribusi penduduk ketiga yang terbesar adalah yang melakukan kegiatan sekolah. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya bersekolah sebesar 10,08 persen. Bersekolah yang dimaksud adalah menjalani pendidikan setingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.

Sisanya adalah penduduk yang melakukan kegiatan lainnya, seperti penduduk yang tidak melakukan kegiatan apapun, punya pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan.



Penduduk yang melakukan kegiatan lainnya sebanyak 3,86 persen. Namun sebanyak 4,10 persen penduduk masuk dalam kategori pengangguran terbuka.

Pembagian kelompok penduduk tersebut berbeda menurut definisi ketenagakerjaan. Perbedaan terletak pada pembatasan usia penduduk. Jika dilihat menurut ketenagakerjaan, diukur dari penduduk yang bekerja dan melakukan aktivitas lainnya dengan usia 15 tahun ke atas.

Berdasarkan definisi ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (terdiri dari penduduk yang bekerja dan penganggur) sebesar 66,98 persen, sedangkan sisanya sebesar 33,02 persen melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

### **8.3. Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Hal yang tak kalah menarik untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan kesejahteraan rakyat dengan melihat penguasaan/ kepemilikan akses teknologi informasi dan komunikasi.

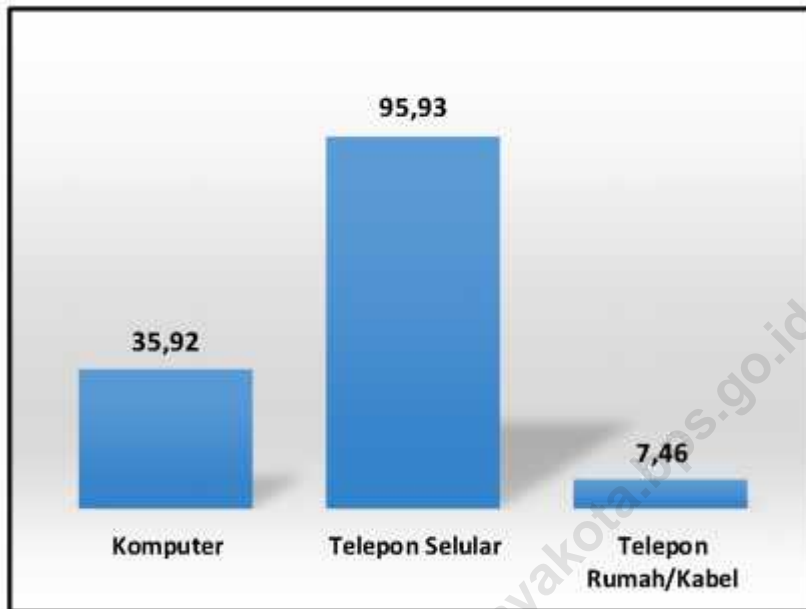
Di abad ke 20 ini, kemajuan teknologi informasi berkembang cepat. Era penggunaan telepon sudah bergeser ke hand phone (HP). Bagi masyarakat sekarang, HP lebih praktis dan ekonomis dibanding telepon. Memiliki HP tidak memerlukan biaya pemasangan dan tidak tergantung adanya sarana kabel telepon. Cukup dengan tower signal, penggunaan HP bisa dilakukan dimana saja.

Di samping itu, pembelian pulsa HP bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing individu. Bahkan hanya dengan perangkat HP, siapapun bisa melakukan akses internet dengan tujuan yang lebih luas.

Kepopuleran HP dibandingkan telepon bisa ditunjukkan dari hasil data Susenas terakhir. Rumah tangga yang anggotanya mempunyai HP yang mencapai lebih dari 90 persen, tepatnya 95,93 persen. Jumlah ini naik dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 94,21 persen. Rumah tangga yang menggunakan HP merasa cukup terbantu dibanding yang menggunakan telepon. Berbagai aplikasi yang ditawarkan oleh Perusahaan Komunikasi selular, menjadikan HP sebagai alat komunikasi yang paling diminati di

kalangan masyarakat.

**Gambar 8.5 Persentase Rumah Tangga yang Menguasai/Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi di Kota Surabaya 2018**



Sumber: BPS Kota Surabaya

Dengan memanfaatkan aplikasi HP, rumah tangga bisa melakukan komunikasi lewat BBM, facebook, whatsapp, Line dan lain sebagainya yang tidak kesemuanya tidak bisa dinikmati pengguna telepon biasa.

Beberapa rumah tangga memanfaatkan komputer dan laptop sebagai sarana penunjang pendidikan dan mengembangkan bisnis (hasil usaha). Berbagai produk usaha dapat dipasarkan dengan menggunakan komputer dan laptop yang terhubung jaringan internet memunculkan pasar online. Pendek kata, penggunaan alat komunikasi dan informasi semakin diperlukan dan berkembang di tengah masyarakat Kota Surabaya.

Sementara, dari seluruh rumah tangga di Kota Surabaya, anggota rumah tangganya yang menguasai atau memiliki alat informasi berupa komputer (termasuk desktop, laptop dan notebook) tercatat sebesar 35,92 persen. Persentase ini diduga semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring semakin meningkatnya kebutuhan pendidikan dan informasi.

#### **8.4. Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha dan Penerima Pelayanan Kesehatan Gratis**

Kredit usaha adalah sejumlah dana yang bersifat pinjaman yang diterima untuk membantu menjalankan atau memperbesar kegiatan usaha.

Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, banyak tersedia kredit usaha dari Pemerintah dan Swasta. Bahkan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah, Pemerintah Jawa Timur mengeluarkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur yang mudah dan bunga yang relatif murah.

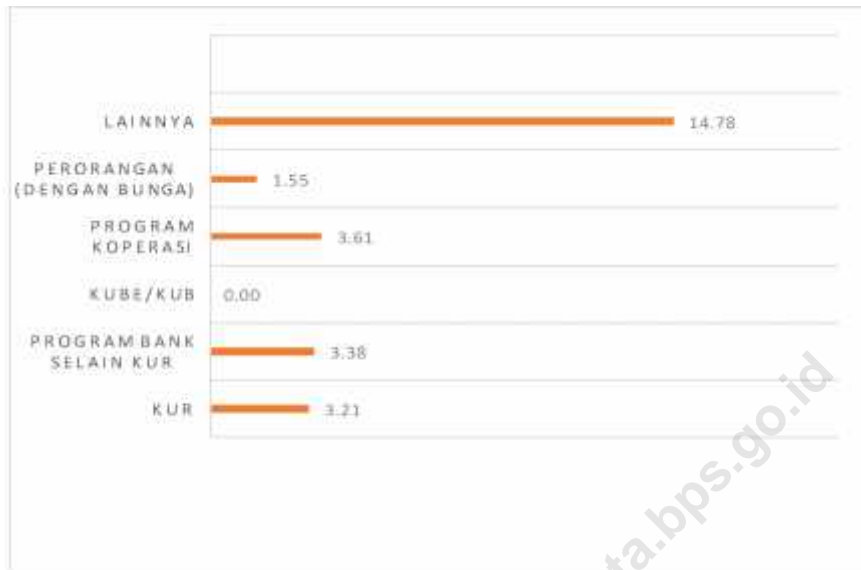
Terkait kredit usaha rakyat, tidak sedikit masyarakat yang masih minim pengetahuannya tentang kredit usaha. Akibatnya, di antaranya terjebak pada rentenir dan sistem ijon. Sosialisasi KUR juga dirasakan minim. Hal ini menyebabkan rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha tidak begitu banyak.

Dari total penerima kredit usaha di Kota Surabaya, berdasarkan data Susenas 2018, terbanyak menggunakan program koperasi sebesar 3,61 persen. Selain menggunakan program koperasi, penerima kredit Kota Surabaya menggunakan program bank selain KUR sebesar 3,38 persen. Pengguna KUR sebagai kredit usaha sebesar 3,21 persen. Kemudian pengguna kredit perorangan (dengan bunga) sebagai kredit usahanya sebesar 1,55 persen. Sedangkan yang menggunakan kredit usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebesar 0,00 persen atau tidak ada sama sekali.

Meskipun pada umumnya perusahaan pembiayaan di daerah sebagian besar adalah bank, koperasi tetap menjadi pilihan favorit masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, prosedur pengajuan kredit melalui bank dianggap cukup rumit sehingga ada rasa takut untuk memanfaatkan kredit usaha.

Kondisi itu berbeda dengan prosedur pengambilan kredit melalui koperasi yang dianggap lebih ringkas dan jangkauannya hingga ke pelosok daerah. Hal ini karena koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Selain bisa memanfaatkan sebagai tempat pemberian kredit,

**Gambar 8.5 Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kota Surabaya Tahun 2018**



Sumber: BPS Kota Surabaya

melalui koperasi juga bisa dimanfaatkan sebagai media pemasaran hasil produksi usaha.

Dua jenis kredit usaha yang sering digunakan penerima kredit usaha adalah program koperasi dan program bank selain KUR masing-masing 3,61 persen dan 3,38 persen. Bagi wilayah yang tidak tersedia lembaga pembiayaan, meminjam uang kepada individu atau seseorang untuk usaha menjadi hal yang sudah biasa. Padahal resiko meminjam kepada individu atau perseorangan cukup beresiko karena kebanyakan berbunga tinggi.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata serta dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat lebih baik. Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah dengan pemberian jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU no.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

**Gambar 8.6 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Surabaya Tahun 2018**



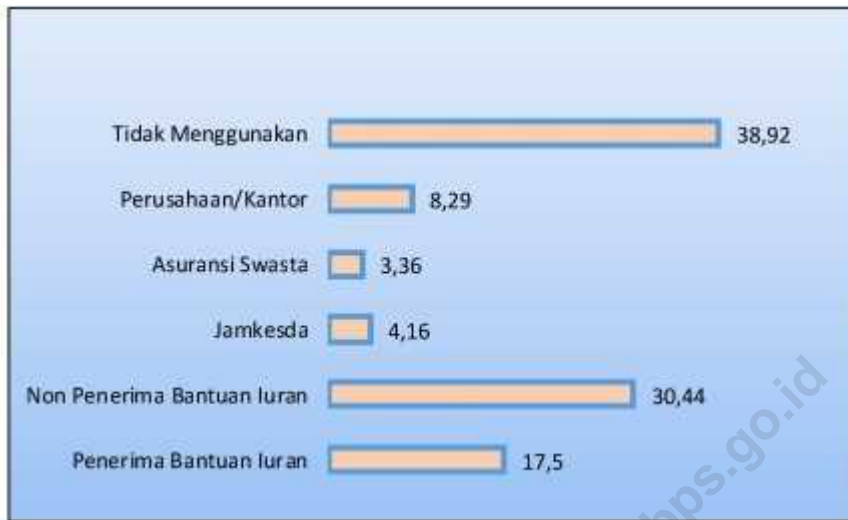
Sumber: BPS Kota Surabaya

Berdasarkan data Susenas 2018, dari seluruh penduduk Kota Surabaya yang berobat dan yang menggunakan jaminan kesehatan tercatat sebanyak 61,08 persen. Berdasarkan jenis kelamin, pengguna jaminan kesehatan terdiri 61,31 persen penduduk laki-laki dan 60,86 persen penduduk perempuan. Melihat data tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa kesadaran perempuan akan pentingnya jaminan kesehatan relatif sama dengan penduduk laki-laki. Angka tersebut sangat berkorelasi dengan angka harapan hidup laki-laki yang selalu lebih rendah dibanding perempuan.

Dari total seluruh penduduk yang memperoleh pelayanan kesehatan gratis, terbanyak adalah non penerima bantuan iuran sebesar 30,44 persen, penerima bantuan iuran sebesar 17,50 persen dan asuransi dari perusahaan/kantor sebesar 8,29 persen.

Pengguna program kesehatan yang berasal dari dana APBD kabupaten/kota atau Jamkesda tercatat hanya sebesar 4,16 persen, sedangkan pengguna asuransi swasta sebesar 3,36 persen. Namun sebanyak 38,92 persen tidak menggunakan pelayanan kesehatan gratis.

**Gambar 8.7 Persentase Penduduk Kota Surabaya Penerima Pelayanan Kesehatan Gratis Menurut Layanan Jaminan Kesehatan 2018**



Sumber: BPS Kota Surabaya

Jaminan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya sangat dirasakan oleh masyarakat, mengingat biaya berobat di rumah sakit umum dan swasta termasuk membeli obat masih relatif mahal.

Di Kota Surabaya sendiri, untuk meringankan biaya berobat bagi warga miskin selain dari program layanan kesehatan yang berasal dari pemerintah dan swasta, juga terdapat lembaga sosial lainnya yang turut menyediakan pembiayaan kesehatan gratis. Lembaga sosial tersebut bisa dalam bentuk LSM, aktivitas layanan orsos/orpol, maupun yang disediakan oleh lembaga keagamaan.

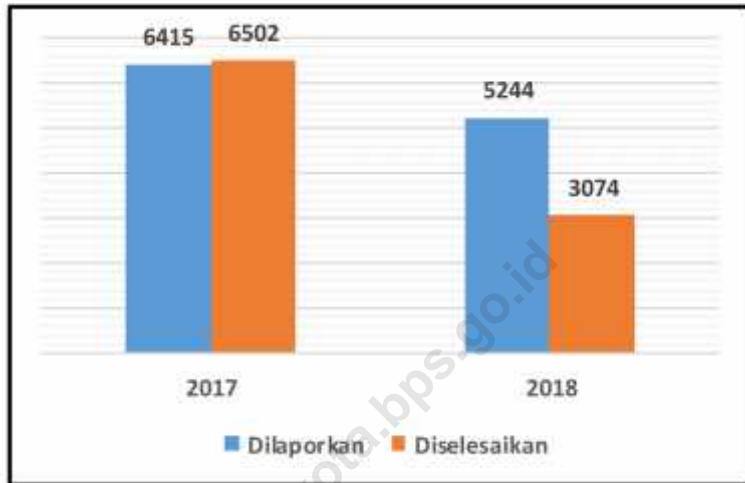
### **8.5. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan**

Kenyamanan individu dari kejahatan merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan rakyat. Semakin sejahtera suatu wilayah, semakin aman masyarakatnya dari tindak kejahatan.

Pada tahun 2018 jumlah tindak pidana yang dilaporkan menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 6.415 tindak kejahatan pada 2017 menjadi 5.244 tindak kejahatan pada 2018. Begitu pula tindak kejahatan yang diselesaikan pada tahun 2018 lebih menurun dibanding tahun 2017. Pada ta-

hun 2017, sebanyak 6.502 tindak kejahatan berhasil diselesaikan. Jumlah ini menurun menjadi 3.074 pada tahun 2018.

**Gambar 8.8 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan Kota Surabaya Tahun 2017-2018**



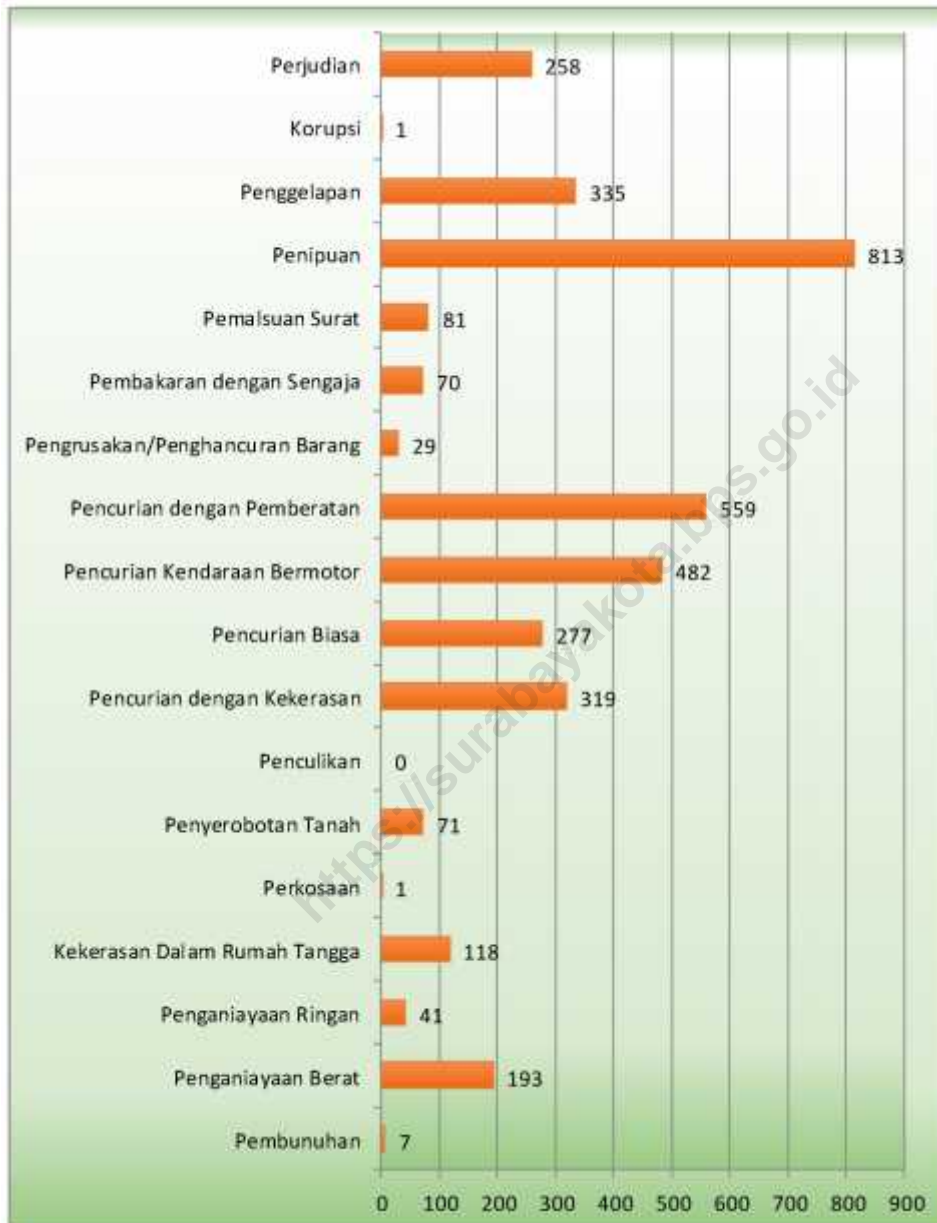
Sumber: BPS Kota Surabaya

Berdasarkan data dari Survei Statistik Politik dan Keamanan 2018, tindak kejahatan terbesar yang terjadi di Kota Surabaya adalah penipuan sebanyak 813 tindak kejahatan. Tindak kejahatan terbesar kedua dan ketiga adalah pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor, masing-masing sebesar 813 tindak kejahatan dan 482 tindak kejahatan. Tindak kejahatan pencurian dibedakan menjadi empat macam, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian biasa, dan pencurian dengan kekerasan, masing-masing sebesar 813 tindak kejahatan, 462 tindak kejahatan, 277 tindak kejahatan, dan 319 tindak kejahatan.

Terdapat beberapa tindak kejahatan dengan jumlah kasus dibawah sepuluh, yaitu pembunuhan terdapat 7 tindak kejahatan, korupsi sebanyak 1 tindak kejahatan, dan terdapat 1 tindakan pemerkosaan.

Optimalisasi kerjasama antara masyarakat, Pemerintah dan Kepolisian sangat diharapkan agar tindak kejahatan di Kota Surabaya bisa ditekan sekecil mungkin.

**Gambar 8.9. Persentase Penduduk Kota Surabaya yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan Tahun 2018**



Sumber: BPS Kota Surabaya



# LAMPIRAN

<https://www.dyalopros.com.id>



## I

**(1) Indikator Kependudukan**

Proyeksi Penduduk Menurut Kecamatan  
di Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Kecamatan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
010 Karang Pilang	71.247	70.928	70.568	70.168
020 Jambangan	49.377	49.923	50.442	50.937
030 Gayungan	43.220	43.268	43.291	43.288
040 Wonocolo	81.200	81.289	81.328	81.321
050 Tenggiling Mejoyo	73.298	73.379	73.415	73.409
060 Gunung Anyar	66.994	67.919	68.814	69.682
070 Rungkut	123.414	123.735	123.981	124.155
080 Sukolilo	128.218	129.778	131.276	132.715
090 Mulyorejo	97.568	98.022	98.417	98.759
100 Gubeng	129.608	129.749	129.812	129.801
110 Wonokromo	130.981	130.395	129.733	129
120 Dukuh Pakis	66.525	66.905	67.247	67.555
130 Wiyung	74.324	75.550	76.750	77.925
140 Lakarsantri	57.372	58.604	59.825	61.038
141 Sambikerep	68.471	69.941	71.401	72.848
150 Tandes	105.794	106.214	106.657	106.867
160 Suko Manunggal	103.268	103.679	104.028	104.319
170 Sawahan	175.111	175.808	176.400	176.892
180 Tegalsari	84.172	83.796	83.371	82.899
190 Genteng	47.778	47.969	48.130	48.264
200 Tambaksari	208.377	208.842	209.186	209.411
210 Kenjeran	178.660	181.611	184.495	187.319
211 Bulak	38.523	38.742	38.938	39.112
220 Simokerto	77.990	77.641	77.247	76.811
230 Semampir	148.885	148.221	147.468	146.635
240 Pabean Cantian	68.257	67.952	67.607	67.226
250 Bubutan	88.765	89.535	90.254	90.927
260 Krembangan	107.890	108.009	108.062	108.051
270 Asem Rowo	44.883	45.273	45.638	45.998
280 Benowo	60.662	61.965	63.257	64.544
281 Pakal	47.751	47.764	47.748	47.706
<b>Kota Surabaya</b>	<b>2.848.583</b>	<b>2.862.406</b>	<b>2.874.699</b>	<b>2.885.555</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya

## I

**(2) Indikator Kependudukan**

Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan, di Kota Surabaya  
Tahun 2015-2018

2017-2018	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		
	2015-2016	2016-2017	2017-2018
010 Karang Pilang	-0,45	-0,51	-0,57
020 Jambangan	1,11	1,04	0,98
030 Gayungan	0,11	0,05	-0,01
040 Wonocolo	0,11	0,05	-0,01
050 Tenggilis Mejoyo	0,11	0,05	-0,01
060 Gunung Anyar	1,38	1,32	1,26
070 Rungkut	0,26	0,20	0,14
080 Sukolilo	1,22	1,15	1,10
090 Mulyorejo	0,47	0,40	0,35
100 Gubeng	0,11	0,05	-0,01
110 Wonokromo	-0,45	-0,51	-0,57
120 Dukuh Pakis	0,57	0,51	0,45
130 Wiyung	1,65	1,59	1,53
140 Lakarsantri	2,15	2,08	2,03
141 Sambikerep	2,15	2,09	2,03
150 Tandes	0,40	0,34	0,28
160 Suko Manunggal	0,40	0,34	0,28
170 Sawahan	0,40	0,34	0,28
180 Tegalsari	-0,45	-0,51	-0,57
190 Genteng	0,40	0,34	0,28
200 Tambaksari	0,22	0,16	0,11
210 Kenjeran	1,65	1,59	1,53
211 Bulak	0,57	0,51	0,45
220 Simokerto	-0,45	-0,51	-0,56
230 Semampir	-0,45	-0,51	-0,56
240 Pabean Cantian	-0,45	-0,51	-0,56
250 Bubutan	0,87	0,80	0,75
260 Krembangan	0,11	0,05	-0,01
270 Asem Rowo	0,87	0,81	0,75
280 Benowo	2,15	2,09	2,03
281 Pakal	0,03	-0,03	-0,09
<b>Kota Surabaya</b>	<b>0,49</b>	<b>0,43</b>	<b>0,38</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya

## I

**(3) Indikator Kependudukan**

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Surabaya  
Tahun 2015-2019

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin			
	2015	2016	2017	2018
010 Karang Pilang	102,96	103,03	103,04	103,04
020 Jambangan	99,54	99,61	99,63	99,63
030 Gayungan	91,15	91,21	91,21	91,22
040 Wonocolo	96,91	96,97	96,98	96,98
050 Tenggilis Mejoyo	102,46	102,53	102,55	102,55
060 Gunung Anyar	99,95	100,02	100,03	100,03
070 Rungkut	96,19	96,25	96,26	96,27
080 Sukolilo	99,45	99,52	99,53	99,53
090 Mulyorejo	90,31	90,37	90,38	90,38
100 Gubeng	90,88	90,94	90,95	90,95
110 Wonokromo	94,52	94,58	94,60	94,60
120 Dukuh Pakis	94,61	94,68	94,69	94,69
130 Wiyung	94,93	95,00	95,01	95,01
140 Lakarsantri	93,95	94,01	94,03	94,03
141 Sambikerep	97,24	97,31	97,31	97,31
150 Tandes	100,95	101,03	101,04	101,04
160 Suko Manunggal	97,55	97,62	97,63	97,63
170 Sawahan	96,04	96,11	96,12	96,12
180 Tegalsari	95,83	95,90	95,91	95,91
190 Genteng	94,15	94,21	94,22	94,22
200 Tambaksari	97,65	97,72	97,73	97,73
210 Kenjeran	101,91	101,98	101,99	102,00
211 Bulak	101,33	101,40	101,41	101,41
220 Simokerto	95,77	95,84	95,85	95,85
230 Semampir	101,84	101,91	101,92	101,93
240 Pabean Cantian	101,07	101,14	101,15	101,15
250 Bubutan	96,88	96,95	96,96	96,96
260 Krembangan	98,62	98,69	98,70	98,70
270 Asem Rowo	104,12	104,20	104,21	104,21
280 Benowo	97,94	98,01	98,02	98,02
281 Pakal	101,33	101,40	101,41	101,41
<b>Kota Surabaya</b>	<b>97,56</b>	<b>97,63</b>	<b>97,64</b>	<b>97,64</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya

## I

**(4) Indikator Kependudukan**

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Surabaya  
Tahun 2015-2019

Kecamatan	Kepadatan Penduduk			
	2015	2016	2017	2018
010 Karang Pilang	7.719,07	7.684,51	7.645,50	7.602,17
020 Jambangan	11.784,49	11.914,80	12.038,66	12.156,80
030 Gayungan	7.120,26	7.128,17	7.131,96	7.131,47
040 Wonocolo	11.994,09	12.007,24	12.013,00	12.011,96
050 Tenggilis Mejoyo	13.278,62	13.293,30	13.299,82	13.298,73
060 Gunung Anyar	6.899,49	6.994,75	7.086,92	7.176,31
070 Rungkut	5.854,55	5.869,78	5.881,45	5.889,71
080 Sukolilo	5.414,61	5.480,49	5.543,75	5.604,52
090 Mulyorejo	6.866,15	6.898,10	6.925,90	6.949,96
100 Gubeng	16.221,28	16.238,92	16.246,81	16.245,43
110 Wonokromo	15.464,11	15.394,92	15.316,77	15.230,22
120 Dukuh Pakis	6.692,66	6.730,89	6.765,29	6.795,77
130 Wiyung	5.965,01	6.063,40	6.159,71	6.254,01
140 Lakarsantri	3.021,17	3.086,05	3.150,34	3.214,22
141 Sambikerep	2.891,51	2.953,59	3.015,24	3.076,35
150 Tandes	9.556,82	9.594,76	9.626,92	9.653,75
160 Suko Manunggal	11.188,30	11.232,83	11.270,64	11.302,17
170 Sawahan	25.268,54	25.369,12	25.454,55	25.525,54
180 Tegalsari	19.620,51	19.532,87	19.433,80	19.323,78
190 Genteng	11.797,04	11.844,20	11.883,95	11.917,04
200 Tambaksari	23.178,75	23.230,48	23.268,74	23.293,77
210 Kenjeran	22.993,56	23.373,36	23.744,53	24.107,98
211 Bulak	5.732,59	5.765,18	5.794,35	5.820,24
220 Simokerto	30.111,97	29.977,22	29.825,10	29.656,76
230 Semampir	16.996,00	16.920,21	16.834,25	16.739,16
240 Pabean Cantian	10.037,79	9.992,94	9.942,21	9.886,18
250 Bubutan	22.996,11	23.195,60	23.381,87	23.556,22
260 Krembangan	12.936,45	12.950,72	12.957,07	12.955,76
270 Asem Rowo	2.906,93	2.932,19	2.955,83	2.977,98
280 Benowo	2.556,34	2.611,25	2.665,70	2.719,76
281 Pakal	2.163,62	2.164,20	2.163,48	2.161,58
<b>Kota Surabaya</b>	<b>8.716,33</b>	<b>8.758,62</b>	<b>8.796,24</b>	<b>8.829,46</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya

## II

**(2) Indikator Kependudukan**

Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur  
Tahun 2014–2018

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten</b>					
1 Pacitan	70,75	71,05	71,18	71,31	71,52
2 Ponorogo	71,88	72,08	72,18	72,27	72,43
3 Trenggalek	72,51	72,91	73,03	73,15	73,35
4 Tulungagung	72,88	73,28	73,40	73,53	73,74
5 Blitar	72,50	72,80	72,89	72,99	73,16
6 Kediri	72,04	72,14	72,20	72,25	72,37
7 Malang	71,78	71,98	72,05	72,12	72,26
8 Lumajang	69,07	69,27	69,38	69,50	69,70
9 Jember	67,80	68,20	68,37	68,54	68,74
10 Banyuwangi	69,93	70,03	70,11	70,19	70,34
11 Bondowoso	65,43	65,73	65,89	66,04	66,27
12 Situbondo	68,08	68,28	68,41	68,53	68,73
13 Probolinggo	65,75	66,15	66,31	66,47	66,71
14 Pasuruan	69,83	69,83	69,86	69,90	70,01
15 Sidoarjo	73,43	73,63	73,67	73,71	73,82
16 Mojokerto	71,76	71,96	72,03	72,10	72,24
17 Jombang	71,37	71,67	71,77	71,87	72,04
18 Nganjuk	70,87	70,97	71,04	71,11	71,25
19 Madiun	69,76	70,36	70,55	70,77	70,97
20 Magetan	71,91	72,01	72,09	72,16	72,30
21 Ngawi	71,33	71,53	71,63	71,74	71,92
22 Bojonegoro	70,11	70,51	70,67	70,83	71,07
23 Tuban	70,25	70,55	70,67	70,80	71,01
24 Lamongan	71,47	71,67	71,77	71,87	72,04
25 Gresik	72,20	72,30	72,33	72,36	72,46
26 Bangkalan	69,62	69,72	69,77	69,82	69,94
27 Sampang	67,48	67,58	67,62	67,67	67,79
28 Pamekasan	66,56	66,86	66,95	67,05	67,22
29 Sumenep	70,02	70,42	70,56	70,71	70,94
<b>Kota</b>					
71 Kediri	73,52	73,62	73,65	73,69	73,80
72 Blitar	72,70	73,00	73,09	73,17	73,36
73 Malang	72,30	72,60	72,68	72,77	72,93
74 Probolinggo	69,52	69,72	69,79	69,86	70,00
75 Pasuruan	70,54	70,84	70,93	71,02	71,18
76 Mojokerto	72,39	72,69	72,78	72,86	73,01
77 Madiun	72,41	72,41	72,44	72,48	72,59
78 Surabaya	73,85	73,85	73,87	73,88	73,98
79 Batu	72,06	72,16	72,20	72,25	72,37
<b>Jawa Timur</b>	70,45	70,68	70,74	70,80	70,97

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

# II

## (3) Indikator Kesehatan dan Gizi

Persentase Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit  
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2018

Kabupaten/Kota	Angka Kesakitan (%)		Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari)	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kabupaten</b>				
1 Pacitan	46,95	16,30	5,31	4,78
2 Ponorogo	52,32	11,87	5,14	4,88
3 Trenggalek	45,03	16,21	5,22	4,50
4 Tulungagung	52,57	15,42	5,76	5,51
5 Blitar	44,87	24,32	6,24	7,01
6 Kediri	33,85	15,29	6,20	5,29
7 Malang	51,85	11,83	6,18	5,57
8 Lumajang	62,68	10,99	5,30	4,28
9 Jember	44,30	14,74	5,50	4,86
10 Banyuwangi	52,33	18,46	5,52	4,89
11 Bondowoso	53,00	17,76	6,42	4,71
12 Situbondo	63,28	14,56	5,89	5,06
13 Probolinggo	63,61	13,18	5,90	4,62
14 Pasuruan	56,61	12,53	5,34	5,24
15 Sidoarjo	47,15	10,55	4,80	5,83
16 Mojokerto	56,03	18,26	6,06	5,34
17 Jombang	37,64	16,09	6,23	5,55
18 Nganjuk	53,55	12,45	5,87	5,12
19 Madiun	46,99	9,34	7,01	5,37
20 Magetan	60,97	12,75	6,07	5,97
21 Ngawi	38,36	13,30	7,35	4,63
22 Bojonegoro	51,32	17,66	5,71	5,27
23 Tuban	54,60	14,58	5,24	5,53
24 Lamongan	44,67	13,32	6,08	6,54
25 Gresik	49,13	13,28	5,20	6,16
26 Bangkalan	62,44	10,27	5,40	3,94
27 Sampang	64,07	27,04	3,87	3,74
28 Pamekasan	48,74	16,42	5,97	3,94
29 Sumenep	47,48	12,42	6,20	3,98
<b>Kota</b>				
71 Kediri	47,84	9,47	5,72	5,25
72 Blitar	45,24	16,10	6,42	7,51
73 Malang	48,08	11,45	5,32	8,04
74 Probolinggo	42,30	11,99	4,83	5,04
75 Pasuruan	46,79	16,34	7,17	6,99
76 Mojokerto	51,12	13,58	6,50	4,47
77 Madiun	34,67	8,48	5,78	5,04
78 Surabaya	44,53	12,60	5,39	5,32
79 Batu	53,29	13,53	4,54	6,79
<b>Jawa Timur</b>	<b>49,35</b>	<b>14,37</b>	<b>5,66</b>	<b>5,32</b>

Sumber: BPS provinsi Jawa Timur



## II

**(4) Indikator Kesehatan dan Gizi**

Persentase Penduduk di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Memiliki Jaminan Kesehatan Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Kuintil Pengeluaran Per Kapita				
	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten</b>					
1 Pacitan	33,63	24,22	35,34	37,13	42,04
2 Ponorogo	98,98	98,54	99,43	99,18	98,80
3 Trenggalek	53,59	46,84	35,20	44,60	52,02
4 Tulungagung	34,57	32,91	28,65	31,41	43,19
5 Blitar	37,45	37,24	37,88	37,96	47,39
6 Kediri	40,14	47,37	44,97	45,00	56,46
7 Malang	43,39	33,69	34,09	40,16	54,75
8 Lumajang	97,29	94,02	94,67	95,33	95,37
9 Jember	41,68	37,37	36,27	30,35	45,63
10 Banyuwangi	99,36	99,59	99,81	100,00	100,00
11 Bondowoso	74,65	66,88	62,45	60,75	61,83
12 Situbondo	34,36	39,81	36,83	26,98	52,07
13 Probolinggo	63,57	53,98	47,39	56,45	50,03
14 Pasuruan	42,78	38,12	41,29	51,35	54,28
15 Sidoarjo	57,76	59,42	61,10	67,98	74,22
16 Mojokerto	52,28	50,58	53,93	58,24	67,27
17 Jombang	55,23	57,80	53,33	56,29	57,61
18 Nganjuk	92,29	98,04	94,93	96,11	90,29
19 Madiun	55,86	53,68	56,62	49,76	62,51
20 Magetan	49,72	53,37	51,78	55,25	57,23
21 Ngawi	65,44	57,32	54,54	59,76	62,21
22 Bojonegoro	95,12	94,84	93,14	94,26	95,66
23 Tuban	42,21	40,07	44,05	43,50	49,79
24 Lamongan	96,60	96,76	97,09	94,73	96,44
25 Gresik	53,22	60,87	56,10	61,90	61,67
26 Bangkalan	25,58	32,17	25,57	31,23	32,36
27 Sampang	33,34	29,09	34,46	37,84	44,50
28 Pamekasan	52,79	56,79	41,09	47,96	57,44
29 Sumenep	94,69	96,27	97,70	92,67	89,30
<b>Kota</b>					
71 Kota Kediri	69,81	72,53	70,52	66,36	76,91
72 Kota Blitar	96,66	96,38	92,49	94,78	92,52
73 Kota Malang	49,10	60,03	58,22	55,97	76,05
74 Kota Probolinggo	61,97	67,21	71,68	66,98	73,62
75 Kota Pasuruan	92,65	93,72	87,50	89,65	91,58
76 Kota Mojokerto	93,68	94,67	93,07	89,92	94,60
77 Kota Madiun	94,61	87,77	93,77	92,68	89,18
78 Kota Surabaya	51,41	55,02	64,04	65,43	69,49
79 Kota Batu	42,10	37,90	47,23	48,14	64,87
<b>Jawa Timur</b>	<b>55,20</b>	<b>56,54</b>	<b>59,53</b>	<b>60,73</b>	<b>67,40</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

## II

**(5) Indikator Kesehatan dan Gizi**

Persentase Penduduk di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Jaminan Kesehatan					
	Penerima Bantuan Iuran	Non Penerima Bantuan Iuran	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Punya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Kabupaten</b>						
1 Pacitan	24,47	8,68	0,73	0,11	0,71	65,53
2 Ponorogo	32,23	10,07	56,23	0,47	0,65	1,01
3 Trenggalek	37,04	8,93	0,26	0,05	0,17	53,56
4 Tulungagung	19,86	11,64	0,86	0,48	1,62	65,85
5 Blitar	24,03	9,54	5,42	0,70	0,94	60,42
6 Kediri	26,94	16,65	0,82	0,63	2,16	53,21
7 Malang	20,40	18,22	0,44	0,37	2,44	58,79
8 Lumajang	22,91	7,48	88,34	0,48	1,22	4,66
9 Jember	26,87	10,00	0,91	0,13	0,80	61,75
10 Banyuwangi	22,27	11,09	97,17	0,42	0,97	0,25
11 Bondowoso	48,29	9,72	9,10	0,40	0,43	34,69
12 Situbondo	22,49	12,27	2,64	0,22	0,41	61,97
13 Probolinggo	40,09	10,81	1,34	0,60	2,30	45,73
14 Pasuruan	28,10	11,15	1,74	0,91	4,89	54,43
15 Sidoarjo	16,59	36,51	1,52	2,56	8,95	35,90
16 Mojokerto	26,00	21,81	3,24	0,64	5,48	43,54
17 Jombang	33,94	19,28	1,11	0,98	1,99	43,95
18 Nganjuk	36,93	10,77	75,98	0,65	0,90	5,66
19 Madiun	35,43	16,87	1,82	0,30	1,73	44,31
20 Magetan	31,87	18,23	1,96	0,21	1,30	46,53
21 Ngawi	41,77	15,87	0,54	0,12	1,97	40,14
22 Bojonegoro	35,39	10,03	51,82	0,80	0,70	5,40
23 Tuban	31,44	8,26	3,39	0,36	2,19	56,08
24 Lamongan	30,64	10,95	88,73	0,78	1,91	3,68
25 Gresik	24,19	22,67	0,60	1,05	11,15	41,25
26 Bangkalan	17,58	4,36	7,11	0,03	0,63	70,61
27 Sampang	23,19	6,50	0,07	-	0,09	64,16
28 Pamekasan	39,66	8,55	2,11	0,50	0,53	48,78
29 Sumenep	29,60	7,62	59,85	0,38	0,25	5,88
<b>Kota</b>						
71 Kota Kediri	30,56	20,21	12,22	1,47	8,80	28,78
72 Kota Blitar	21,33	19,26	64,34	2,13	1,64	5,43
73 Kota Malang	18,49	35,65	1,05	2,85	3,78	40,17
74 Kota Probolinggo	30,58	27,57	0,87	1,04	9,55	31,72
75 Kota Pasuruan	22,79	28,14	65,11	0,82	2,54	8,99
76 Kota Mojokerto	38,40	26,17	36,07	2,05	6,47	6,81
77 Kota Madiun	33,19	31,87	24,04	1,88	2,34	8,40
78 Kota Surabaya	17,50	30,44	4,16	3,36	8,29	38,92
79 Kota Batu	13,02	29,27	1,35	0,56	3,88	51,91
<b>Jawa Timur</b>	<b>27,10</b>	<b>16,07</b>	<b>18,00</b>	<b>0,89</b>	<b>3,01</b>	<b>40,12</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

## II

**(6) Indikator Kesehatan dan Gizi**

Persentase Bayi Usia 12-59 bulan di Jawa Timur yang Mendapatkan Imunisasi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi Tahun 2017

Kabupaten/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten</b>					
1 Pacitan	95,55	94,11	96,20	82,66	94,15
2 Ponorogo	97,36	92,89	96,64	76,30	91,39
3 Trenggalek	97,27	94,72	95,94	82,37	97,68
4 Tulungagung	96,21	87,97	96,62	71,01	87,05
5 Blitar	94,60	89,10	92,54	80,18	91,05
6 Kediri	94,92	92,38	93,57	75,70	94,05
7 Malang	95,09	90,71	92,87	80,13	90,40
8 Lumajang	95,28	89,89	94,10	77,21	88,89
9 Jember	95,27	91,40	95,16	81,89	89,85
10 Banyuwangi	94,21	87,44	89,41	75,51	89,39
11 Bondowoso	84,54	84,36	85,23	70,33	81,06
12 Situbondo	91,22	85,78	91,27	69,01	84,31
13 Probolinggo	87,95	82,12	85,86	68,53	84,27
14 Pasuruan	89,29	79,35	88,89	62,55	75,05
15 Sidoarjo	95,65	86,82	91,49	77,35	85,63
16 Mojokerto	98,17	94,66	96,21	70,43	95,31
17 Jombang	96,00	92,43	94,30	82,01	94,73
18 Nganjuk	98,77	95,78	96,78	87,62	97,39
19 Madiun	93,33	91,48	95,17	80,45	93,32
20 Magetan	92,87	87,59	92,87	75,69	90,76
21 Ngawi	95,14	87,54	94,23	76,84	87,90
22 Bojonegoro	97,25	92,56	94,91	76,54	91,51
23 Tuban	93,89	85,53	91,71	71,67	85,30
24 Lamongan	95,77	91,68	93,56	78,43	87,14
25 Gresik	94,19	95,04	93,24	75,60	91,13
26 Bangkalan	73,77	59,53	66,17	50,24	55,43
27 Sampang	60,16	55,60	60,87	42,39	50,90
28 Pamekasan	77,26	65,91	71,37	50,48	60,94
29 Sumenep	76,91	66,02	77,90	54,53	65,62
<b>Kota</b>					
71 Kediri	98,44	90,22	95,25	79,13	88,55
72 Blitar	99,20	95,70	95,97	76,47	96,77
73 Malang	97,64	95,61	97,64	75,63	93,89
74 Probolinggo	95,08	90,77	93,02	75,69	92,79
75 Pasuruan	97,40	91,28	94,51	76,23	93,84
76 Mojokerto	97,02	95,53	96,75	83,50	97,02
77 Madiun	94,57	96,03	94,07	88,17	97,51
78 Surabaya	93,79	84,12	89,38	70,07	83,02
79 Batu	94,07	88,64	91,82	79,27	89,66
<b>Jawa Timur</b>	<b>92,31</b>	<b>86,57</b>	<b>90,41</b>	<b>73,26</b>	<b>85,84</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

## II

**(7) Indikator Kesehatan dan Gizi**

Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Menurut Penolong Persalinan dan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Dokter Kandungan	Dokter	Bidan	Perawat	Tenaga Kesehatan Lain	Dukun Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Kabupaten</b>							
1 Pacitan	48,73	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Ponorogo	40,40	1,37	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trenggalek	32,63	2,61	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Tulungagung	25,07	0,00	72,33	2,60	0,00	0,00	0,00
5 Blitar	35,62	0,56	60,51	3,31	0,00	0,00	0,00
6 Kediri	26,34	2,77	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Malang	40,14	0,72	57,45	0,97	0,00	0,00	0,73
8 Lumajang	27,46	0,00	69,19	0,00	1,41	1,94	0,00
9 Jember	25,87	1,28	66,21	1,47	5,17	0,00	0,00
10 Banyuwangi	17,37	0,00	79,04	3,59	0,00	0,00	0,00
11 Bondowoso	9,89	0,00	81,90	0,00	8,21	0,00	0,00
12 Situbondo	13,87	2,15	79,14	0,00	4,84	0,00	0,00
13 Probolinggo	24,30	2,36	70,59	0,58	1,21	0,96	0,00
14 Pasuruan	29,19	1,04	63,88	0,00	5,90	0,00	0,00
15 Sidoarjo	54,28	0,85	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Mojokerto	34,85	0,00	63,46	1,70	0,00	0,00	0,00
17 Jombang	46,12	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Nganjuk	36,79	2,31	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Madiun	41,77	0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Magetan	37,41	3,60	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Ngawi	34,16	0,00	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bojonegoro	24,93	2,13	69,66	0,00	2,20	1,08	0,00
23 Tuban	41,37	0,00	57,91	0,72	0,00	0,00	0,00
24 Lamongan	46,50	0,00	52,28	1,21	0,00	0,00	0,00
25 Gresik	47,79	5,54	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Bangkalan	16,17	6,34	63,02	0,00	14,47	0,00	0,00
27 Sampang	15,73	0,00	64,72	0,00	18,64	0,91	0,00
28 Pamekasan	16,16	0,00	69,41	0,00	11,53	2,90	0,00
29 Sumenep	10,16	4,58	63,47	0,00	21,79	0,00	0,00
<b>Kota</b>							
71 Kediri	56,43	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Blitar	42,22	0,00	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Malang	57,70	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Probolinggo	33,17	0,00	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Pasuruan	30,16	0,00	67,76	2,08	0,00	0,00	0,00
76 Mojokerto	48,20	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Madiun	58,49	3,33	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Surabaya	51,14	0,39	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Batu	54,65	5,72	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jawa Timur</b>	<b>34,68</b>	<b>1,18</b>	<b>60,83</b>	<b>0,62</b>	<b>2,43</b>	<b>0,22</b>	<b>0,04</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

## II

**(8) Indikator Kesehatan dan Gizi**

Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Menurut Penolong Persalinan dan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Dokter Kandungan	Dokter	Bidan	Perawat	Tenaga Kesehatan Lain	Dukun Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Kabupaten</b>							
1 Pacitan	34,00	0,00	61,28	3,00	1,72	0,00	0,00
2 Ponorogo	32,15	0,51	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trenggalek	52,37	4,23	42,04	1,36	0,00	0,00	0,00
4 Tulungagung	46,95	0,00	51,29	1,77	0,00	0,00	0,00
5 Blitar	31,38	2,01	64,06	1,05	1,50	0,00	0,00
6 Kediri	39,16	1,33	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Malang	31,71	1,64	64,73	0,00	1,92	0,00	0,00
8 Lumajang	16,78	4,01	71,10	1,25	4,82	2,03	0,00
9 Jember	31,12	1,48	59,77	0,00	4,73	1,98	0,91
10 Banyuwangi	24,97	2,00	70,74	0,00	1,96	0,00	0,34
11 Bondowoso	32,28	0,00	59,10	1,59	7,04	0,00	0,00
12 Situbondo	29,26	3,98	61,40	1,75	3,60	0,00	0,00
13 Probolinggo	26,79	1,06	64,82	2,95	3,81	0,00	0,57
14 Pasuruan	25,99	2,51	66,74	2,18	2,58	0,00	0,00
15 Sidoarjo	54,48	1,65	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Mojokerto	45,59	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Jombang	37,83	1,37	57,66	2,11	0,00	1,03	0,00
18 Nganjuk	21,66	1,10	71,62	4,62	1,00	0,00	0,00
19 Madiun	29,40	4,35	63,60	2,65	0,00	0,00	0,00
20 Magetan	47,26	0,55	51,32	0,00	0,86	0,00	0,00
21 Ngawi	39,53	5,96	51,11	2,80	0,61	0,00	0,00
22 Bojonegoro	32,85	2,96	63,04	1,14	0,00	0,00	0,00
23 Tuban	32,35	3,37	62,42	0,00	1,86	0,00	0,00
24 Lamongan	55,92	2,54	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Gresik	46,22	2,66	49,97	1,15	0,00	0,00	0,00
26 Bangkalan	11,64	2,78	75,24	0,00	10,33	0,00	0,00
27 Sampang	15,98	1,13	69,83	0,00	13,06	0,00	0,00
28 Pamekasan	14,82	0,00	69,21	0,18	15,79	0,00	0,00
29 Sumenep	16,53	4,63	66,21	0,00	12,63	0,00	0,00
<b>Kota</b>							
71 Kediri	58,37	0,00	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Blitar	37,27	3,06	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Malang	63,37	0,00	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Probolinggo	19,85	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Pasuruan	34,22	1,63	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Mojokerto	42,36	2,55	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Madiun	40,24	0,00	59,17	0,59	0,00	0,00	0,00
78 Surabaya	44,52	1,42	51,73	0,00	2,33	0,00	0,00
79 Batu	52,56	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jawa Timur</b>	<b>34,70</b>	<b>1,86</b>	<b>59,48</b>	<b>0,78</b>	<b>2,86</b>	<b>0,22</b>	<b>0,09</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

## II

**(9) Indikator Kesehatan dan Gizi**

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

Kabupaten/Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/Bidan	Klinik/Praktek Dokter Bersama	Puskesmas / Pustu	UKBM	Praktek Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kabupaten</b>								
1 Pacitan	4,14	2,05	56,23	6,18	28,55	5,88	1,21	1,69
2 Ponorogo	4,02	6,27	52,54	1,59	29,17	9,97	0,91	0,47
3 Trenggalek	4,25	2,71	60,69	7,65	25,45	3,23	1,19	0,00
4 Tulungagung	5,52	9,53	54,95	6,55	25,87	0,85	2,25	0,00
5 Blitar	5,68	5,48	61,30	8,72	18,57	3,78	3,48	2,50
6 Kediri	3,58	7,47	56,40	12,27	19,86	1,39	2,53	0,21
7 Mlang	6,50	8,34	55,67	8,45	20,80	5,62	2,25	0,49
8 Lumajang	4,87	3,14	66,36	8,40	16,99	4,14	2,57	1,07
9 Jember	2,50	2,46	71,26	7,48	16,54	1,42	2,86	0,34
10 Banyuwangi	2,43	5,64	65,42	7,90	21,41	2,42	2,57	0,38
11 Bondowoso	4,22	2,73	61,38	6,04	19,47	7,83	2,64	1,77
12 Situbondo	5,47	4,66	58,69	7,92	23,46	2,61	1,75	2,09
13 Probolinggo	3,15	2,65	68,14	2,40	23,50	4,89	2,75	0,63
14 Pasuruan	3,91	3,65	57,78	8,54	24,41	3,29	1,43	0,16
15 Sidoarjo	13,34	11,02	32,21	20,28	23,66	1,50	2,26	0,76
16 Mojokerto	4,82	4,85	54,03	13,51	20,26	4,51	1,73	0,13
17 Jombang	4,62	6,56	49,16	11,46	22,86	6,80	2,63	0,86
18 Nganjuk	5,31	3,33	48,79	11,44	29,59	3,09	1,31	1,05
19 Madiun	13,13	2,64	48,67	10,61	28,19	2,14	0,49	0,15
20 Magetan	9,12	3,05	57,01	6,23	28,02	1,80	3,36	0,40
21 Ngawi	7,11	3,41	60,84	6,87	17,37	7,11	2,58	0,74
22 Bojonegoro	2,46	2,71	57,12	6,57	23,63	7,93	2,19	0,33
23 Tuban	5,04	3,75	60,32	12,88	17,68	3,32	0,78	4,60
24 Lamongan	4,42	4,95	64,50	7,75	17,94	1,79	2,91	2,12
25 Gresik	10,12	17,52	36,48	9,97	26,91	3,73	1,91	0,00
26 Bangkalan	5,11	1,17	60,78	4,74	21,55	5,88	0,40	1,57
27 Sampang	3,90	0,63	73,87	4,26	16,40	4,53	1,99	0,00
28 Pamekasan	5,39	1,37	47,44	2,16	20,55	22,71	3,73	2,78
29 Sumenep	6,86	1,44	34,27	6,07	24,13	18,29	1,66	9,88
<b>Kota</b>								
71 Kediri	10,53	5,48	41,94	13,80	29,05	0,48	0,82	0,38
72 Blitar	6,97	4,19	42,95	6,24	39,34	2,57	3,59	1,17
73 Malang	8,68	14,46	42,32	12,09	26,47	0,75	1,89	0,20
74 Probolinggo	7,29	1,62	48,93	10,47	39,85	0,33	5,00	0,00
75 Pasuruan	8,19	1,53	44,72	8,33	42,77	2,35	1,10	0,00
76 Mojokerto	9,08	12,49	29,00	7,12	46,39	0,34	0,10	0,00
77 Madiun	18,94	3,98	38,68	9,36	31,87	0,26	1,20	0,00
78 Surabaya	13,24	15,07	29,04	16,40	28,60	0,60	1,08	0,74
79 Batu	6,41	19,08	38,34	5,06	23,56	8,82	4,82	1,39
<b>Jawa Timur</b>	<b>6,11</b>	<b>6,06</b>	<b>54,10</b>	<b>9,34</b>	<b>23,04</b>	<b>4,09</b>	<b>2,10</b>	<b>0,96</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

## II

**(10) Indikator Kesehatan dan Gizi**

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

Kabupaten/Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/Bidan	Klinik/Praktek Dokter Bersama	Puskesmas/Pustu	UKBM	Praktek Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kabupaten</b>								
1 Pacitan	7,61	2,96	56,77	9,86	23,50	4,53	1,52	0,00
2 Ponorogo	3,45	3,14	52,55	12,45	18,41	12,61	0,54	0,51
3 Trenggalek	5,62	0,76	60,13	14,45	22,12	1,48	1,26	0,45
4 Tulungagung	7,02	8,19	52,96	11,70	22,20	2,82	1,58	1,01
5 Blitar	7,20	3,05	64,49	6,61	16,56	2,07	3,00	1,75
6 Kediri	5,75	9,55	42,40	15,44	27,97	2,82	2,75	0,62
7 Malang	3,17	11,44	54,97	10,32	17,41	7,31	1,28	0,68
8 Lumajang	2,76	1,90	53,25	7,11	23,38	15,21	10,23	0,97
9 Jember	3,82	3,50	64,61	7,82	18,62	0,97	1,98	1,33
10 Banyuwangi	2,85	7,13	55,87	10,37	24,32	2,41	2,19	2,45
11 Bondowoso	2,35	4,09	59,39	5,52	23,49	10,80	1,11	0,00
12 Situbondo	9,16	5,82	55,27	12,43	20,70	2,49	2,32	0,91
13 Probolinggo	4,96	1,75	57,64	7,49	22,31	4,19	6,05	0,42
14 Pasuruan	4,57	5,52	49,14	12,12	26,67	3,69	1,76	0,81
15 Sidoarjo	8,96	16,09	30,07	21,39	29,40	1,88	0,87	0,16
16 Mojokerto	6,54	9,10	48,57	15,39	21,48	4,87	3,33	1,18
17 Jombang	5,62	5,21	47,30	14,21	28,41	2,92	2,52	1,09
18 Nganjuk	9,92	2,06	36,68	14,85	29,20	5,51	1,80	1,50
19 Madiun	9,09	2,06	49,44	4,37	29,87	5,80	1,55	2,44
20 Magetan	7,56	3,22	51,64	9,61	30,52	2,61	0,85	1,16
21 Ngawi	10,16	4,46	46,72	11,00	27,43	3,74	1,87	0,00
22 Bojonegoro	4,05	4,06	49,86	8,74	25,91	9,78	2,19	1,51
23 Tuban	5,42	3,86	62,37	8,51	21,14	1,38	3,86	0,43
24 Lamongan	8,44	6,92	59,87	7,52	17,31	3,30	1,45	0,43
25 Gresik	5,51	16,22	33,83	18,40	24,59	4,66	0,81	0,00
26 Bangkalan	6,36	0,96	57,94	7,38	22,02	5,98	2,14	0,51
27 Sampang	1,83	0,13	74,07	3,08	24,27	1,73	1,82	0,85
28 Pamekasan	3,73	1,55	44,30	3,87	32,33	15,69	2,36	1,53
29 Sumenep	2,87	2,82	45,02	6,90	29,21	15,52	2,91	5,01
<b>Kota</b>								
71 Kediri	12,12	7,01	27,31	14,92	39,14	1,75	0,00	0,00
72 Blitar	5,10	5,42	35,70	20,19	34,86	1,27	0,83	0,87
73 Malang	7,31	18,09	32,77	13,60	30,53	0,50	3,02	1,52
74 Probolinggo	8,03	4,01	43,26	12,50	42,10	0,00	0,62	1,14
75 Pasuruan	5,43	1,41	39,56	13,59	46,84	0,84	0,99	0,00
76 Mojokerto	5,56	17,28	17,64	10,32	50,50	1,20	0,95	0,00
77 Madiun	21,46	5,48	14,16	13,61	47,50	0,00	2,01	0,00
78 Surabaya	13,69	14,02	14,11	28,80	30,72	1,73	0,38	0,70
79 Batu	7,24	13,55	45,40	10,47	19,40	4,35	3,14	0,20
<b>Jawa Timur</b>	<b>6,12</b>	<b>6,87</b>	<b>48,64</b>	<b>12,18</b>	<b>24,91</b>	<b>4,49</b>	<b>2,08</b>	<b>0,97</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

## IV

## (1) Ketenagakerjaan

Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015, 2017, dan 2018

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja			TPT (%)		
	2015	2017	2018	2015	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
<b>Kabupaten</b>						
1 Pacitan	353.172	352,292	353,845	0,97	0,85	1,43
2 Ponorogo	485.245	506,848	505,25	3,68	3,76	3,87
3 Trenggalek	404.547	392,417	416,509	2,46	3,48	4,17
4 Tulungagung	547.466	537,081	569,31	3,95	2,27	2,61
5 Blitar	597.639	638,135	638,46	2,79	2,99	3,37
6 Kediri	800.894	853,996	818,385	5,02	3,18	4,25
7 Malang	1.292.343	1.318.611	1.399.610	4,95	4,60	3,24
8 Lumajang	532.005	515,516	553,923	2,60	2,91	2,55
9 Jember	1.173.139	1.281.242	1.276.672	4,77	5,16	4,09
10 Banyuwangi	893.816	906,735	903,356	2,55	3,07	3,67
11 Bondowoso	424.851	444,322	436,53	1,75	2,09	3,90
12 Situbondo	364.834	383,017	390,266	3,57	1,49	1,92
13 Probolinggo	601.681	590,934	612,763	2,51	2,89	4,15
14 Pasuruan	815.028	819,322	864,53	6,41	4,97	6,11
15 Sidoarjo	1.083.519	1.075.359	1.094.650	6,30	4,97	4,73
16 Mojokerto	575.330	620,659	616,733	4,05	5,00	4,27
17 Jombang	647.442	664,389	674,153	6,11	5,14	4,64
18 Nganjuk	516.973	504,159	555,941	2,10	3,23	2,64
19 Madiun	351.752	349,665	376,948	6,99	3,19	3,81
20 Magetan	352.826	390,608	393,126	6,05	3,80	3,92
21 Ngawi	431.031	436,255	499,104	3,99	5,76	3,83
22 Bojonegoro	640.266	690,739	661,169	5,01	3,64	4,19
23 Tuban	603.039	653,981	659,499	3,03	3,39	2,83
24 Lamongan	633.048	638,33	634,845	4,10	4,12	3,17
25 Gresik	611.721	662,618	664,523	5,67	4,54	5,82
26 Bangkalan	481.352	482,634	494,269	5,00	4,48	5,25
27 Sampang	459.000	477,731	472,634	2,51	2,48	2,41
28 Pamekasan	444.281	463,401	458,086	4,26	3,91	2,92
29 Sumenep	593.143	629,884	619,659	2,07	1,83	1,79
<b>Kota</b>						
71 Kediri	142.628	144,688	145,556	8,46	4,68	3,63
72 Blitar	75.516	77,674	78,82	3,80	3,76	4,06
73 Malang	406.935	443,035	454,849	7,28	7,22	6,79
74 Probolinggo	109.336	118,848	115,74	4,01	3,42	3,64
75 Pasuruan	97.493	99,493	99,297	5,57	4,64	4,55
76 Mojokerto	67.079	67,235	68,512	4,88	3,61	2,45
77 Madiun	90.721	94,435	90,358	5,10	4,26	3,85
78 Surabaya	1.468.094	1.495.837	1.520.041	7,01	5,98	6,12
79 Batu	105.496	115,591	112,502	4,29	2,26	3,12
<b>Jawa Timur</b>	<b>20.274.681</b>	<b>20.937.716</b>	<b>21.300.423</b>	<b>4,47</b>	<b>4,00</b>	<b>3,99</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



## IV

## (2) Ketenagakerjaan

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Buruh/Karyawan Menurut kabupaten/Kota Tahun 2015, 2017, dan 2018

Kabupaten/Kota	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Buruh/Karyawan		
	2015	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kabupaten</b>			
1 Pacitan	1.198.246	1.804.322	1.918.550
2 Ponorogo	1.411.937	1.935.854	1.912.086
3 Trenggalek	1.056.403	1.910.816	1.819.027
4 Tulungagung	1.301.805	1.653.325	1.833.832
5 Blitar	1.195.167	1.716.534	1.975.636
6 Kediri	1.263.646	1.792.160	1.837.409
7 Malang	1.247.118	1.827.365	2.095.671
8 Lumajang	918.805	1.735.151	1.763.308
9 Jember	1.007.079	1.756.515	1.825.153
10 Banyuwangi	1.207.374	1.823.922	1.991.869
11 Bondowoso	1.177.920	1.644.220	1.722.175
12 Situbondo	948.439	1.699.402	1.690.486
13 Probolinggo	1.258.387	1.549.443	1.562.340
14 Pasuruan	1.607.026	2.277.858	2.343.261
15 Sidoarjo	2.402.298	3.170.837	3.405.633
16 Mojokerto	1.761.486	2.359.871	2.487.804
17 Jombang	1.737.968	1.874.181	2.040.540
18 Nganjuk	1.223.948	1.730.621	1.846.416
19 Madiun	1.550.334	1.896.412	2.231.457
20 Magetan	1.979.090	2.898.652	3.000.466
21 Ngawi	1.830.873	2.050.830	2.018.444
22 Bojonegoro	1.688.996	1.724.977	1.927.376
23 Tuban	1.197.506	1.952.149	2.185.323
24 Lamongan	1.507.459	2.044.879	2.200.074
25 Gresik	2.507.632	2.982.504	3.198.454
26 Bangkalan	1.379.467	1.962.612	1.959.636
27 Sampang	1.122.769	1.635.037	1.595.449
28 Pamekasan	1.253.606	1.785.302	1.729.645
29 Sumenep	851.582	1.884.273	1.749.221
<b>Kota</b>			
71 Kediri	1.605.830	1.989.205	2.047.677
72 Blitar	2.081.554	2.124.682	2.017.883
73 Malang	1.991.809	2.467.752	2.820.691
74 Probolinggo	1.940.982	2.320.189	2.449.397
75 Pasuruan	1.751.459	2.165.440	2.522.111
76 Mojokerto	2.105.254	2.619.077	2.854.560
77 Madiun	1.634.206	2.905.719	2.541.632
78 Surabaya	2.197.552	2.930.354	3.225.489
79 Batu	1.536.004	1.982.758	1.932.109
<b>Jawa Timur</b>	<b>1.676.543</b>	<b>2.238.587</b>	<b>2.398.992</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

**(1) Perumahan dan Lingkungan**

Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2018

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan (%)					
	Lantai Bukan Tanah		Atap Beton, Genteng, Sirap, Seng, Asbes		Dinding Tembok dan Kayu	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Kabupaten</b>						
1 Pacitan	88,81	88,74	100,00	100,00	94,78	96,61
2 Ponorogo	88,26	92,58	100,00	100,00	95,93	98,84
3 Trenggalek	92,42	93,46	100,00	100,00	96,98	99,07
4 Tulungagung	94,13	96,28	99,82	100,00	95,61	99,46
5 Blitar	95,58	95,98	100,00	100,00	95,70	99,94
6 Kediri	95,04	96,21	100,00	100,00	99,05	99,90
7 Malang	93,27	95,39	99,83	100,00	95,92	99,68
8 Lumajang	97,08	97,86	100,00	99,95	93,33	99,03
9 Jember	94,00	95,08	99,89	100,00	88,92	99,90
10 Banyuwangi	93,27	95,45	99,91	100,00	91,60	99,91
11 Bondowoso	85,22	84,90	100,00	100,00	77,67	97,80
12 Situbondo	81,90	80,74	99,84	99,76	83,82	95,97
13 Probolinggo	80,56	80,06	99,94	100,00	86,85	92,81
14 Pasuruan	93,04	94,99	100,00	100,00	97,57	99,78
15 Sidoarjo	99,83	99,25	99,77	100,00	99,58	99,94
16 Mojokerto	93,89	93,63	100,00	100,00	95,18	99,86
17 Jombang	92,83	93,63	99,53	100,00	97,35	100,00
18 Nganjuk	83,65	85,10	100,00	100,00	98,69	99,44
19 Madiun	86,51	85,18	100,00	100,00	97,68	98,24
20 Magetan	97,37	97,54	100,00	100,00	100,00	100,00
21 Ngawi	61,70	65,43	100,00	99,83	96,05	99,66
22 Bojonegoro	61,06	59,86	100,00	99,55	94,26	98,97
23 Tuban	76,81	77,94	100,00	100,00	93,38	98,85
24 Lamongan	86,34	90,29	99,84	100,00	94,11	99,45
25 Gresik	97,91	96,45	100,00	99,75	99,72	98,89
26 Bangkalan	87,42	86,45	98,60	100,00	84,80	96,58
27 Sampang	68,34	73,44	100,00	100,00	87,67	93,11
28 Pamekasan	82,60	81,33	100,00	100,00	82,71	95,70
29 Sumenep	92,17	95,18	99,55	99,89	93,95	99,82
<b>Kota</b>						
71 Kediri	98,78	98,54	100,00	100,00	100,00	99,70
72 Blitar	99,44	100,00	100,00	100,00	99,04	100,00
73 Malang	99,25	99,13	100,00	99,13	99,11	99,79
74 Probolinggo	100,00	98,90	100,00	100,00	99,04	100,00
75 Pasuruan	99,39	98,53	100,00	100,00	99,17	100,00
76 Mojokerto	99,61	99,48	100,00	100,00	97,46	99,73
77 Madiun	99,39	98,34	100,00	100,00	99,31	100,00
78 Surabaya	99,80	98,87	99,66	99,58	99,61	99,40
79 Batu	97,57	97,58	99,55	99,57	97,96	99,76
<b>Jawa Timur</b>	<b>90,30</b>	<b>91,08</b>	<b>99,87</b>	<b>99,91</b>	<b>94,56</b>	<b>98,95</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

## (2) Perumahan dan Lingkungan

Persentase Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Bersih, Jamban Milik Sendiri Dilengkapi Tangki Septik, Sumber Penerangan Listrik Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2018

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih (%)		Rumah Tangga dengan Jamban Milik Sendiri		Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Kabupaten</b>						
1 Pacitan	56,81	59,56	85,67	89,40	99,85	99,56
2 Ponorogo	81,71	85,55	81,99	84,38	99,76	99,77
3 Trenggalek	58,58	59,21	73,82	75,56	100,00	100,00
4 Tulungagung	84,80	87,56	85,43	86,16	99,90	99,89
5 Blitar	70,52	77,02	80,92	81,22	99,67	100,00
6 Kediri	91,99	93,34	82,95	85,79	99,85	100,00
7 Malang	71,68	67,64	87,36	88,25	99,84	100,00
8 Lumajang	80,57	78,41	73,53	82,13	99,84	100,00
9 Jember	80,81	82,14	58,80	59,57	99,93	99,44
10 Banyuwangi	82,74	81,46	72,78	74,24	100,00	99,87
11 Bondowoso	59,64	65,42	31,10	37,82	100,00	100,00
12 Situbondo	83,10	86,57	38,35	43,56	100,00	100,00
13 Probolinggo	74,30	72,03	50,33	52,15	99,82	99,79
14 Pasuruan	77,29	72,42	71,65	76,17	99,94	100,00
15 Sidoarjo	75,60	76,12	90,42	87,06	100,00	99,91
16 Mojokerto	93,53	90,87	81,07	84,98	100,00	100,00
17 Jombang	94,13	94,34	79,04	84,67	100,00	100,00
18 Nganjuk	91,45	89,54	79,62	78,63	100,00	99,58
19 Madiun	87,64	89,36	84,22	81,52	99,85	99,91
20 Magetan	88,19	86,22	90,30	89,37	100,00	100,00
21 Ngawi	86,64	84,96	76,26	73,83	99,90	99,50
22 Bojonegoro	97,66	92,60	77,53	80,36	100,00	99,67
23 Tuban	87,72	94,59	75,16	74,08	99,51	100,00
24 Lamongan	91,68	94,11	90,76	90,15	100,00	99,85
25 Gresik	93,80	98,92	90,71	91,00	100,00	99,91
26 Bangkalan	82,84	91,59	86,95	88,19	99,94	99,44
27 Sampang	69,34	81,70	68,41	73,28	99,91	99,77
28 Pamekasan	77,83	83,32	66,49	67,09	100,00	100,00
29 Sumenep	90,15	89,08	58,06	62,76	99,74	99,72
<b>Kota</b>						
71 Kediri	98,87	99,59	84,17	86,73	100,00	100,00
72 Blitar	95,54	98,31	87,77	90,37	100,00	100,00
73 Malang	99,80	98,57	80,54	78,34	100,00	100,00
74 Probolinggo	100,00	100,00	78,87	80,71	100,00	100,00
75 Pasuruan	99,86	99,99	74,15	83,15	100,00	100,00
76 Mojokerto	100,00	100,00	87,39	90,06	100,00	100,00
77 Madiun	99,63	99,35	83,49	87,65	100,00	100,00
78 Surabaya	100,00	100,01	74,09	73,34	100,00	99,84
79 Batu	37,37	37,73	95,08	93,86	100,00	99,59
<b>Jawa Timur</b>	<b>83,84</b>	<b>84,55</b>	<b>75,71</b>	<b>77,11</b>	<b>99,92</b>	<b>99,85</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

## VI

**(3) Perumahan dan Lingkungan**

Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal dan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Milik sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas Sewa	Rumah Dinas	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten</b>					
1 Pacitan	94,58	1,25	2,90	0,00	1,27
2 Ponorogo	94,43	0,81	4,75	0,00	0,00
3 Trenggalek	95,40	0,59	3,44	0,13	0,45
4 Tulungagung	93,93	1,63	4,34	0,00	0,11
5 Blitar	93,93	0,73	5,15	0,00	0,18
6 Kediri	93,32	1,18	3,90	1,53	0,07
7 Malang	90,98	2,95	6,03	0,05	0,00
8 Lumajang	93,98	3,39	1,36	0,29	0,97
9 Jember	89,63	1,59	8,08	0,47	0,24
10 Banyuwangi	87,01	2,63	8,95	1,23	0,18
11 Bondowoso	92,29	1,05	5,77	0,46	0,43
12 Situbondo	89,10	2,51	7,50	0,85	0,04
13 Probolinggo	95,99	0,47	3,24	0,08	0,22
14 Pasuruan	89,67	4,39	5,74	0,00	0,21
15 Sidoarjo	79,52	15,92	3,94	0,36	0,27
16 Mojokerto	94,08	3,53	2,24	0,00	0,16
17 Jombang	85,21	3,87	10,56	0,14	0,22
18 Nganjuk	87,52	2,07	10,27	0,00	0,14
19 Madiun	86,73	1,18	11,97	0,13	0,00
20 Magetan	94,48	1,15	4,03	0,19	0,15
21 Ngawi	92,10	0,67	6,81	0,00	0,41
22 Bojonegoro	94,90	0,74	4,09	0,00	0,27
23 Tuban	92,18	2,05	5,13	0,11	0,53
24 Lamongan	92,32	1,44	5,65	0,00	0,59
25 Gresik	83,42	11,60	4,98	0,00	0,00
26 Bangkalan	96,06	1,59	2,35	0,00	0,00
27 Sampang	94,87	0,88	4,08	0,17	0,00
28 Pamekasan	89,87	1,00	8,92	0,00	0,21
29 Sumenep	96,83	0,96	2,21	0,00	0,00
<b>Kota</b>					
71 Kediri	72,63	12,44	14,94	0,00	0,00
72 Blitar	72,90	13,05	13,59	0,27	0,20
73 Malang	65,83	25,59	6,86	0,86	0,86
74 Probolinggo	90,35	5,81	3,22	0,00	0,62
75 Pasuruan	76,54	11,08	10,55	1,83	0,00
76 Mojokerto	67,95	12,25	19,46	0,00	0,35
77 Madiun	66,56	16,24	15,82	1,38	0,00
78 Surabaya	59,05	31,93	7,99	0,10	0,93
79 Batu	84,36	10,14	5,50	0,00	0,00
<b>Jawa Timur</b>	<b>87,46</b>	<b>5,97</b>	<b>6,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



## (1) Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ), Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ), dan Garis Kemiskinan Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten</b>					
1 Pacitan	85,53	15,49	2,86	0,79	239,339
2 Ponorogo	102,06	11,75	1,47	0,28	266,312
3 Trenggalek	91,49	13,24	1,74	0,37	275,426
4 Tulungagung	84,35	8,23	0,98	0,18	304,518
5 Blitar	113,51	9,88	1,53	0,35	272,358
6 Kediri	197,43	12,72	1,66	0,37	272,374
7 Malang	293,74	11,49	1,57	0,33	282,933
8 Lumajang	115,91	11,22	1,62	0,35	258,840
9 Jember	265,10	10,97	1,33	0,29	299,823
10 Banyuwangi	140,45	8,79	1,41	0,34	311,722
11 Bondowoso	114,63	15,00	2,54	0,64	331,975
12 Situbondo	89,68	13,34	1,79	0,39	270,406
13 Probolinggo	240,47	20,98	3,24	0,80	373,569
14 Pasuruan	168,06	10,57	1,56	0,33	306,311
15 Sidoarjo	136,79	6,39	0,95	0,23	394,401
16 Mojokerto	115,38	10,61	1,53	0,35	330,940
17 Jombang	133,32	10,70	1,26	0,25	337,217
18 Nganjuk	127,90	12,25	1,72	0,36	341,653
19 Madiun	85,97	12,69	2,08	0,56	294,451
20 Magetan	69,24	11,03	1,37	0,26	288,246
21 Ngawi	126,65	15,27	2,30	0,52	264,706
22 Bojonegoro	180,99	14,60	2,41	0,54	295,250
23 Tuban	198,35	17,14	3,03	0,82	294,543
24 Lamongan	176,92	14,89	2,40	0,66	321,002
25 Gresik	167,12	13,19	2,19	0,56	393,447
26 Bangkalan	205,71	21,41	4,00	1,13	334,338
27 Sampang	227,80	24,11	4,19	1,05	296,268
28 Pamekasan	142,32	16,70	2,38	0,54	292,631
29 Sumenep	216,14	20,09	2,90	0,75	301,781
<b>Kota</b>					
71 Kediri	23,64	8,40	0,96	0,20	400,096
72 Blitar	9,97	7,18	1,04	0,20	356,147
73 Malang	37,03	4,33	0,54	0,09	426,527
74 Probolinggo	18,37	7,97	0,98	0,20	418,480
75 Pasuruan	14,93	7,62	1,35	0,32	362,224
76 Mojokerto	7,24	5,73	0,62	0,13	364,021
77 Madiun	9,05	5,16	0,94	0,26	376,956
78 Surabaya	161,01	5,63	0,92	0,25	438,283
79 Batu	9,05	4,48	0,55	0,11	398,401
<b>Jawa Timur</b>	<b>4.703,30</b>	<b>12,05</b>	<b>1,98</b>	<b>0,47</b>	<b>321,761</b>

Sumber: BPS Republik Indonesia

## VII

## (2) Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ), Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ), dan Garis Kemiskinan Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	$P_1$	$P_2$	Garis Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten</b>					
1 Pacitan	85,26	15,42	2,14	0,48	250,942
2 Ponorogo	99,03	11,39	1,41	0,27	279,168
3 Trenggalek	89,77	12,96	1,71	0,40	288,779
4 Tulungagung	82,80	8,04	0,82	0,16	314,532
5 Blitar	112,93	9,80	1,16	0,22	285,474
6 Kediri	191,08	12,25	1,75	0,39	281,012
7 Malang	283,96	11,04	1,83	0,43	294,904
8 Lumajang	112,65	10,87	1,60	0,37	267,366
9 Jember	266,90	11,00	1,33	0,28	310,650
10 Banyuwangi	138,54	8,64	1,15	0,24	319,236
11 Bondowoso	111,66	14,54	2,11	0,48	343,124
12 Situbondo	88,23	13,05	1,77	0,38	276,924
13 Probolinggo	236,72	20,52	3,34	0,84	384,343
14 Pasuruan	165,64	10,34	1,67	0,44	315,145
15 Sidoarjo	135,42	6,23	1,05	0,25	414,479
16 Mojokerto	111,79	10,19	1,70	0,46	345,487
17 Jombang	131,16	10,48	1,63	0,39	353,456
18 Nganjuk	125,52	11,98	1,73	0,40	358,216
19 Madiun	83,43	12,28	2,65	0,78	306,769
20 Magetan	65,87	10,48	1,53	0,37	297,874
21 Ngawi	123,76	14,91	1,98	0,40	277,539
22 Bojonegoro	178,25	14,34	2,31	0,52	309,564
23 Tuban	196,10	16,87	3,29	0,91	308,822
24 Lamongan	171,38	14,42	2,53	0,66	335,783
25 Gresik	164,08	12,80	2,51	0,71	414,261
26 Bangkalan	206,53	21,32	3,49	0,91	349,073
27 Sampang	225,13	23,56	3,32	0,72	307,606
28 Pamekasan	137,77	16,00	1,66	0,33	302,431
29 Sumenep	211,92	19,62	1,78	0,23	313,330
<b>Kota</b>					
71 Kediri	24,07	8,49	0,99	0,19	420,712
72 Blitar	11,22	8,03	0,93	0,24	383,021
73 Malang	35,89	4,17	0,56	0,12	454,061
74 Probolinggo	18,23	7,84	0,92	0,18	437,392
75 Pasuruan	14,85	7,53	0,58	0,09	378,593
76 Mojokerto	7,28	5,73	0,67	0,13	391,489
77 Madiun	8,70	4,94	0,61	0,13	404,959
78 Surabaya	154,71	5,39	1,10	0,33	474,365
79 Batu	8,77	4,31	0,59	0,12	424,354
<b>Jawa Timur</b>	<b>4.617,01</b>	<b>11,77</b>	<b>1,87</b>	<b>0,45</b>	<b>342,092</b>

Sumber: BPS Republik Indonesia



### (3) Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ), Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ), dan Garis Kemiskinan Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	$P_1$	$P_2$	Garis Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten</b>					
1 Pacitan	78,64	14,19	1,73	0,32	268,592
2 Ponorogo	90,22	10,36	1,30	0,26	297,467
3 Trenggalek	83,50	12,02	1,85	0,42	308,644
4 Tulungagung	75,23	7,27	0,98	0,21	328,640
5 Blitar	112,40	9,72	1,33	0,28	305,440
6 Kediri	177,20	11,31	1,71	0,39	294,098
7 Malang	268,49	10,37	1,67	0,39	314,550
8 Lumajang	103,69	9,98	1,38	0,31	281,461
9 Jember	243,42	9,98	1,45	0,33	324,174
10 Banyuwangi	125,50	7,80	1,40	0,35	339,891
11 Bondowoso	110,98	14,39	2,12	0,51	363,443
12 Situbondo	80,27	11,82	1,49	0,31	294,209
13 Probolinggo	217,06	18,71	3,42	0,91	402,532
14 Pasuruan	152,48	9,45	1,50	0,37	331,057
15 Sidoarjo	125,75	5,69	1,03	0,31	437,899
16 Mojokerto	111,55	10,08	1,81	0,48	370,610
17 Jombang	120,19	9,56	1,34	0,30	374,895
18 Nganjuk	127,28	12,11	2,07	0,53	388,186
19 Madiun	77,75	11,42	1,60	0,34	327,536
20 Magetan	64,86	10,31	1,16	0,20	319,909
21 Ngawi	123,09	14,83	1,96	0,40	301,158
22 Bojonegoro	163,94	13,16	1,87	0,39	330,544
23 Tuban	178,64	15,31	2,55	0,65	328,268
24 Lamongan	164,00	13,80	2,83	0,86	360,444
25 Gresik	154,02	11,89	1,79	0,45	438,704
26 Bangkalan	191,33	19,59	3,57	1,00	369,455
27 Sampang	204,82	21,21	3,06	0,64	325,825
28 Pamekasan	125,76	14,47	1,70	0,32	317,144
29 Sumenep	218,60	20,16	3,57	1,15	340,033
<b>Kota</b>					
71 Kediri	21,90	7,68	0,87	0,18	453,807
72 Blitar	10,47	7,44	1,05	0,31	425,832
73 Malang	35,49	4,10	0,55	0,11	507,114
74 Probolinggo	16,90	7,20	0,89	0,17	479,267
75 Pasuruan	13,45	6,77	0,90	0,19	415,171
76 Mojokerto	7,04	5,50	0,59	0,10	437,231
77 Madiun	7,92	4,49	0,31	0,04	446,525
78 Surabaya	140,81	4,88	0,81	0,20	530,178
79 Batu	7,98	3,89	0,55	0,12	467,073
<b>Jawa Timur</b>	<b>4.332,59</b>	<b>10,98</b>	<b>1,94</b>	<b>0,50</b>	<b>373,574</b>

Sumber: BPS Republik Indonesia

## VII

## (4) Kemiskinan

Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Tahun 2016-2018

Kabupaten/Kota	2016		2017		2018	
	15-24 Tahun	15-55 Tahun	15-24 Tahun	15-55 Tahun	15-24 Tahun	15-55 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Kabupaten</b>						
1 Pacitan	99,32	98,71	100,00	96,64	100,00	100,00
2 Ponorogo	100,00	96,87	100,00	93,42	100,00	99,67
3 Trenggalek	100,00	99,29	100,00	93,99	100,00	97,62
4 Tulungagung	100,00	99,00	100,00	94,79	94,48	97,68
5 Blitar	96,86	96,25	100,00	95,42	100,00	89,59
6 Kediri	100,00	96,63	100,00	96,03	98,38	95,15
7 Malang	98,12	96,52	100,00	99,43	100,00	96,87
8 Lumajang	97,52	92,61	100,00	95,19	98,01	93,10
9 Jember	97,13	94,22	100,00	91,48	100,00	91,28
10 Banyuwangi	100,00	92,31	100,00	91,90	100,00	92,64
11 Bondowoso	96,25	87,53	97,43	91,54	100,00	90,70
12 Situbondo	100,00	86,18	100,00	86,60	100,00	91,26
13 Probolinggo	99,05	89,35	100,00	90,82	100,00	91,50
14 Pasuruan	100,00	96,39	100,00	94,52	100,00	93,05
15 Sidoarjo	100,00	98,79	100,00	96,98	100,00	98,27
16 Mojokerto	100,00	99,47	100,00	98,54	100,00	100,00
17 Jombang	100,00	96,30	96,12	95,82	100,00	98,51
18 Nganjuk	100,00	97,65	97,38	97,14	100,00	98,25
19 Madiun	100,00	92,43	100,00	96,51	100,00	97,59
20 Magetan	100,00	95,03	100,00	98,09	100,00	100,00
21 Ngawi	100,00	92,19	100,00	96,22	100,00	96,32
22 Bojonegoro	100,00	96,58	100,00	94,52	97,39	92,76
23 Tuban	98,90	93,60	100,00	92,63	97,44	94,64
24 Lamongan	100,00	96,78	100,00	97,82	100,00	99,05
25 Gresik	100,00	99,54	100,00	100,00	100,00	100,00
26 Bangkalan	100,00	87,01	100,00	90,31	100,00	88,57
27 Sampang	96,65	82,17	98,36	85,83	98,87	88,94
28 Pamekasan	98,85	88,38	98,37	87,99	100,00	95,36
29 Sumenep	100,00	89,14	97,17	85,09	100,00	85,90
<b>Kota</b>						
71 Kediri	88,16	97,11	100,00	98,41	100,00	97,28
72 Blitar	100,00	100,00	100,00	97,24	100,00	98,94
73 Malang	100,00	96,00	100,00	96,76	100,00	100,00
74 Probolinggo	100,00	100,00	100,00	100,00	98,70	96,27
75 Pasuruan	100,00	100,00	100,00	97,70	100,00	99,23
76 Mojokerto	100,00	100,00	100,00	100,00	97,12	99,19
77 Madiun	100,00	94,25	100,00	93,85	100,00	100,00
78 Surabaya	100,00	98,29	100,00	98,32	100,00	97,78
79 Batu	100,00	98,93	100,00	100,00	100,00	97,88
<b>Jawa Timur</b>	<b>99,14</b>	<b>93,88</b>	<b>99,50</b>	<b>93,87</b>	<b>99,58</b>	<b>94,48</b>

Sumber: BPS Republik Indonesia



## VII

## (5) Kemiskinan

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Tahun 2016-2018

Kabupaten/Kota	2016		2017		2018	
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Kabupaten</b>						
1 Pacitan	100,00	90,26	100,00	87,47	100,00	100,00
2 Ponorogo	100,00	92,59	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Trenggalek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	84,16
4 Tulungagung	100,00	94,66	100,00	88,62	100,00	100,00
5 Blitar	100,00	100,00	97,07	100,00	100,00	95,35
6 Kediri	94,24	94,61	99,38	100,00	100,00	98,47
7 Malang	100,00	87,80	97,02	89,05	100,00	100,00
8 Lumajang	92,95	100,00	94,55	94,49	97,21	90,10
9 Jember	97,92	90,45	100,00	86,70	100,00	86,38
10 Banyuwangi	100,00	73,70	100,00	100,00	100,00	90,77
11 Bondowoso	100,00	88,14	100,00	100,00	97,38	99,84
12 Situbondo	89,87	83,86	92,50	86,40	94,47	94,74
13 Probolinggo	96,94	100,00	98,55	74,65	98,40	91,35
14 Pasuruan	100,00	96,28	100,00	94,74	95,60	85,83
15 Sidoarjo	100,00	94,25	100,00	91,29	100,00	100,00
16 Mojokerto	98,82	87,84	100,00	85,42	100,00	86,86
17 Jombang	100,00	100,00	99,01	87,66	100,00	100,00
18 Nganjuk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19 Madiun	94,06	91,94	100,00	100,00	100,00	92,52
20 Magetan	100,00	100,00	100,00	96,75	100,00	100,00
21 Ngawi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22 Bojonegoro	100,00	93,56	100,00	93,61	99,97	100,00
23 Tuban	100,00	81,45	97,24	81,53	100,00	89,35
24 Lamongan	100,00	100,00	100,00	100,00	96,98	100,00
25 Gresik	100,00	100,00	100,00	100,00	98,97	98,06
26 Bangkalan	100,00	94,13	100,00	72,56	100,00	94,28
27 Sampang	99,49	88,80	100,00	93,49	97,44	94,89
28 Pamekasan	100,00	94,94	100,00	93,33	100,00	93,18
29 Sumenep	100,00	92,00	100,00	100,00	100,00	93,70
<b>Kota</b>						
71 Kediri	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72 Blitar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	68,52
73 Malang	100,00	100,00	100,00	80,50	100,00	45,18
74 Probolinggo	100,00	91,73	100,00	100,00	98,37	100,00
75 Pasuruan	100,00	99,36	100,00	100,00	100,00	100,00
76 Mojokerto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	56,89
77 Madiun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
78 Surabaya	100,00	79,02	100,00	100,00	95,67	81,61
79 Batu	100,00	100,00	100,00	90,32	100,00	100,00
<b>Jawa Timur</b>	<b>99,08</b>	<b>92,50</b>	<b>99,28</b>	<b>92,03</b>	<b>99,07</b>	<b>94,20</b>

Sumber: BPS Republik Indonesia

# VII

## (6) Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016-2018

Kabupaten/Kota	2016			2017			2018		
	< SD	SD-SLTP	≥ SLTA	< SD	SD-SLTP	≥ SLTA	< SD	SD-SLTP	≥ SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Kabupaten</b>									
1 Pacitan	25,47	64,54	9,99	25,66	67,97	6,37	20,70	68,51	10,79
2 Ponorogo	41,01	49,90	9,10	31,95	55,54	12,51	26,92	55,74	17,34
3 Trenggalek	28,09	65,97	5,94	30,73	60,26	9,01	27,54	64,29	8,17
4 Tulungagung	15,01	70,76	14,23	24,46	62,52	13,02	17,89	61,58	20,53
5 Blitar	28,46	64,61	6,93	27,45	60,41	12,14	44,15	45,43	10,41
6 Kediri	30,87	52,86	16,27	24,07	61,82	14,11	28,15	55,54	16,31
7 Malang	33,37	59,95	6,69	23,97	67,71	8,32	36,76	57,79	5,45
8 Lumajang	38,23	56,35	5,42	27,03	65,67	7,30	30,85	60,69	8,46
9 Jember	49,70	44,75	5,55	46,82	47,56	5,62	44,98	48,34	6,68
10 Banyuwangi	46,11	45,41	8,48	37,31	52,30	10,39	42,81	47,38	9,81
11 Bondowoso	52,89	39,27	7,84	48,58	40,19	11,23	49,47	40,92	9,61
12 Situbondo	46,71	42,74	10,54	43,16	51,52	5,32	51,58	38,90	9,51
13 Probolinggo	47,68	44,81	7,51	43,34	49,13	7,53	44,80	45,13	10,07
14 Pasuruan	38,36	55,40	6,24	31,80	58,55	9,65	44,47	48,64	6,89
15 Sidoarjo	17,69	54,40	27,92	12,61	56,99	30,40	14,54	54,25	31,21
16 Mojokerto	19,26	60,89	19,85	18,54	62,17	19,29	19,54	57,36	23,11
17 Jombang	25,16	59,94	14,90	23,85	62,73	13,42	32,56	45,61	21,83
18 Nganjuk	31,57	59,24	9,19	22,64	57,47	19,89	27,14	55,10	17,76
19 Madiun	35,96	51,07	12,98	33,89	48,25	17,86	27,99	51,76	20,25
20 Magetan	33,17	45,10	21,73	29,19	47,41	23,40	22,43	56,40	21,17
21 Ngawi	33,11	53,13	13,76	33,74	52,67	13,59	39,01	49,51	11,48
22 Bojonegoro	24,24	63,17	12,06	28,28	55,82	15,90	35,72	54,47	9,81
23 Tuban	34,28	53,05	12,67	32,68	58,86	8,46	35,49	56,64	7,87
24 Lamongan	31,62	51,54	16,83	23,01	51,51	25,48	24,56	55,09	20,35
25 Gresik	21,19	59,06	19,74	12,53	57,29	30,18	17,46	53,36	29,19
26 Bangkalan	45,48	50,30	4,22	40,07	53,51	6,42	37,84	56,92	5,24
27 Sampang	51,62	41,66	6,73	49,00	44,96	6,04	50,59	44,88	4,53
28 Pamekasan	36,05	54,70	12,24	36,49	44,47	19,04	28,15	50,13	21,72
29 Sumenep	45,20	45,54	9,26	51,72	33,04	15,24	49,17	37,98	12,85
<b>Kota</b>									
71 Kediri	14,36	53,97	31,67	14,70	62,50	22,80	15,01	59,17	25,82
72 Blitar	21,57	52,57	25,86	13,57	63,28	23,15	15,60	55,92	28,48
73 Malang	24,16	60,92	14,92	20,88	63,77	15,35	28,18	47,06	24,77
74 Probolinggo	25,88	48,71	25,41	30,01	51,49	18,50	32,63	50,73	16,64
75 Pasuruan	22,98	56,71	20,31	19,40	61,25	19,35	20,13	60,75	19,12
76 Mojokerto	20,27	55,88	23,85	14,13	55,05	30,82	19,22	44,40	36,38
77 Madiun	23,56	41,21	35,23	26,22	29,18	44,60	9,65	64,61	25,74
78 Surabaya	15,41	58,98	25,61	21,66	63,59	14,75	28,17	53,84	17,98
79 Batu	10,69	59,72	29,59	14,56	63,55	21,89	38,63	32,85	28,52
<b>Jawa Timur</b>	<b>35,15</b>	<b>53,17</b>	<b>11,68</b>	<b>32,17</b>	<b>54,57</b>	<b>13,26</b>	<b>34,83</b>	<b>51,66</b>	<b>13,50</b>

Sumber: BPS Republik Indonesia

## VII

## (7) Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja Tahun 2016-2018

Kabupaten/Kota	2016			2017			2018		
	Tidak Bekerja	Bekerja Di Sektor Informal	Bekerja Di Sektor Formal	Tidak Bekerja	Bekerja Di Sektor Informal	Bekerja Di Sektor Formal	Tidak Bekerja	Bekerja Di Sektor Informal	Bekerja Di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Kabupaten</b>									
1 Pacitan	22,62	70,59	6,79	24,09	67,93	7,98	34,01	55,05	10,95
2 Ponorogo	31,17	61,17	7,66	29,25	63,12	7,63	36,67	54,82	8,51
3 Trenggalek	39,91	48,88	11,22	34,49	55,39	10,12	40,53	50,53	8,94
4 Tulungagung	37,28	42,23	20,48	40,32	42,99	16,69	34,66	42,62	22,72
5 Blitar	36,83	41,40	21,77	38,29	46,34	15,37	33,68	53,44	12,88
6 Kediri	44,01	36,34	19,65	43,72	34,78	21,50	44,39	34,45	21,17
7 Malang	41,79	32,52	25,68	40,17	36,38	23,45	39,36	37,00	23,64
8 Lumajang	43,80	39,59	16,60	48,21	37,01	14,78	42,91	37,79	19,30
9 Jember	46,31	40,61	13,09	49,25	31,12	19,63	43,73	41,28	14,99
10 Banyuwangi	43,83	33,30	22,87	41,52	40,51	17,97	46,37	27,60	26,03
11 Bondowoso	0,12	48,45	11,43	35,15	52,33	12,52	33,30	57,59	9,11
12 Situbondo	37,12	50,83	12,06	42,56	43,67	13,77	34,32	46,11	19,57
13 Probolinggo	33,68	57,07	9,25	39,32	45,62	15,06	44,11	35,78	20,11
14 Pasuruan	42,62	33,80	23,58	42,35	40,20	17,45	40,09	39,63	20,28
15 Sidoarjo	54,48	20,50	25,02	48,47	21,76	29,77	50,15	19,61	30,25
16 Mojokerto	39,05	33,76	27,19	38,12	45,00	16,88	43,68	26,34	29,99
17 Jombang	44,91	34,55	20,55	49,45	36,87	13,68	46,92	34,42	18,67
18 Nganjuk	43,22	40,68	16,10	46,90	35,44	17,66	42,89	44,33	12,79
19 Madiun	48,55	41,52	9,94	45,20	43,23	11,57	43,81	50,44	5,75
20 Magetan	37,70	52,80	9,51	38,71	46,62	14,67	30,40	54,00	15,60
21 Ngawi	33,60	59,45	6,95	37,16	52,19	10,65	43,50	40,83	15,67
22 Bojonegoro	42,95	44,66	12,39	42,24	37,17	20,59	37,48	46,16	16,35
23 Tuban	42,15	41,35	16,50	40,94	43,80	15,26	37,48	48,90	13,62
24 Lamongan	40,15	43,49	16,36	36,96	45,60	17,44	35,85	47,13	17,02
25 Gresik	47,94	36,84	15,21	48,00	30,82	21,18	38,68	39,86	21,46
26 Bangkalan	31,49	61,47	7,04	35,55	51,59	12,86	39,50	47,18	13,33
27 Sampang	24,51	68,19	7,30	34,88	58,71	6,41	35,31	58,22	6,47
28 Pamekasan	24,47	69,47	6,05	33,77	57,08	9,15	32,42	58,80	8,78
29 Sumenep	28,42	59,03	12,55	29,04	57,47	13,49	35,07	55,28	9,65
<b>Kota</b>									
71 Kediri	36,08	31,00	32,92	44,14	25,65	30,21	49,73	24,04	26,23
72 Blitar	31,39	27,63	40,98	47,15	32,84	20,01	35,34	34,21	30,46
73 Malang	34,81	25,62	39,57	36,83	24,70	38,47	44,39	13,86	41,76
74 Probolinggo	38,26	20,16	11,58	41,92	33,41	24,67	38,16	31,48	30,36
75 Pasuruan	40,67	11,02	48,31	46,51	33,73	19,76	40,58	24,31	35,12
76 Mojokerto	44,05	19,94	36,01	41,55	37,26	21,19	53,36	27,76	18,88
77 Madiun	46,21	30,07	23,72	45,37	28,76	25,87	40,47	31,66	27,87
78 Surabaya	45,27	22,21	32,51	42,81	23,94	33,25	46,52	20,20	33,29
79 Batu	34,35	47,59	18,05	31,67	31,86	36,47	41,55	30,90	27,56
<b>Jawa Timur</b>	<b>38,92</b>	<b>44,96</b>	<b>16,12</b>	<b>40,13</b>	<b>43,08</b>	<b>16,79</b>	<b>39,95</b>	<b>42,56</b>	<b>17,48</b>

Sumber: BPS Republik Indonesia

## VII

## (8) Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja Tahun 2016-2018

Kabupaten/Kota	2016		2017		2018	
	Bekerja Di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan Di Sektor Pertanian	Bekerja Di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan Di Sektor Pertanian	Bekerja Di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan Di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	61,17	16,21	60,18	15,73	38,67	27,32
2 Kab. Ponorogo	55,70	13,13	59,34	11,41	31,66	31,67
3 Kab. Trenggalek	43,89	16,20	42,57	22,94	33,25	26,22
4 Kab. Tulungagung	32,15	30,57	28,06	31,62	40,72	24,62
5 Kab. Blitar	37,65	25,52	39,17	22,54	37,79	28,53
6 Kab. Kediri	25,38	30,61	25,92	30,36	40,19	15,42
7 Kab. Malang	28,80	29,41	31,15	28,68	42,70	17,94
8 Kab. Lumajang	36,39	19,81	30,41	21,38	37,35	19,73
9 Kab. Jember	33,85	19,85	28,47	22,28	29,49	26,78
10 Kab. Banyuwangi	28,72	27,46	29,36	29,12	40,41	13,22
11 Kab. Bondowoso	44,82	15,06	33,97	30,88	40,50	26,20
12 Kab. Situbondo	37,05	25,83	37,34	20,10	39,98	25,70
13 Kab. Probolinggo	46,26	20,06	36,28	24,40	35,37	20,51
14 Kab. Pasuruan	21,92	35,46	25,90	31,75	40,72	19,19
15 Kab. Sidoarjo	4,33	41,19	1,77	49,76	47,62	2,23
16 Kab. Mojokerto	10,39	50,56	18,50	43,38	43,64	12,68
17 Kab. Jombang	24,94	30,15	16,29	34,26	42,16	10,93
18 Kab. Nganjuk	34,81	21,97	25,90	27,20	29,46	27,65
19 Kab. Madiun	24,97	26,48	26,47	28,33	22,72	33,47
20 Kab. Magetan	34,89	27,41	36,74	24,55	33,47	36,12
21 Kab. Ngawi	49,51	16,89	42,92	19,92	25,65	30,84
22 Kab. Bojonegoro	42,25	14,80	36,37	21,39	18,79	43,73
23 Kab. Tuban	30,70	27,15	38,31	20,75	26,59	35,92
24 Kab. Lamongan	34,06	25,80	39,83	23,21	29,96	34,20
25 Kab. Gresik	19,76	32,30	18,45	33,55	41,40	19,92
26 Kab. Bangkalan	56,64	11,87	50,25	14,20	19,56	40,94
27 Kab. Sampang	57,72	17,77	52,56	12,56	29,48	35,21
28 Kab. Pamekasan	64,89	10,63	50,61	15,62	20,95	46,63
29 Kab. Sumenep	53,50	18,09	57,18	13,78	26,06	38,87
30 Kota Kediri	7,50	56,42	0,76	55,10	44,00	6,27
31 Kota Blitar	3,31	65,30	4,82	48,03	59,70	4,96
32 Kota Malang	0,00	65,19	2,10	61,07	54,60	1,01
33 Kota Probolinggo	1,99	59,75	8,17	49,91	55,03	6,80
34 Kota Pasuruan	10,04	49,29	11,24	42,25	54,93	4,49
35 Kota Mojokerto	2,39	53,55	-	58,45	46,64	-
36 Kota Madiun	0,00	53,79	-	54,63	54,19	5,35
37 Kota Surabaya	0,62	54,11	5,34	51,85	53,48	-
38 Kota Batu	27,28	38,36	16,17	52,16	58,13	0,32
<b>Jawa Timur</b>	<b>35,57</b>	<b>25,51</b>	<b>33,81</b>	<b>26,06</b>	<b>34,66</b>	<b>25,36</b>

Sumber: BPS Republik Indonesia

<https://surabayakota.bps.go.id>

<https://surabayakota.bps.go.id>



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SURABAYA**

Jl. A. Yani 152 E Surabaya 60231

Telp (031) 8296692, Faks (031) 8296691

Website : <https://surabayakota.bps.go.id> , Email : [bps3578@bps.go.id](mailto:bps3578@bps.go.id)